jurnal kajian
LEMHANNAS RI
Edisi 26 | Juni 2016

Rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika
(Pendekatan Kewaspadaan Nasional)

Faktor Idiosinkratik Pemimpin dalam Perumusan Politik Luar Negeri

Ketahanan Nasional:
Permasalahan dan Solusinya
Dari Perspektif Kependudukan

Pemahaman Otonomi Daerah
(Study Tentang Tingkat
Keberhasilan Pelaksanaan
Otonomi Daerah Kabupaten/Kota
di Wilayah III Cirebon)

Strategi Pertahanan dan
Keamanan Nasional Indonesia

Membangun Paradigma
Poros Maritim Dunia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan- Nya, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 26 dapat terbit.

Pembaca yang berbudiman, "Ketahanan Nasional" kini menjadi bahan yang menarik untuk didiskusikan di berbagai forum dan kajian, tentu saja mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Menariknya dalam perspektif "Ketahanan Nasional" ini dapat ditinjau dari berbagai aspek terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena itu, sebagai salah satu media komunikasi ilmiah bagi para pemerhati "ketahanan nasional" maka diterbitkanlah Jurnal ini.

Dengan menggunakan perspektif "Ketahanan Nasional"dan secara ilmiah serta berlatar-belakang pada disiplin ilmu dan keahlian yang dimiliki para penulis, tulisan dan kajian ilmiah ini akan menjadi informasi yang bermanfaat bagi para pembaca.

Dalam edisi 26 kali ini, redaksi menyajikan beberapa tulisan dan kajian ilmiah yang terkait dengan isu-isu nasional yang masih hangat dibincangkan, antara lain yaitu rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika, kependudukan dari perspektif Ketahanan Nasional, dan paradigma poros maritim dalam pendidikan melalui lintas batas keilmuan.

Selain itu, isu otonomi daerah masih menjadi tema yang menarik diangkat, kali ini dalam studinya pada keberhasilan pelaksanaannya di daerah Kabupaten/kota wilayah III Cirebon. Isu lain yang juga menarik diangkat yaitu terkait dengan strategi pertahanan dan keamanan nasional.

Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan seluruh pihak yang turut berpartisipasi mendukung terlaksananya penerbitan jurnal ini.

Selamat Membaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Juni 2016

PEMIMPIN REDAKSI

● **PELINDUNG: Agus Widjojo** ● **PEMBINA:** Bagus Puruhito ● **PENGARAH:** Suhardi Alius ● **PEMIMPIN REDAKSI:** E. Estu Prabowo ● **EDITOR: Wahyu Widji P. - M. Isdar - Linda Purnamasari - Bambang Iman Aryanto** ● **DESAIN: Gatot - Magista Dian F** ● **SEKRETARIAT: Cahtaqadri Hildamona - Ni Made Vira Saraswati - Mardiana - Theresia W - Indiah Winarni - Yatik Wulandari** ● **DISTRIBUSI: Supriyono- Ayu Novita Sari - Deannisa** ● Isi di luar tanggung jawab percetakan CV. Mandiri Citra Berdikari

5
Faktor Idiosinkratik Pemimpin dalam Perumusan Politik Luar Negeri

17
Rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika (Pendekatan Kewaspadaan Nasional)

32
Ketahanan Nasional: Permasalahan dan Solusinya Dari Perspektif Kependudukan

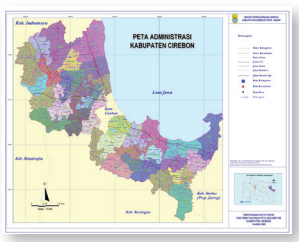

46
Pemahaman Otonomi Daerah (Study Tentang Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon)

59
Membangun Paradigma Poros Maritim Dunia

68
Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia

Faktor Idiosinkratik Pemimpin dalam Perumusan Politik Luar Negeri

Boy Anugerah[1]
Alumnus Program Studi Magister Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia dan Program Studi Sarjana Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran
boy.anugerahsip@gmail.com

Abstrak

Politik luar negeri merupakan alat bagi negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya, baik pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Dikarenakan berada pada level analisis negara, perumusan politik luar negeri berasal dari banyak sumber merujuk pada kompleksitas kepentingan nasional yang hendak dicapai, diantaranya sumber sistemik, sumber masyarakat (masyarakat madani), sumber struktural pemerintah, dan faktor idiosinkratik pemimpin. Dengan tidak mengabaikan sumber-sumber perumusan politik luar negeri lainnya, tulisan ini bermaksud menjelaskan definisi faktor idiosinkratik pemimpin dan seberapa besar faktor tersebut memainkan peran dalam perumusan politik luar negeri suatu negara, corak diplomasi yang dijalankan, serta efektivitas pencapaian kepentingan nasional. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah medote deskriptif dengan menjelaskan definisi dan contoh pengaruh faktor idiosinkratik dalam perumusan politik luar negeri dan studi kasus dengan mengambil sampel pelaksanaan politik luar negeri di Iran dan Indonesia.

Kata Kunci: Politik Luar Negeri, Faktor Idiosinkratik, Kepentingan Nasional.

PENDAHULUAN

Politik luar negeri pada hakikatnya merupakan suatu "*action theory*", yakni kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai kepentingan tertentu, lazimnya disebut sebagai kepentingan nasional. Kepentingan nasional berada pada tataran multiaspek, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Secara umum, pengertian politik luar negeri adalah suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan politik internasional (Yanyan Mochamad Yani 2007,1).

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian dalam studi hubungan internasional. Sebagai bidang kajian, politik luar negeri memiliki kompleksitas dalam hal ontologi keilmuannya, yakni aspek bagaimana mengkaji bidang ilmu tersebut. Kompleksitas tersebut terjadi karena makin banyaknya aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan politik luar negeri. Negara, sebagai entitas politik yang berdaulat memiliki beragam aktor dengan beragam kepentingan, seperti masyarakat awam sebagai aktor dengan kuantitas terbesar, masyarakat madani yang mengusung isu-isu yang spesifik (lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepentingan, kelompok penekan), partai politik sebagai mesin demokrasi, legislatif yang memegang kewenangan dalam hal anggaran dan pengawasan, serta eksekutif, dalam hal ini presiden dan menteri luar negeri. Meksipun berada pada satu ranah, yakni domestik suatu negara, proses perumusan berjalan tidak mudah dan kerap berlangsung alot (kadang-kadang terjadi *deadlock*).

Di luar faktor internal, faktor eksternal juga menjadi determinan dalam perumusan politik luar negeri. Faktor eksternal ini meliputi dinamika kawasan, pola-pola hubungan dengan negara sahabat, keterlibatan dalam berbagai organisasi dan rezim internasional, serta opini dari masyarakat internasional (hal ini dimungkinkan karena dunia sudah memasuki era globalisasi yang didukung oleh kemajuan di bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi). Meskipun faktor internal (domestik) dan faktor eksternal adalah dua hal berbeda dan terpisah, terdapat korelasi yang kuat diantara keduanya. Politik luar negeri merupakan cerminan dari kondisi internal (domestik) suatu negara. Meminjam istilah dari Henry Kissinger, seorang akademisi dan praktisi politik luar negeri Amerika Serikat, "*foreign policy begins when domestic policy ends*" (Wolfram F Hanrieder 1971, 22).

Perumusan politik luar negeri suatu negara secara umum bertujuan untuk mencapai tujuan nasional yang spesifik, dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Jack C Plano dan Roy Olton1999, 5). Menurut Rosenau, politik luar negeri ditujukan untuk memelihara dan menjaga kelangsungan hidup suatu negara (James N Rosenau,Gavin Boyd, dan Kenneth W. Thompson 1976, 27). Jika dituangkan dalam bentuk gradasi, tujuan politik luar negeri terdiri atas tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Tujuan jangka panjang yang dimaksud di sini adalah mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan (KJ Holsti 1992, 21).

Politik luar negeri merupakan sebuah produk. Sebagai produk, politik luar negeri memiliki sumber dan melalui sebuah proses yang dinamakan sebagai formulasi politik luar negeri. Sumber politik luar negeri di bagi menjadi dua, yakni sumber internal dan sumber eksternal. Howard Lentner mengklasifikasikan sumber politik luar negeri ke dalam dua bagian, yakni determinan luar negeri dan determinan

domestik (Howard Lentner 1974, 105-171).

Determinan luar negeri merujuk pada sistem internasional dan situasi. Sistem internasional secara sederhana dapat dipahami sebagai pola-pola interaksi antar negara di dunia. Sebagai contoh, pada masa Perang Dingin (periode 1945-1990), dunia terbagi ke dalam dua kutub, yakni Blok Barat dengan Amerika Serikat sebagai poros, dan Blok Timur dengan Uni Soviet sebagai poros. Kondisi ini dinamakan sebagai sistem internasional yang bipolar. Kondisi berubah ketika perang dingin berakhir dan dampak globalisasi semakin masif, dunia berubah dalam kondisi sistem yang bersifat multipolar, bukan saja sebagai produk munculnya banyak negara merdeka pasca Perang Dingin, tapi juga munculnya aktor-aktor non-negara. Berbeda dengan sistem internasional, situasi adalah kondisi yang tidak tercakup atau mencakup keseluruhan dalam sistem internasional. Sebagai contoh, bentuk kerja sama ekonomi dan pertahanan antara negara-negara Asia Tengah dengan Rusia dan Tiongkok dalam *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) dipandang sebagai situasi. Begitu juga dengan aliansi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dalam memerangi ISIS di Irak dan Suriah, diklasifikasikan sebagai situasi.

Determinan domestik memiliki cakupan yang lebih banyak dibandingkan dengan determinan luar negeri. Determinan ini mencakupi aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, budaya politik, sistem politik, sistem pemerintahan, sikap, persepsi, dan pengetahuan dari pemimpin politik. Baik determinan luar negeri, maupun determinan domestik, merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan dalam memproduksi politik luar negeri suatu negara. Pemisahan kedua sumber mencerminkan perumusan politik luar negeri yang tidak holistik.

Dari semua sumber perumusan politik luar negeri yang disebutkan, baik yang termasuk dalam determinan domestik, maupun determinan luar negeri, sangatlah sulit untuk dilakukan pembobotan. Semisal, bobot sistem politik lebih besar apabila dibandingkan dengan aspek persepsi elit, atau bobot demografi lebih kecil dibandingkan dengan bobot geografi. Namun demikian, tulisan ini mencoba memberikan penjelasan seberapa besar sebuah faktor berpengaruh terhadap pencapaian kepentingan nasional yang menjadi esensi dilaksanakannya politik luar negeri. Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis lebih mendalam faktor idiosinkratik (bisa juga disebut sebagai persepsi elit) dalam memproduksi politik luar negeri suatu negara.

Tulisan ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pertama, akan dibahas mengenai definisi faktor idiosinkratik, apa yang dimaksud dengan faktor idiosinkratik, karakteristik apa saja yang melekat pada faktor tersebut. Kedua, akan dibahas mengenai pengaruh faktor idiosinkratik Mahmud Ahmadinejad di Iran yang memberikan corak dan warna bagi diplomasi Iran di panggung internasional, terutama kontestasi pemikiran dan *psywar* dengan Amerika Serikat di berbagai forum internasional. Ketiga, akan dijelaskan bagaimana faktor idiosinkratik Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno. Keempat, akan ditelaah efektivitas politik luar negeri Iran dan Indonesia dalam pencapaian kepentingan nasional masing-masing. Kelima, bagaimana mendudukkan faktor idiosinkratik atau persepsi elit dalam formulasi politik luar negeri negara dikaitkan dengan pencapaian kepentingan nasional. Terakhir, penulis akan menyampaikan catatan akhir berupa kesimpulan dan saran penulis mengenai permasalahan yang diangkat.

PEMBAHASAN

Faktor Idionsinkratik atau Persepsi Elit

Faktor idiosinkratik dikenal juga dengan istilah persepsi elit. Didefinisikan sebagai hal-hal yang melekat pada seseorang (pemimpin) sehingga mempengaruhi pola pikir, persepsi, dan cara pandang dalam melihat suatu permasalahan serta pengambilan keputusan. Dalam studi hubungan internasional, dikenal terminologi *level of analysis*, yakni sebuah pisau analisa dalam membedah kasus-kasus dalam hubungan internasional. Pisau analisa ini dimulai dari unit terkecil, yakni individu, kemudian bergerak ke unit yang lebih besar, yakni masyarakat, negara, dan sistem internasional. Dari *level of analysis* tersebut, dapat dilihat bahwa faktor individu (idionsinkratik/persepsi elit) merupakan level yang paling dasar, namun fundamental. Bagaimana sistem internasional, negara, dan masyarakat terbentuk tidak terlepas dari level individu yang menyusunnya. Jika dianalogikan ke dalam masyarakat dalam perspektif sosiologi, komunitas etnis Tiongkok yang ulet merupakan produk dari individu-individu Tiongkok yang ulet, demikian juga halnya dengan komunitas Jawa yang santun dan ramah, tidak terlepas dari individu-individu Jawa yang memiliki karakteristik tersebut. Hanya perbedaan mendasarnya adalah, dalam studi hubungan internasional, individu dimaksud adalah pemimpin yang memberikan pengaruhnya dalam formulasi politik luar negeri.

Ada banyak hal yang melekat pada faktor idiosinkratik pemimpin. Pertama, adalah **latar belakang keluarga**. Latar belakang keluarga di sini mencakup status sosial keluarga, kondisi perekonomian keluarga, serta hubungan sosial dengan masyarakat. Kedua, **latar belakang pendidikan**. Latar belakang pendidikan mencakup di mana seorang pemimpin mengenyam pendidikan, sejak sekolah dasar hingga menempuh pendidikan ke jenjang tertinggi. Pendidikan di sini tidak hanya mengacu pendidikan formal saja, tapi juga pendidikan informal. Sejarah Republik Indonesia mencatat bahwa para bapak bangsa adalah mereka yang bergelut secara fisik dan pemikiran langsung dengan dan dari masyarakat. Bagaimana seorang Soekarno memimpin Republik Indonesia periode revolusi fisik-1965, sangat dipengaruhi oleh aktivitasnya sebagai aktivis organisasi PNI, *solidarity maker* di tengah bangsa terjajah, dan pemimpin yang diasingkan oleh kolonial Belanda karena intelektualitas dan kritisismenya. Sangat sedikit persepsi Bung Besar dipengaruhi oleh ilmu yang beliau enyam di bangku Fakultas Teknik, Institut Teknologi Bandung. Ketiga, **pengalaman dan pembelajaran seorang pemimpin yang merupakan produk dari dinamika dalam kehidupan sosialnya**, sejak kecil hingga tumbuh dewasa. Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, sekaligus Proklamator Republik Indonesia, mengalami pembabakan pemikiran sebagai hasil dari dinamika kehidupan sosialnya. Pemikiran Soekarno sebagai pemimpin dibagi ke dalam babak pra - kemerdekaan (beliau dikenal sebagai pemimpin yang menerapkan gaya non - kooperasi dengan kolonial), babak kemerdekaan (dikenal sebagai pemimpin asia yang anti blok, anti kapitalisme, dan *solidarity maker* pemersatu bangsa), dan babak pasca kemerdekaan (pencetus konsep demokrasi terpimpin dan presiden seumur hidup).

Aspek keempat adalah **afiliasi elit/ pemimpin**. Dalam sistem politik yang menempatkan partai politik sebagai mesin demokrasi nomor wahid, persepsi elit sangat dibentuk oleh ideologi dan kepentingan yang diusung oleh partai politik tempat ia bernaung. Sebagai contoh, kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh Goerge Walker Bush Junior

selama menjadi Presiden Amerika Serikat dengan menginvasi Afghanistan pada tahun 2001 dan Irak pada tahun 2003 sangat dipengaruhi oleh ideologi dan cara pandang kalangan konservatif di tubuh Partai Republik, partai yang notabene menjadi pengusungnya. Diskursus mengenai afiliasi elit tidak hanya sebatas partai politik. Dalam cakupan yang lebih besar, meminjam pisau analisa *level of analysis*, khususnya pada kuadran internasional, afiliasi juga berarti keanggotaan suatu negara dalam forum-forum regional, internasional, dan global. Sebagai contoh, dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Filipina dalam konflik Laut China Selatan (versi Filipina adalah Laut Filipina Barat) mengacu pada *excellent bilateral relations* kedua negara. Keterlibatan Inggris (yang pada khirnya disesali PM Tony Blair) dalam invasi ke Afghanistan untuk menggulingkan Taliban pada tahun 2001, dan penggulingan Saddam Hussein di Irak pada 2003 sangat dipengaruhi oleh keanggotaan Inggris dalam blok NATO yang dipimpin Amerika Serikat.

Terakhir, faktor idionsinkratik pemimpin dipengaruhi oleh **produksi pengetahuannya**. Produksi pengetahuan yang dimaksudkan di sini berhubungan dengan latar belakang kehidupan sosial dan latar belakang pendidikan, namun lebih spesifik pada bagaimana pemimpin tersebut menyerap pengetahuan menjadi persepsi, pola pikir, dan cara pandang dalam melihat suatu permasalahan. Sebagai contoh, seorang presiden yang berasal dari latar belakang militer cenderung mengadopsi cara pandang militer dalam memimpin negara. Seorang menteri luar negeri negara berkembang yang mengenyam pendidikan di Barat (Amerika dan Eropa) cenderung melakukan kerja sama dengan negara-negara barat dan mengadopsi pola pemikiran mereka yang liberalis dan kapitalistik baik kebijakan yang sifatnya politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan.

Ahmadinejad dan Nuklir Iran

Secara geografis, Iran berada pada posisi persimpangan Timur Tengah, Asia Barat, dan Kaukasus. Di bagian Utara, Iran bertetangga dengan Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, di bagian Timur bersebelahan dengan Afghanistan dan Pakistan, sedangkan di bagian Barat bersebelahan dengan Irak dan Turki. Secara geopolitik, geografi Iran menempatkan Iran sebagai negara yang rawan gesekan. Kondisi geografis Iran menempatkan Iran sebagai negara yang banyak menjadi saksi sekaligus terlibat dalam perang-perang besar, salah satunya adalah perang antara Rusia melawan Inggris dan India.

Ditilik secara geostrategi, posisi Iran sangat menguntungkan karena Iran memiliki akses ke Laut Kaspia yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi. Iran memiliki posisi sentral karena wilayahnya dilewati oleh pipa-pipa minyak menuju Asia, seperti India, Pakistan, dan Tiongkok. Posisi Selat Hormuz juga menempatkan Iran memiliki peranan strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia.

Penguasaan sumber kekayaan alam yang besar serta posisi strategis yang dimiliki Iran, membuat Ahmadinejad, mantan Presiden Iran pada masa itu melakukan perubahan strategi dan orientasi geopolitik. Jika sebelumnya kebijakan Iran lebih banyak menekankan pada upaya mengembangkan transportasi baik darat, laut, maupun udara, maka pada masa Ahmadinejad strategi politik lebih ditekankan pada upaya membangun kapasitas energi. Salah satu lompatan besar yang ditempuh Iran pada masa Ahmadinejad adalah pengembangan energi nuklir untuk kepentingan damai.

Kebijakan yang ditempuh oleh

Ahmadinejad ini mendapatkan resistensi dari negara-negara lain, terutama Israel yang merasa terancam. Begitu juga respon negatif yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat. Banyak pihak memandang bahwa pengembangan energi nuklir di Iran bukanlah untuk kepentingan damai, melainkan upaya untuk membangun dan memperkuat kapasitas militer. Jika hal ini benar, merupakan sebuah "dilema keamanan" bagi negara-negara yang memiliki benturan kepentingan nasional dengan Iran, seperti halnya Israel dan Amerika Serikat. Di berbagai forum, Israel dan Amerika Serikat kerap mengecam Iran sebagai negara 'poros setan' karena kepemilikan nuklir membuat Iran menjadi momok bagi keamanan dan perdamaian dunia.

Reaksi keras dilontarkan oleh Presiden Iran, Ahmadinejad, yang menyebut Israel dan Amerika Serikat melakukan hipokrisi karena sejatinya mereka adalah teroris yang sebenarnya. Invasi Amerika Serikat ke Afghanistan dan Irak, menurut Ahmadinejad, merupakan tindakan yang tidak memiliki legitimasi dan terbukti keliru. Kepemilikan nuklir oleh Israel juga menunjukkan bahwa dunia bersikap munafik karena Israel menggunakanya sebagai alat penggentar untuk mendukung okupasinya di Palestina. Asumsi dasar yang dikemukakan oleh Ahmadinejad adalah jika negara-negara lain seperti India, Pakistan, Amerika Serikat, Israel, Tiongkok, Korea Utara, dan lainnya boleh memiliki nuklir (meskipun dalam beberapa kasus, beberapa negara diragukan motif kepemilikannya untuk kepentingan damai), juga merupakan sebuah hal yang memungkinkan bagi Iran untuk menempuh jalan yang sama, bahkan dengan penekanan guna keperluan damai.

Strategi pengembangan energi nuklir untuk kepentingan damai dan gaya konfrontasi Iran di berbagai panggung internasional tidak terlepas dari faktor idiosinkratik yang dimiliki oleh Ahamadinejad, yakni latar belakang pendidikan, kehidupan sosial, pengalaman, persepsi, cara pandang, serta cara mengambil keputusan. Ditilik dari latar belakang pendidikan, Ahmadinejad adalah pemegang gelar doktor dalam bidang teknik dan perencanaan lalu lintas dan transportasi. Sebelum memegang tampuk kekuasaan sebagai presiden, Ahamadinejad adalah seorang dosen, sempat bergabung dengan korps pengawal Revolusi Islam Iran pada tahun 1986, menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur Maku dan Khoy, serta pernah menjadi Walikota Teheran.

Merujuk pada faktor idiosinkratik Ahmadinejad tersebut, bisa dipahami kebijakan reorientasi pengembangan energi dan gaya diplomasi konfrontatif yang dijalankan oleh Iran pada masa Ahmadinejad merupakan produk yang tidak terlepas dari persepsi Ahmadinejad sebagai elit Iran (kepala negara). Pola pikir sebagai teknokrat membuat Ahamadinejad berfikir strategik dan jangka panjang dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber kekayaan alam Iran sebagai dasar membangun Iran ke depan. Keterlibatannya dalam gerakan Revolusi Islam Iran membawa Iran bersikap konfrontatif terhadap Amerika Serikat, negara yang selama ini sangat menentang revolusi dan pengembangan energi nuklir di Iran. Pengalamannya sebagai birokrat pemerintahan sebelum menjabat sebagai presiden menempatkannya sebagai sosok yang popular di Iran, bahkan di forum internasional (Ahmadinejad mendapat dukungan dari Hugo Chavez - Presiden Venezuela pada waktu itu, yang juga penentang Amerika Serikat). Ahmadinejad tidak segan menekankan bahwa kebijakan Iran benar adanya, terlebih lagi ia mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Iran.

Dengan kondisi seperti ini, kebijakan-

kebijakan luar negeri Iran yang banyak dipengaruhi oleh idiosinkratik Ahmadinejad sebagai kepala negara mampu menempatkan Iran sebagai negara yang berpengaruh di kawasan, tidak hanya dari sisi ekonomi melalui pengembangan energi nuklir dan penguasaan energi, tapi juga dari sisi pertahanan dan keamanan, karena membuat Israel dan beberapa negara Arab yang berseberangan dengan Iran melakukan reorientasi kebijakan luar negeri serta pertahanan dan keamanannya (Iran adalah negara berhaluan Syiah, mayoritas Arab berhaluan Sunni).

Soekarno dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Indonesia pada dekade 1950-an adalah sebuah *nation-state* muda yang baru terlepas dari belenggu kolonialisme dan imperialisme, giat berkampanye untuk mendapat pengakuan kedaulatan dari negara lain, serta berupaya membuktikan eksistensinya di panggung internasional. Pada masa tersebut, Indonesia yang baru lahir dari rahim perjuangan anak-bangsanya harus dihadapkan pada kondisi sistem internasional dan politik global yang sarat benturan. Dunia pada waktu itu terkotak dalam dua kutub kekuatan besar, blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur dengan Uni Soviet sebagai panglimanya. Eksistensi kedua kutub tersebut berimbas kepada banyak negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Melalui strategi *back - yard policy*, kedua kekuatan besar menjalankan *proxy war* dengan mengajak negara-negara di dunia untuk memutuskan, apakah berdiri di sisi Amerika Serikat atau Uni Soviet. Dalam lingkup Asia Tenggara, negara-negara sahabat Indonesia juga mengalami turbulensi yang sama. Vietnam, misalnya, terbelah menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Bergeser sedikit ke Asia Timur, Korea, berkecamuk perang saudara antara mereka yang mendukung komunisme dan mereka yang mendukung liberalisme - kapitalisme (sampai saat ini kedua Korea masih dalam kondisi perang dengan status gencatan senjata). Sejatinya perang sesungguhnya tidaklah terjadi, sangat kontras dengan Perang Dunia I dan II yang memakan jutaan korban jiwa. Perang yang berlangsung adalah perang dingin, perang dengan banyak negara satelit, perang psikologis, dan perang dengan menggunakan efek penggentar.

Dalam kondisi dilematis tersebut, pemerintah Indonesia pada waktu itu, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno harus menentukan arah politik luar negeri Indonesia. *Quo vadis* Indonesia? Situasi di dalam negeri juga hiruk-pikuk karena ada kekuatan yang mendukung komunisme (PKI dan golongan kiri lainnya), ada kekuatan yang anti komunisme (Masyumi, NU), ada kekuatan yang anti keduanya. Meksipun sudah mendapat pengakuan kedaulatan dari negara lain, eksistensi Indonesia belumlah terlalu kokoh mengingat partisipasi di berbagai forum internasional masih minim.

Beruntung Indonesia memiliki Soekarno, presiden yang lahir dari rahim perjuangan rakyat. Dengan kemampuan orasinya dan pemahaman yang baik mengenai hubungan antar bangsa, Soekarno dengan lantang menyuarakan bahwa Indonesia adalah negera merdeka dan berdaulat. Indonesia adalah negara yang cinta damai, dan oleh karenanya menjalin hubungan dengan negara manapun berdasarkan prinsip hubungan antar bangsa dan negara yang baik (non intervensi). Komitmen Indonesia ini dibuktikan dengan digalangnya berbagai forum yang menunjukkan bahwa Indonesia dan negara-negara lainnya menolak untuk terpolarisasi dalam dua kutub, mendukung penuh upaya perdamaian, dan gigih memperjuangkan kemerdekaan negara-negara yang masih dibelenggu oleh

kolonialisme dan imperialisme. Forum tersebut berupa Gerakan Non Blok atau *Non Allignment Movement* pada tahun 1954 dan Konferensi Asia - Afrika di Bandung pada tahun 1955. Soekarno juga menyerukan istilah *Nefo* atau *New Emerging Forces* untuk menyebut negara-negara yang baru merdeka sebagai tandingan *Oldefo* atau *Old Establish Forces* merujuk pada negara-negara mapan bermental penjajah.

Berbagai kebijakan yang ditempuh Indonesia pada masa Soekarno tersebut pada dasarnya berada pada haluan politik luar negeri bebas dan aktif, yakni politik Indonesia untuk bebas bergaul dengan negara manapun dan aktif dalam berbagai forum internasional. Politik yang digagas oleh Moehammad Hatta dan dijalankan dengan baik pada masa itu sangat sesuai dengan kondisi Indonesia yang baru merdeka dan rentan menjadi satelit dari kekuatan besar dunia. Bagaimana politik ini bisa berjalan dengan baik dan mengantar Indonesia ke panggung terhormat pada masa itu?

Figur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang berkarakter *solidarity maker* memainkan peran sentral dalam panggung politik internasional. Jika karakter *solidarity maker* tersebut mampu mempersatukan Indonesia yang beranekaragam suku, agama, budaya, dan adat istiadat, menjadi negara yang merdeka dan berdaulat pada tahun 1945 (*Unity in Diversity*), maka karakter tersebut mampu memantik semangat juang bangsa dan negara lainnya yang masih dibelenggu penjajahan (negara-negara Asia dan Afrika) untuk lepas dan berdiri sebagai negara berdaulat. Pembentukan Gerakan Non Blok yang notabene merupakan ide Soekarno juga menunjukkan karakter Soekarno yang anti penjajahan gaya baru (*back yard policy*, *proxy war*).

Corak politik luar negeri Indonesia pada tempo tersebut juga banyak dipengaruhi oleh ideologi nasionalisme yang dipegang erat oleh Soekarno. Nasionalisme dalam persepsi Soekarno bukanlah konsep tunggal, tapi dua sisi mata uang dengan internasionalisme pada sisi lainnya. Penjabaran konsep dua sisi mata uang ini adalah dalam bentuk mendukung penuh kemerdekaan negara-negara di seluruh dunia, menolak segala bentuk kolonialisme dan imperialisme (baik gaya lama maupun gaya baru), mendukung humanisme, dan berupaya mewujudkan keamanan dan ketertiban dunia melalui partisipasi aktif dalam forum internasional.

Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada masa Soekarno, Indonesia mampu menempatkan diri sebagai kekuatan baru yang sangat diperhitungkan di panggung internasional. Dalam perspektif studi hubungan internasional, apa yang menjadi kepentingan domestik Indonesia pada masa itu (kebutuhan pengakuan akan kedaulatan, dukungan dari negara lain, eksistensi dalam forum regional dan internasional) berhasil terartikulasi dengan baik di panggung internasional. Ada *linkage* yang baik antara *input* domestik dan kebutuhan luar negeri sehingga menghasilkan produk yang baik dalam bentuk pencapaian kepentingan nasional. Indonesia mampu menghindari kondisi yang terjadi di Vietnam, Korea, dan Jerman, yaitu ketika ketiga negara tersebut terpecah menjadi dua kutub sesuai kepentingan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Indonesia juga tidak menjadi negara boneka yang menjadi basis pangkalan militer kedua negara. Indonesia mampu mengonsolidasikan fragmentasi di dalam negeri menjadi negara solid yang giat membangun dengan meminimalisir ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari lingkungan internasional pada masa itu. Jikalau salah pilih kebijakan, Indonesia tidak hanya menjadi negara boneka saja, tapi juga terancam

menjadi negara gagal karena tidak mampu membendung banyaknya upaya separatisme dengan pihak-pihak yang anti kemerdekaan (RMS, Permesta, PRRI, PKI).

Efektivitas Politik Luar Negeri dan Upaya Mendudukkan Faktor Idiosinkratik secara Proporsional

Kebijakan luar negeri sebagai produk politik luar negeri bukanlah sebuah proses yang sederhana. Seperti lazimnya proses penyusunan kebijakan, produk yang dikeluarkan melalui serangkaian tahapan, yakni munculnya sebuah permasalahan, identifikasi permasalahan, pendefinisian per-masalahan, pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, masuk ke kotak pengolahan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, hingga menghasilkan keluaran dalam bentuk kebijakan luar negeri.

Tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan luar negeri adalah mencapai apa yang menjadi tujuan nasional. Dalam kasus yang spesifik, tujuan nasional tersebut diterjemahkan sebagai kepentingan nasional. Baik tujuan nasional maupun kepentingan nasional berada pada level analisis negara. Berbicara mengenai negara, tentu memiliki sangkut paut yang erat dengan apa yang diinginkan oleh rakyat dari negara tersebut.

Dalam proses formulasi politik luar negeri, faktor idiosinkratik seorang pemimpin memiliki peranan, namun tidak berdiri tunggal. Faktor idiosinkratik atau persepsi elit bisa saja menjadi faktor dominan, namun tidak bisa menegasikan faktor lainnya. Kondisi ketika faktor idiosinkratik menjadi determinan utama formulasi kebijakan dan mampu menihilkan faktor lain bisa dianggap sebagai kondisi ketika negara berada dalam otoritarianisme (penguasa despotik). Bisa juga sistem politik dan pemerintahan negara tersebut melazimkan hal demikian, seperti halnya negara-negara monarki absolut (kondisi ini tidak lazim di era globalisasi yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi).

Pelibatan faktor idiosinraktik dalam formulasi kebijakan luar negeri tidak *an sich* selalu berdampak positif bagi negara. Dalam sudut pandang studi hubungan internasional, khususnya pandangan kaum realis, manusia cenderung rentan akan kesalahan. Manusia cenderung memiliki sifat untuk mendominasi satu sama lain (*animus dominandi*). Ini juga yang menjadi argumentasi kaum realis dalam menjelaskan mengapa Perang Dunia I dan II bisa meletus, yakni ketamakan dan kerakusan para pemimpin negara. itu juga yang menjadi landasan kaum realis dalam memandang munculnya tira-tiran seperti Adolf Hitler di Jerman (1933), Benito Mussolini di Italia (1922) melalui Nazisme dan Fasisme yang mengagung-agungkan nasionalisme sempit.

Meskipun berisiko, formulasi kebijakan luar negeri negara tidak pernah terlepas dari faktor idiosinkratik pemimpinnya. Eksistensi faktor idiosinkratik juga terbukti memainkan peranan besar dalam pencapaian kepentingan nasional suatu negara. Studi kasus yang dipaparkan sebelumnya yakni Ahmadinejad di Iran dan Soekarno di Indonesia bisa menjadi pembelajaran. Untuk kasus Ahmadinejad di Iran, idiosinkratik Ahamadinejadlah yang mampu membawa Iran memasuki lompatan besar dalam pengelolaan negara, dari semula berbasis transportasi darat, laut, dan udara, menjadi negara yang sangat paham dan fokus akan kelebihan sumber kekayaan alam yang dimilikinya. Iran yang selama ini dikenal dengan penguasaan minyak bumi dan gas alam yang melimpah di Jazirah Arab, semakin dikenal dengan pengelolaan energi nuklir berbasis uranium.

Ancaman muncul ketika penguasaan

energi nuklir tersebut menjadi dilema keamanan bagi negara-negara tetangga, seperti Israel yang juga memiliki nuklir. Negara-negara dengan haluan yang berbeda dengan Iran, seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain, dan Yordania juga menganggap Iran sebagai ancaman keamanan. Belum lagi ditambah dengan dukungan Amerika Serikat terhadap negara-negara yang menjadi musuh Iran. Di tengah tekanan dari kanan kiri, depan belakang seperti ini, karakteristik Ahamadinejad yang ditempa sebagai pengawal Revolusi Islam Iran menjadikannya sebagai figur tangguh yang berani berbicara lantang di forum internasional menghadapi mereka yang menjadi penghalang kepentingan nasional Iran. Dengan lugas dan tangkas Ahmadinejad menjelaskan di forum internasional bahwa tuduhan Amerika Serikat bahwa Iran menggunakan nuklir sebagai senjata adalah hipokrisi negara adidaya tersebut. Jika Iran dilarang mengembangkan nuklir, mengapa Amerika Serikat hanya berdiam diri menyaksikan Israel mengembangkan senjata nuklir?

Dalam kasus Ahmadinejad di Iran ini, vokalitas dan lantangnya suara Ahamadinejad di forum internasional menjadi nilai plus bagi diplomasi Iran. Secara tidak langsung, Ahamadinejad berkontribusi dalam revitalisasi sistem internasional yang selama ini dimonopoli oleh kepentingan unilateral negara-negara besar. Dukungan mengalir deras, tidak hanya dari rakyat Iran, tapi juga negara-negara yang dirugikan perekonomiannya oleh sistem internasional yang kapitalistik. Hugho Chavez, pemimpin Venezuela, secara terang-terangan mendukung Ahmadinejad. Kondisi ini bisa dibaca sebagai kebijakan luar negeri yang tidak hanya ditentukan oleh faktor tunggal idiosinkratik saja, tapi juga koinsiden dengan sumber domestik (kepentingan rakyat, dukungan parlemen) dan sumber internasional (opini masyarakat internasional, persepsi negara sahabat).

Dominannya faktor idiosinkratik Ahamadinejad dalam formulasi kebijakan luar negeri Iran tidak selamanya seratus persen memberikan efek positif kepada Iran. Pengembangan energi nuklir dan vokalitas Ahmadinejad di forum internasional harus diganjar dengan sanksi ekonomi yang sedikit banyak berpengaruh terhadap instabilitas politik dan ekonomi di Iran (sebuah kondisi yang akhirnya diperbaiki oleh suksesor Ahmadinejad, Hassan Rouhani).

Seperti halnya Ahmadinejad di Iran, faktor idiosinkratik Soekarno juga sangat mewarnai kebijakan luar negeri Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Soekarno mampu menerjemahkan dengan baik konsepsi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, memetakan dengan seksama kondisi lingkungan strategik Indonesia pada masa Perang Dingin, menggalang dukungan segenap elemen bangsa Indonesia, baik masyarakat awam, kelompok kepentingan, hingga partai politik dalam penentuan kebijakan luar negeri Indonesia. Secara garis besar, apa yang ditempuh Indonesia melalui pembentukan Gerakan Non Blok pada tahun 1954, Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955, serta konsep *Nefo versus Oldefo* mampu mencapai kepentingan nasional pada masa itu, yakni pengakuan kedaulatan dari negara lain, kontribusi pada upaya mewujudkan perdamaian dunia dengan menentang kolonialisme dan imperialisme, serta menempatkan Indonesia sebagai negara netral pada masa Perang Dingin.

Pembelajaran penting dari kebijakan luar negeri Indonesia pada masa itu adalah kejelian seorang pemimpin dalam melihat peta politik internasional serta kebijakan apa yang harus diambil dan kesesuaian dengan pokok masalahnya. Seandainya kebijakan Indonesia pada masa itu yang cenderung konfrontatif (*Nefo versus*

Oldefo) diterapkan dewasa ini, tentu tidak akan relevan menilik perubahan pemahaman akan tantangan keamanan dan makin masifnya kemunculan aktor-aktor hubungan internasional. Seandainya kebijakan non blok diterapkan saat ini, juga tidak relevan karena konteks konflik yang terjadi antar negara tidak lagi bersifat simetris, tapi asimetris. Seperti halnya kasus Ahmadinejad di Iran, kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Soekarno juga memiliki kekurangan. Dominannya faktor idiosinkratik Soekarno pada masa itu mengakibatkan kurang dijalankannya *multi - tracks diplomacy*. Kentalnya substansi *high politics* (ancaman hankam dan instabilitas politik) juga mengakibatkan diabaikannya diplomasi ekonomi yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh negara - bangsa yang baru merdeka seperti Indonesia. Kondisi inilah yang menyebabkan pada masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia mengalami inflasi yang tinggi.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri merupakan kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai kepentingan tertentu, lazimnya disebut sebagai kepentingan nasional. Tujuan dari dilaksanakannya politik luar negeri adalah untuk mencapai kepentingan nasional, yakni di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Formulasi politik luar negeri suatu negara melibatkan banyak sumber, lazim disebut sebagai sumber domestik dan sumber eksternal. Sumber domestik meliputi pandangan dari masyarakat, artikulasi dan agregasi kepentingan dari kelompok penekan dan kelompok kepentingan, partai politik, legislatif, struktur pada eksekutif pemerintahan, oposisi, hingga faktor idiosinkratik atau persepsi elit. Sedangkan faktor eksternal meliputi dinamika kawasan, pola-pola hubungan dengan negara sahabat, keterlibatan dalam berbagai organisasi dan rezim internasional, serta opini dari masyarakat internasional (hal ini dimungkinkan karena dunia sudah memasuki era globalisasi yang didukung oleh kemajuan di bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi).

Faktor idiosinkratik atau persepsi elit menjadi bahan kajian dalam studi hubungan internasional sebagai faktor yang sangat berpengaruh dalam formulasi kebijakan luar negeri suatu negara merujuk pada kemunculan banyak pemimpin negara yang sangat menentukan corak dan warna politik luar negeri negaranya. Faktor idiosinkratik dikenal juga dengan istilah persepsi elit. Didefinisikan sebagai hal-hal yang melekat pada seseorang (pemimpin) sehingga mempengaruhi pola pikir, persepsi, dan cara pandang dalam melihat suatu permasalahan serta pengambilan keputusan. Ada beberapa komponen yang dapat dikategorikan sebagai faktor idiosinkratik yakni, latar belakang keluarga (status sosial dan ekonomi keluarga), latar belakang pendidikan, pengalaman hidup, afiliasi elit, serta produksi pengetahuan.

Dalam proses formulasi politik luar negeri, faktor idiosinkratik seorang pemimpin memiliki peranan, namun tidak berdiri tunggal. Faktor idiosinkratik atau persepsi elit bisa saja menjadi faktor dominan, namun tidak bisa menegasikan faktor lainnya. Pelibatan faktor idiosinraktik dalam formulasi kebijakan luar negeri tidak *an sich* selalu berdampak positif bagi negara. Dalam sudut pandang studi hubungan internasional, khususnya pandangan kaum realis, manusia cenderung rentan akan kesalahan. Meskipun berisiko, formulasi kebijakan luar negeri negara tidak pernah terlepas dari faktor idiosinkratik pemimpinnya. Eksistensi faktor idiosinkratik

juga terbukti memainkan peranan besar dalam pencapaian kepentingan nasional suatu negara.

Saran yang diberikan terdiri dari saran praktik dan saran akademik.

1. **Saran praktik**: Formulasi politik luar negeri dan kebijakan luar negeri suatu negara kerap dipengaruhi oleh persepsi elit, dalam hal ini idiosinkratik kepala negara, baik dari skala kecil sampai pada skala dominan. Pelibatan (terlibatnya) faktor idiosinkratik dalam formulasi tersebut bisa berdampak positif dan negatif. Studi kasus Ahmadinejad dan Soekarno sebagai kepala negara bisa menjadi pembelajaran. Untuk meminimasi dampak negatif tersebut, formulasi politik luar negeri tidak seyogyanya didominasi oleh satu faktor, tapi juga didukung oleh faktor lain. Hal ini bertujuan agar politik luar negeri yang ditempuh mencerminkan kepentingan nasional segenap elemen bangsa dan negara. Kombinasi dengan faktor lain juga bisa memberikan manfaat dalam hal *check and balances*.
2. **Saran akademik**: Kajian idiosinkratik dalam studi hubungan internasional bukanlah kajian baru, namun tidak juga bisa disebut sebagai kajian yang lama. Permasalahannya terletak pada sedikitnya penelitian mengenai topik ini dan kurang banyak sampel yang digunakan. Diharapkan penelitian ini akan diteruskan dengan mengambil sampel yang lebih banyak dan tolok ukur yang lebih komprehensif semisal pembagian kajian idiosinkratik kepala negara berdasarkan kawasan, klasifikasi negara, sistem politik, dan sistem pemerintahan. Penulis meyakini bahwa ada perbedaan yang signifikan dari aplikasi faktor idiosinkratik dalam formulasi politik luar negeri suatu negara di negara yang bersifat demokratis dan negara yang tidak demokratis.

Daftar Pustaka

Hanrieder, Wolfram F. 1971. *Comparative Foreign Policy: Theoritical Essays*. New York: David McKayCo.

Holsti, K.J. 1992. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta.

Lentner, Howard. 1974. *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*. Ohio: Bill and Howell Co.

Plano, Jack C. dan Ray Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin.

Rosenau, James N., Gavyn Boyd, dan Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.

---

1 Oleh Boy Anugerah, S.I.P., M.Si. Analis Kerja Sama Luar Negeri Bag Kerma Internasional Rokerma Settama Lemhannas RI, Alumnus Program Magister Kajian Ketahanan Nasional Bidang Kepemimpinan Universitas Indonesia (2012), Alumnus Program Sarjana Hubungan Internasional Studi Politik dan Keamanan Global Universitas Padjadjaran (2009), Anggota DPP Persatuan Alumni GMNI, Departemen Hankam dan Polugri (2015).

i.ytimg.com

Rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika
(Pendekatan Kewaspadaan Nasional)

Putu Sastra Wingarta
Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI Jakarta
sastrawing@yahoo.co.id

Abstrak

Fenomena dunia terus menunjukkan kecenderungan bara disintegrasi yang membakar negara-negara di berbagai belahan dunia. Terlebih di negara-negara kawasan Timur - Tengah yang sampai dengan saat ini masih terus berlangsung, seperti yang terjadi di Yaman maupun Suriah; selain Mesir, Libya dan Irak yang meninggalkan keporak-porandaan negara masing-masing. Walau fenomena disintegrasi yang ditunjukkan dunia dimotivasi oleh demokratisasi, namun seperti yang dikatakan Samuel Huntington, kondisi itu tidak terlepas dari bentuk nyata dari perang antar peradaban atau Global Paradox-nya John Naisbit. Tulisan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya melakukan rejuvenasi atau peremajaan kembali pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika seperti yang dikehendaki awal oleh para pendiri bangsa Indonesia. Penting untuk mengembalikan pemahaman itu berkaitan dengan kondisi nyata bangsa Indonesia yang plural atau majemuk yang sangat rentan dari konflik sehingga memberi pengaruh negatif terhadap kualitas Ketahanan Nasional. Konflik sosial antar komponen bangsa yang masih saja mendera Indonesia di berbagai daerah, memberi peringatan akan pentingnya melakukan rejuvenasi sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang telah diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Kewaspadaan Nasional adalah konsepsi nasional yang dapat digunakan untuk melakukan rejuvenasi itu, karena kewaspadaan nasional sangat menekankan pentingnya nasionalisme dalam menghadapi ancaman, terlebih-lebih ancaman disintegrasi social maupun nasional

Kata Kunci: Rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika; Ketahanan Nasional; Kewaspadaan Nasional

PENDAHULUAN

Proses globalisasi yang begitu cepat merupakan tantangan dan berpengaruh secara signifikan terhadap semua manusia di berbagai negara termasuk bangsa Indonesia. Ulrich Beck (1998) mengungkapkan bahwa globalisasi akan berpengaruh terhadap relasi-relasi antar negara dan bangsa di dunia, yang akan mengalami '*deteritorialisasi*'. Konsekuensinya, kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia ini akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain. Sementara itu, Anthony Giddens (2000) menamai proses globalisasi sebagai '*the runaway world*'. Menurutnya perubahan-perubahan di berbagai bidang terutama perubahan sosial di suatu negara akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain.

Dalam kondisi seperti ini terjadilah pergeseran dalam kehidupan kebangsaan (Rosenau, 1990), yaitu pergeseran negara yang berpusat pada negara kebangsaan, kepada dunia yang berpusat majemuk (Hall, 1990). Kiranya sinyalemen yang layak kita perhatikan adalah pandangan Kenichi Ohmae (1995) bahwa globalisasi akan membawa kehancuran negara-negara kebangsaan. Pengaruh globalisasi yang sangat cepat ini sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. [1] Begitu juga seperti yang dikatakan John Naisbitt (1994) bahwa ; "Ketika dunia menjadi lebih terintegrasi secara ekonomi, entitas politik dan bisnis yang terdiri dari itu menjadi lebih kecil dan lebih banyak". Pengemudinya adalah revolusi telekomunikasi.

Setelah sekian lama pendapat para pakar itu dikemukaan, dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2016 ini, hampir semua pendapat itu menunjukkan kebenarannya. Terlebih apa yang dikemukakan oleh Naisbitt dalam *Global Paradoks*-nya yang semakin menunjukkan kebenaran dunia yang semakin mengalami disintegrasi social maupun nasional. Entitas politik yang disebut negara pada beberapa belahan dunia semakin porak poranda. Lihat saja yang terjadi di belahan tanduk Afrika, Timur Tengah dan belahan dunia lainnya dengan perkembangan konfliknya yang tidak berkesudahan. Kondisi semacam itu jelas menjadi warna dunia pasca perang dingin yang sebelumnya diharapkan akan menciptakan perdamaian, namun justru sebaliknya yang ditemukan. Kebangkitan dunia Arab atau *Arab Spring* yang secara harafiah kadang disebut sebagai pemberontakan Arab yang dimulai dari Tunisia tahun 2010, merambat ke Mesir yang menjatuhkan Hosni Mubarak, perang saudara di Libya, sampai dengan perang saudara di Suriah pada bulan Maret 2011 yang sampai dengan saat ini 2016 belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Alih-alih berakhir, justru kehancuran yang lebih besar siap menunggu Suriah berikut semakin terseretnya negara-negara besar terlibat secara *head to hea*d. Keadaan tersebut diperparah ketika ISIS turut terlibat dalam kancah perang, yang semakin menjadikan konflik bertambah kompleks.

Berkaitan dengan fenomena disintegrasi seperti diuraikan diatas, memunculkan pertanyaan kritis bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Sabang sampai Merauke. Dapatkah Bangsa Indonesia dalam wadah NKRI mempertahankan kesepakatannya - mempertahankan persatuan dan kesatuannya - mempertahankan integrasi nasionalnya. Pertanyaan lainnya; bagaimana Bangsa Indonesia harus menjalankan kehidupan nasionalnya dalam menuju cita-cita dan tujuan nasionalnya. Adalah wajar pertanyaan itu muncul, karena menurut teori organik, bangsa dan negara adalah kehidupan - setiap mahluk hidup akan mempertanyakan kelangsungan hidupnya. Oleh karenanya jaminan kelangsungan

hidup akan selalu menjadi pertanyaan – akan menjadi sesuatu yang sangat vital (*core value*) yang setiap saat perlu dan harus diwaspadai. Kewaspadaan adalah sikap yang berkaitan dengan jaminan kelangsungan hidup (*survival)*. Oleh karena itu juga, kewaspadaan nasional menjadi sebuah konsekuensi dari sebuah kelahiran bangsa Indonesia dalam wadah NKRI.

Terkait dengan pertanyaan kesanggupan mempertahankan kesepakatan menjaga persatuan, mempertahankan kelangsungan hidup dalam integrasi nasional NKRI, berikut cara-cara dalam menjalankan kehidupan nasional; akan sangat tergantung dari potensi ancaman yang dihadapi bangsa, terlebih dalam alam globalisasi. Di samping itu, kualitas dalam menjalankan konsepsi kewaspadaan nasional akan sangat berpengaruh terhadap jalannya kehidupan nasional, karena kewaspadaan nasional adalah sikap, kualitas kesiapan dan kesiagaan dalam menghadapi ancaman, baik ancaman yang berasal dari luar negeri maupun ancaman yang berasal dari dalam negeri atau dari dalam tubuhnya sendiri. Masyarakat global saat ini adalah masyarakat yg dihadapkan pada pluralitas kebudayaan yg saling mempengaruhi -- keliru mengelola dan kurang waspada –konflik yang tidak terkendali akan terus dihadapi – yang menurut Samuel.P Hatington -- perang antar peradaban (*the clash of civilization*) menuju masyarakat modern berdasar warisan agama, bahasa, sejarah,dan tradisi. Fenomena itu terus mewarnai kehidupan nasional Indonesia, dan memberi pengaruh terhadap kualitas ketahanan nasional Indonesia.

Sejak reformasi bergulir tahun 1998 hingga saat ini, sudah berlangsung selama dua windu, dalam penggal-penggal waktu tertentu masih saja menyisakan berbagai permasalahan nasional yang mengandung ancaman potensial maupun manifes terhadap jaminan kelangsungan kehidupan nasional. Walau di sana-sini kehidupan nasional mengalami kemajuan di berbagai aspek kehidupan, namun dalam waktu yang bersamaan juga, terjadi fenomena konflik dan kekerasan diberbagai pelosok Indonesia. Euforia reformasi saat itu mengundang berbagai permasalahan baru bangsa dan negara, yang muaranya bisa mengancam disintegrasi nasional. Kondisi seperti ini masih terasa hingga kini, semata-mata karena euforia itu telah meminggirkan nilai-nilai kebangsaan seperti nilai-nilai dalam sesanti *bhinneka tunggal ika*. Akibatnya tidak hanya sekedar mengundang berbagai kebisingan dan kegaduhan demokrasi, namun berbagai konflik komunal, konflik sosial, anarkisme, radikalisme, dan fundamentalisme terus melanda kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai daerah. Praktik *kebhinnekaan* tidak seharusnya diartikan praktik keberagaman atau praktik berbeda, yang asal beda dengan mengartikan *kebhinnekaan* atau keberagaman itu sebagai kata yang terpisah dari kontruksi aslinya " *bhinneka tunggal ika, tan hana dharma mangrva*". Praktik yang demikian berpotensi atau secara nyata selama ini berkontribusi melemahkan ketahanan nasional. Kondisi seperti ini memerlukan suatu konsep yang memadai atau paling tidak perlu diwaspadai, agar keberagaman atau *kebhinnekaan* yang dimiliki Indonesia bukannya menjadi beban, namun sebaliknya justru menjadi motor dan basis pengembangan ketahanan nasional itu. Oleh karena itu, untuk menghindari dan terlepas dari ancaman yang lebih serius dalam kaitannya dengan disintegrasi sosial maupun nasional, maka dirasa perlu untuk segera melakukan rejuvenasi *bhinneka tunggal ika* guna meningkatkan ketahanan nasional.

PEMBAHASAN

Kewaspadaan Nasional Terhadap Fenomena Paradoks Global Dari Lingkungan Strategis

"Ketika dunia menjadi lebih terintegrasi secara ekonomi, entitas politik dan bisnis yang terdiri dari itu menjadi lebih kecil dan lebih banyak" (John Naisbitt, 1994). Dengan kata lain, apa yang dikatakan Naisbit dalam Global Paradoks, adalah dunia yang menuntut semakin terintegrasi ternyata dalam waktu yang bersamaan juga menuntut disintegrasi. Fenomena ini sama dengan fenomena dimana universalisme dan tribalisme bergerak secara bersamaan secara paradoks. Fenomena paradoksial global yang digambarkan John Naisbit, sesaat setelah berakhirnya Perang Dingin, adalah fenomena yang terus menunjukkan bukti-bukti nyatanya dalam perkembangan lingkungan strategis global sampai dengan sekarang ini.

Pada gilirannya," Globalisasi melahirkan pemahaman baru menyangkut keamanan *(security)*. Istilah *"comphrehensive security"* muncul seiring dengan berakhirnya Perang Dingin sekitar tahun 1988, yang berseberangan dengan harapan masyarakat dunia yang mengharapkan dengan optimisme munculnya perdamaian internal dan antar negara, berkurangnya kekerasan dan tegaknya ketertiban dunia di bawah kendali PBB. Namun yang terjadi pada tahun 1990-an justru menimbulkan pertanyaan, karena yang muncul adalah kekerasan yang dilakukan oleh *"non state actors"* seperti perang saudara, genosida, konflik berdasar identitas, terorisme yang dipacu oleh frustasi akibat perasaan-perasan kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, *"xenophobia"*, ketidakamanan akibat globalisasi, separasi politik, tuntutan solidaritas agama, yang dimanipulasi oleh kaum ekstremis, fanatik, fundamentalis dan kelompok radikalis".(Muladi,2006)

Era globalisasi yang menghendaki berbagai aspek kehidupan lebih terintegrasi, ternyata dalam praktiknya pada saat yang bersamaan juga menghendaki adanya fragmentasi. Fenomena ini juga mewarnai kehidupan nasional Indonesia. Fenomena disintegrasi sosial maupun nasional di beberapa belahan dunia sedang marak di demonstrasikan. Kawasan tanduk Afrika sedang mengalami hal itu dengan 'Arab Spring' yang melanda Mesir, Libya, Somalia, Kenya, dan Ethiopia. Begitu juga dengan negara-negara di Timur Tengah seperti Irak, Suriah, dan negara-negara di sekitarnya, termasuk Israel dan Palestina yang tidak pernah berkesudahan.

Sejak reformasi bergulir dalam kehidupan nasional Indonesia, yang sudah berlangsung selama dua windu pada tahun 2016 ini, dalam penggal-penggal waktu tertentu masih saja menyisakan berbagai permasalahan nasional yang mengandung ancaman potensial maupun nyata terhadap jaminan keberlangsungan kehidupan nasional. Konflik sosial yang terjadi diantara komponen bangsa adalah konflik sosial yang sudah memasuki tahap destruktif. Sebut saja konflik social atau kasus Mesuji tahun 2011 di Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Selain itu, kerusuhan sosial yang berakhir dengan pembakaran Kantor Bupati Bima NTB, tanggal 27 Januari 2012, kerusuhan social antar warga di dua desa bertetangga di Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (11/2/2012), konflik sosial antar warga di Desa Pelauw, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (10/2/2012), konflik sosial atau kasus Cikesik Bekasi, konflik sosial atau kasus Sidomulyo (Lampung), konflik sosial Barisan Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Tengah yang menyuarakan aspirasi mereka melalui dewan adat Dayak daerah Kalteng, di dalam menolak rencana pembentukan Front Pembela Islam (FPI) di provinsi ini, konflik sosial warga Ahmadiyah di Sampang

Madura, konflik sosial di Sumbawa Besar Sumbawa NTB (22/01/2013), konflik sosial di Pangukan Sleman DIY bulan Juni 2014 lalu, konflik sosial di Kabupaten Tolikara Papua pada 17 Juli 2015, pembakaran gereja di Aceh Singkil tanggal 13 Oktober 2015, dan lagi-lagi konflik sosial pada bulan Maret 2016 di Lampung Selatan yang melibatkan antar suku. Semua konflik sosial itu sudah memasuki tahap destruktif yang membawa korban harta benda dan nyawa, yang perlu disikapi dengan konsep kewaspadaan nasional.

Secara substansi, pengertian Kewaspadaan Nasional atau Padnas adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu ancaman. Padnas juga sebagai suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Padnas dapat juga diartikan sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa/NKRI. Oleh karena itu, Padnas harus bertolak dari keyakinan ideoligis dan nasionalisme yang kukuh serta perlu didukung oleh usaha-usaha pemantauan sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri.[2]

Konflik sosial yang disebutkan di atas, sejatinya baru sebagian kecil dari konflik social lainnya yang melanda berbagai wilayah Indonesia. Belum lagi konflik sosial yang pernah dialami oleh transmigran asal Jawa yang diusir oleh penduduk asli Aceh Jaya di Aceh, masyarakat dari etnis Madura yang diusir oleh penduduk asli Sambas, Sampit Kalimantan, serta masyaraakat keturunan Bugis, Buton dan Makasar yang diusir penduduk asli Ambon di Maluku, di awal-awal lahirnya reformasi, dengan korban harta benda dan nyawa yang tidak sedikit. Indonesia mengalami disharmoni sosial yang serius dalam keyakinan sesanti atau semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*nya, yang memberi pengaruh signifikan terhadap melemahnya ketahanan nasional.

Bhinneka Tunggal Ika Dalam Praktek Kehidupan Nasional

Dikatakan dalam pasal 36 A UUD NRI tahun 1945, bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Secara substansi, sesanti (kata-kata bijak) atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sesanti yang mengingatkan untuk menjaga persatuan. Lengkapnya sesanti ini berbunyi; *Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrva*, yang artinya berbeda-beda atau beragam, namun tetap satu, karena tidak ada kebenaran yang mendua. Bhinneka yang berasal dari kata *bhina* (berbeda/beragam) dan *ika* (itu) yang artinya beragam itu, sejatinya tunggal (satu) ika (itu). *Tan Hana Dharma Mangrva* berarti tidak ada kebenaran yang mendua. Dalam hal ini, dharma diartikan sebagai kebenaran. Pada awalnya, dharma yang dimaksud adalah Tuhan. Dengan demikian, arti *Tan Hana Dharma Mangrva* adalah tidak ada Tuhan yang mendua. Penekanan ini disampaikan oleh Mpu Tantular dalam *kekawin* Sutasomanya di zaman Majapahit abad 14 (sekitar tahun 1365-1389 M), yang ketika itu masih mempermasalahkan perbedaan antara agama Budha dan Hindu (Siwa). Penekanan itu begitu penting pada jamannya, untuk menghindari terjadinya konflik. Di dalam *kekawin* Sutasomanya Mpu Tantular secara lengkap menyinggung *Bhinneka Tunggal Ika*, yang secara lengkap

menurut kutipan yang berasal dari pupuh 139, bait 5, sebagai berikut; [3]

Gambar 2: Bhinneka Tunggal Ika

Jawa Kuna	Alih bahasa
Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,	Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,	Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,	Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.	Berbeda-beda tetapi tetap satu,, tidak ada kebenaran yang mendua

Presiden pertama Indonesia Soekarno, dalam ceramahnya tanggal 20 Mei 1965, saat pertama kali meresmikan Lemhannas RI, sangat menekankan arti penting dari sesanti *Bhinneka Tunggal Ika*. Bung Karno saat itu menyampaikan kepada seluruh peserta didik Lemhannas RI angkatan pertama, bahwa dipilihnya kata-kata *Bhinneka Tunggal Ika* dalam pita lambang Negara Pancasila semata-mata, karena kata-kata itu sangat bermakna dalam menjaga persatuan Indonesia.[1] Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dengan multi etnisnya, agamanya, rasnya, golongannya dan sebagainya adalah keberagaman yang sejatinya berada dalam satu bangsa dan Negara Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila yang dijadikan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Sesanti Bhinneka Tunggal Ika sejatinya adalah "batu bangun" dari visi Wawasan Nusantara yang menjadi geopolitik bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara atau biasa disingkat Wasantara adalah **konsep-konsep pemikiran dan pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional**. Konsep-konsep dasar itu dirumuskan dengan menggunakan 6 (enam) 'batu bangun' atau *building block* Wawasan Nusantara, yang konsep-konsep dasarnya diangkat dari khazanah bangsa yang berada di wilayah Nusantara mulai Abad VII, yang diintegrasikan dengan kepentingan bangsa Indonesia, saat ini dan yang akan datang. Konsep-konsep dasar yang saling jalin menjalin dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya itu meliputi;

1. Bhinneka tunggal ika adalah konsep untuk rnengintegrasikan keaneka ragaman komponen bangsa;
2. Persatuan dan kesatuan adalah konsep untuk mengakumulasi kekuatan nasional;
3. Kebangsaan adalah konsep untuk mewujudkan keinginan untuk hidup bersama;
4. Geopolitik adalah konsep untuk mewujudkan kedaulatan bangsa atas tanah airnya;
5. Negara kebangsaan adalah konsep untuk menjadikan negara sebagai

sarana perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa;

6. Negara kepulauan adalah konsep untuk mempertahankan keutuhan wilayah nasional.

Lahirnya Wawasan Nusantara tidak bisa lepas dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada pada zaman kerajaan Majapahit dulu, yang diucapkan pada saat pelantikannya menjadi Patih Amangkubhumi Majapahit tahun 1258 Saka atau tahun 1336 M. Begitu terkenal sumpah itu, karena visinya yang agung untuk menyatukan Nusantara yang menjadi wilayah Indonesia saat ini. Patih Gajah Mada bersumpah untuk tidak melepas puasanya *(amukti palapa*) atau menyerah, apabila seluruh Nusantara yang menjadi wilayah Indonesia dari Sabang sampai Meraoke saat ini tidak menjadi satu wilayah Negara Majapahit. Keagungan visi Patih Gajah Mada akan persatuan dan kesatuan Nusantara direspon oleh pemerintah Indonesia semasa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dengan mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara dilanjutkan dengan penetapan oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara.

Berbasis geopolitik Wawasan Nusantara, Indonesia menjalankan geostrateginya yang tidak lain adalah konsepsi ketahanan nasional pada tataran pelaksanaan atau pengembangan ketahanan nasional secara substansial.

Pemahaman Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional sering dipahami sempit sebagai pertahanan nasional. Padahal, pertahanan nasional bagian dari ketahanan nasional. Terdapat delapan *gatra* dalam ketahanan nasional, yang salah satunya adalah *gatra* pertahanan yang juga mencakup keamanan. Lemhannas atau lembaga ketahanan nasional, pada awal didirikan atau diresmikan tahun 1965, juga menyebut dirinya Lembaga Pertahanan Nasional *(defence*), namun sejak tahun 1994 berdasar Keppres RI No 4 tahun 1994, berubah menjadi Lembaga Ketahanan Nasional (*National Resilience Institute). Hal ini sejalan dengan isi pidato Presiden Pertama RI Soekarno pada saat peresmian Lemhannas RI tanggal 20 Mei 1965, yang mengingatkan bahwa: "perang modern bukan sekedar perang militer ,melainkan peperangan yang menyangkut seluruh unsur yang dimiliki rakyat. Dengan demikian tidak hanya militer yang memperhatikan dan menyempurnakan ketahanan nasional, tetapi juga orang sipil".*

Peringatan ini sangat visioner, karena terbukti bahwa saat ini maupun ke depan, perang modern yang dihadapi oleh Indonesia maupun dunia adalah perang yang melibatkan seluruh aspek kehidupan, nir militer, komprehensif dan asimetrik. Selain itu, hal yang juga perlu dicatat bahwa, Presiden Soekarno sangat menekankan arti nasional (yang melekat dalam ketahanan nasional) sebagai yang tidak sekedar berarti seluruh bangsa, tanah air (wilayah), tetapi juga betul-betul atas konstelasi dan karakteristik dari bangsa Indonesia. Nasional yang berarti berjati diri Indonesia, dengan budaya yang dimilikinya.

Secara substansi, pengertian Ketahanan Nasional adalah pengertian yang berkaitan dengan Ketahanan Nasional sebagai kondisi serta pengertian Ketahanan Nasional sebagai konsepsi. Sebagai kondisi, Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam,

untuk menjamin identitas, integritas, keberlangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.

Dalam pengertian di atas, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini terus-menerus dan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa suatu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi tersebut dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia.

Sebagai konsepsi, Ketahanan Nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besar kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah, dan jasmaniah. Sementara itu, keamanan adalah kemampuan bangsa dalam melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar dan dari dalam.

Ketahanan nasional meliputi segenap bidang kehidupan yang dipetakan menjadi delapan *gatra*, yaitu: geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam sebagai *gatra* alamiah (*natural determinants*) serta ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan sebagai *gatra* sosial (*social determinants*). Dilihat dari perannya, ketahanan nasional dapat diposisikan sebagai sebuah konsepsi dan kondisi. Sebagai sebuah konsepsi, ketahanan nasional adalah **gambaran menyeluruh dan terintegrasi dari komponen-komponen sistem nasional** yang digerakkan menuju pencapaian tujuan nasional. Sebagai sebuah kondisi, ketahanan nasional adalah **tolok ukur keberhasilan** pengelolaan sistem nasional dalam mensinergikan seluruh kekuatan dan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Hasil Pengukuran Laboratorium Ketahanan Nasional

Sejak tahun 2010, Lemhannas RI telah melakukan pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik. Pengembangan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik diawali dengan perumusan model pengukuran ketahanan nasional. Model ini secara hirarkis berbasis pada 8 *gatra* yang masing-masing dijabarkan ke dalam aspek, variabel, dan indikator. Selanjutnya, pada setiap indikator dirumuskan parameter, instrumen pengukuran serta formula untuk memperoleh indeks ketahanan dari indikator tersebut. Indeks ketahanan dikategorikan berdasarkan skala *likert* mulai dari rawan (skor 1) , kurang tangguh (skor 2), cukup tangguh (skor 3), tangguh (skor 4), dan sangat tangguh (skor 5). Setiap indikator diberi bobot yang besarannya ditentukan berdasarkan kombinasi antara *judgment* pakar dan skala prioritas. Total bobot

indikator dalam satu variabel berjumlah 100. Total bobot variabel dalam satu *gatra* berjumlah 100. Demikian juga total bobot *gatra* dalam ketahanan nasional berjumlah 100. Jumlah perkalian bobot indikator dengan indeks ketahanan indikator dalam suatu variabel menunjukkan indeks ketahanan variabel tersebut. Demikian seterusnya dengan menggunakan metode yang sama dapat dihitung indeks ketahanan pada setiap *gatra* dan indeks ketahanan nasional.

Hasil pengukuran Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI, berturut-turut sejak tahun 2010, 2011, 2012,2013,2014 dan 2015 secara agregat masih menunjukkan indeks yang tidak menggembirakan karena kurang tangguh. Angka-angka yang tercantum dalam kolom indeks pada tabel di bawah dari masing-masing tahun (2010, 2011, 2012 ,2013,2014 dan 2015) adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat ketangguhan secara agregat seluruh *gatra* secara nasional, maupun tingkat ketangguhan dari masing-masing *gatra*. Angka-angka itu diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan berbagai rumus, sehingga menghasilkan angka hasil konversi yang dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 1: Tingkat Ketangguhan Ketahanan Nasional

Nomor	Tingkat ketangguhan	Warna	Angka
1	Rawan	merah	1,00 s.d. 1,80
2	Kurang Tangguh	Kuning	> 1,80 s.d. 2,60
3	Cukup Tangguh	Hijau	> 2,60 s.d. 3,40
4	Tangguh	Biru	> 3,40 s.d. 4,20
5	Sangat Tangguh	Ungu	> 4,20 s.d. 5,00

Tabel 2: Hasil Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Indonesia

NO	KETERANGAN	INDEKS					
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	AGREGAT	2,43	2,44	2,43	2,47	2,56	2,55
1	GEOGRAFI	2,62	2,74	2,75	2,74	2,45	2,41
2	DEMOGRAFI	2,85	2,83	2,83	2,73	2,87	2,83
3	SKA	2,36	2,35	2,35	2,41	2,56	2,77
4	IDEOLOGI	2,47	2,59	2,58	2,56	2,12	2,23
5	POLITIK	2,88	2,87	2,87	2,84	2,68	2,39
6	EKONOMI	2,85	2,86	2,87	3,04	2,98	2,63
7	SOSIAL DAN BUDAYA	2,39	2,47	2,49	2,43	1,92	2,20
8	HAN KEAMANAN	2,40	2,44	2,42	2,40	2,75	2,82

Dari tabel diatas dapat dibaca bahwa indeks ketahanan nasional Indonesia secara agregat sejak tahun 2010, 2011, 2012 ,2013,2014 dan 2015 masih pada level 'kurang tanggguh'. Hasil pengukuran tahun 2015, walau diantara 8 *gatra* terdapat 4 *gatra* yang cukup tangguh (demografi, SKA, ekonomi, dan hankam), namun 4 *gatra* lainnya (geografi, politik, ideologi, dan sosial budaya masih menunjukkan kurang tangguh, sehingga secara agregat ketahanan nasional Indonesia sampai dengan tahun 2015 masih berada pada indeks 'kurang tangguh'. Kondisi seperti ini dapat dikatakan *in line* dengan kondisi dari praktek *kebhinneka-tunggal-ikaan* dalam aspek-aspek beberapa *gatra*, diantaranya *gatra* politik, ideologi dan sosial budaya, yang memang menunjukkan indeks 'kurang tangguh'. Dengan kata lain, indeks ketahanan nasional Indonesia yang kurang tanggguh tidak lepas dari kontribusi praktek *kebhinneka-tunggal-ikaan* yang masih bermasalah. Terlebih, kekurangtangguhan itu berkorelasi dengan kekurangtangguhan pada *gatra* politik, ideologi, dan sosial budaya, yang sarat dengan variabel dan indikator praktik *kebhinneka-tunggal-ikaan* seperti praktik toleransi, kereligiusan serta indikator praktik *ke bhinneka tunggal ikaan* yang lainnya.

Seperti pada *gatra* ideologi, hasil yang menunjukkan indeks kurang tangguh yang secara berturut-turut sejak tahun 2011, 2012 , 2013, 2014 dan 2015, terus mengalami penurunan, dari nilai agregat 2,59 turun menjadi 2,58, kemudian menjadi 2,56 lalu 2,12, dan tahun 2015 naik sedikit menjadi 2,23 walau tetap 'kurang tangguh'. Variabel yang diukur pada *gatra* ideologi meliputi variabel kesetaraan akses, religiusitas dan toleransi. ketakwaan, kesamaan hak dalam konteks kewajiban sosial, solidaritas sosial, kesatuan wilayah, persatuan bangsa (nasionalisme) dan kekeluargaan, dengan ratusan indikatornya yang memiliki keterkaitan erat dengan *gatra* lain selain *gatra* ideologi, seperti politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan.

Selain *gatra* ideologi yang menunjukkan indeks kurang tangguh, berbagai variabel pada *gatra* sosial budaya dan *gatra* politik juga menunjukkan indeks kurang tangguh. Beberapa variabel dalam *gatra* sosial budaya yang terkait dengan praktik *kebhinneka-tunggal-ikaan*, meliputi kerukunan sosial, ketertiban sosial, perilaku sosial, nilai tradisional, dan universal dan kekeluargaan. Pada *gatra* politik variabel itu meliputi, hubungan pusat-daerah dan antar daerah serta variable kepastian hukum [1]

Hampir sebagian besar dari variabel-variabel *gatra* yang dipaparkan di atas merupakan variabel yang memiliki keterkaitan erat dengan praktik *kebhinneka-tunggal-ikaan*. Korelasinya, semakin baik dan benar praktik *kebhinneka-tunggal-ikaan* itu dijalankan, semakin tangguh indeks yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin tidak baik atau tidak benar praktek *kebhinneka-tunggal-ikaan* itu dilakukan, maka semakin kurang tangguh yang dihasilkan.

Rejuvenasi *Bhinneka Tunggal Ika* Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional

Pada tataran kondisi, meningkatkan ketahanan nasional mengandung pengertian, menjadikan kondisi ketahanan nasional lebih baik dari kondisi sebelumnya sesuai dengan indeks ketahanan nasional. Dari kondisi yang paling bawah rawan, kurang tangguh, cukup tangguh, tangguh sampai dengan yang paling tinggi atau ideal, sangat tangguh. Pada tataran konsepsi, meningkatkan ketahanan nasional mengandung pengertian, mengimplementasikan konsepsi ketahanan nasional itu secara benar. Sebagai sebuah konsepsi, ketahanan nasional adalah gambaran menyeluruh dan terintegrasi dari komponen-komponen

sistem nasional yang digerakkan menuju pencapaian tujuan nasional. Hal itu juga berarti melakukan penyelenggaraan dan pengaturan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berbasis *kebhinneka-tunggal-ikaan*. Hasil dari penyelenggaraan dan pengaturan itu adalah keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi berbagai ancaman yang menerpanya.

Untuk dapat melaksanakan itu, seperti yang dikatakan Muladi (2007), bahwa Ketahanan nasional dimaknai dalam dua pendekatan yang berbeda yakni pendekatan enjiniring dan pendekatan sosial. Pendekatan enjiniring melihat ketahanan nasional sebagai suatu daya/kemampuan untuk cepat kembali ke bentuk dan posisi semula pada saat terjadi tekanan, benturan atau pembengkokan. Pendekatan sosial memandang ketahanan nasional sebagai daya/kemampuan merespon, beradaptasi, dan berinteraksi dengan lingkungan. Berdasarkan itu, mengembangkan ketahanan nasional, perlu berpedoman kepada hasil akhir keuletan dan ketangguhan yang menunjukkan daya atau kemampuan enjiniringnya dan daya atau kemampuan merespon, adaptasi, dan interaksinya dengan lingkungan.

Labkurtannas Lemhannas RI mencatat indeks ketahanan nasional Indonesia tahun 2015 yang menunjukkan tingkat 'kurang tangguh' dengan isu strategis, merosotnya nilai-nilai kebangsaan. Substansinya menyangkut kekurangtangguhan idealisme nasionalisme, yang terkait dengan solidaritas besar sesama anak bangsa yang seharusnya, seperti yang dikatakan Renan (1882), perlunya memiliki keinginan kuat untuk bersatu ("*le desir d'etre ensemble*"). Kuatnya keinginan untuk tetap bersatu, tidak atas dasar persamaan suku, agama, ras, atau golongan, namun semata-mata karena kebersamaan tujuan, seperti yang telah disepakati dalam tujuan nasional sesuai pembukaan UUD NRI 1945. Selain itu, keinginan kuat untuk bersatu akan terbangun dan terpelihara apabila kedaulatan sesama komponen bangsa tidak saling terkooptasi, namun saling menghargai atas kedaulatan ciri dan karakteristik dasar yang dimiliki. Menjadi penting untuk tetap memperoleh kedaulatan ciri dan karakteristik masing-masing, agar upaya memperoleh dan mempertahankan kedaulatan itu tidak berkembang dan justru menghancurkan idealisme nasionalisme itu sendiri. Pencarian kedaulatan itu, sama seperti yang digambarkan Anderson (2008) dalam *imagined communities* atau komunitas-komunitas terbayangnya. Oleh karena itu, sejatinya nilai idealisme dan nasionalisme keindonesiaan adalah nilai dari *sesanti bhinneka tunggal ika*. Ke arah itulah rejuvenasi *bhinneka tunggal ika* itu kita tuju.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, indeks ketahanan nasional Indonesia yang menunjukkan ke kurang tangguhannya itu hanya bisa dipulihkan atau ditingkatkan dengan cara melakukan rejuvenasi *bhinneka tunggal ika*, yang berarti memperbaiki praktik idealisme nasionalisme seluruh komponen bangsa. Tanpa praktik nasionalisme yang memadai, yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa, sulit untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang dihadapi dalam rangka praktik kewaspadaan nasional, yang sangat menekankan sikap peduli terhadap nasionalisme agar dapat menghasilkan kualitas memadai dalam menghadapi ancaman nasional. Rejuvenasi berarti melakukan peremajaan kembali pemahaman tentang *sesanti bhinneka tunggal ika* seperti yang dikehendaki awal oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Para *founding fathers* atau pendiri bangsa Indonesia sangat menyadari bahwa ciri bangsa Indonesia yang majemuk dengan berbagai suku, agama , ras, golongan yang melingkupi tanah air dari Sabang sampai Merauke adalah bangsa yang sangat mendambakan persatuan. Bangsa yang kuat keinginannya untuk bersatu (menjadi *tunggal*) mencapai suatu tujuan walau beragam atau *bhinneka*. Nilai-nilai luhur yang dikandungnya meliputi nilai toleransi, keadilan, dan gotong royong. [2] Ketika nilai-nilai itu mengalami kemerosotan dalam kehidupan nasional, ketika itu pula ketahanan nasional Indonesia menjadi merosot. Suatu keadaan yang telah direkam dalam Labkurtannas Lemhannas RI sejak tahun 2010. Oleh karenanya, rejuvenasi sesanti *bhinneka tunggal ika* pada kondisi Indonesia saat ini adalah sebuah keniscayaan. *Kebinekaan* yang dapat diartikan plural atau pluralisme, tidak seharusnya diartikan beragam yang asal beragam atau berbeda. Keberagamannya harus tetap dalam satu bingkai pemahaman yang disepakati, dikonsensuskan atau disetujui dalam ke*tunggal-ikaan*. Hal ini menjadi penting, karena itulah sejatinya yang dikehendaki para pendiri bangsa ini pada awal-awal pendirian bangsa dan negara ini.

Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 didepan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau BPUPKI menegaskanakan arti penting dari kebersetujuan itu.

> " ……kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan paham. Kita bersama-sama mencari persatuan *philosofische grondslag*, mencari satu *Weltanschauung* yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju ! Yang saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang saudara Liem Koen Hian setujui, pendeknya kita semua mencari satu *modus*. Tuan Yamin, ini bukan kompromis, tetapi kita bersama-sama setujui"

Ke*tunggal-ika*an.dalam *kebhinnekaan* yang dimaksud adalah ketunggalan atau ke-persatuan dalam *philosofische grondslag* atau ke-persatuan dalam *Weltanschauung,* yang tidak lain adalah Pancasila itu sendiri. Terlalu beresiko apabila *kebhinnekaan* yang dimaksud hanya sekedar pluralisme yang diartikan sebagai keberagaman pemahaman atau bermacam-macam paham, dan berpotensi menghasilkan silang pendapat yang tidak berkesudahan. Silang pendapatnya harus tetap dalam bingkai Pancasila yang secara substantif menekankan nilai gotong royong yang menurut Bung Karno (1945) sebagai; " pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris, buat kepentingan bersama". Suatu nilai yang juga mengandung penekanan pentingnya toleransi dan keadilan. Sepanjang keadilan belum memperoleh tempat yang memadai dalam kehidupan nasional, begitu juga toleransi, gotong royong tidak akan pernah terlaksana. Rejuvenasi *bhinneka tunggal ika* berarti menempatkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan gotong royong sebagai sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan nasional. Inilah yang paling esensial dalam meningkatkan ketahanan nasional menggunakan pendekatan kewaspadaan nasional. Menjadi penting dalam melakukan rejuvenasi *bhinneka tunggal ika* melakukan kebijakan revitalisasi nilai-nilai toleransi, nilai-nilai keadilan, dan gotong royong dalam kehidupan nasional. Nilai-nilai yang memiliki kualitas *prime mover* atau penggerak utama nasionalisme.

Ada langkah-langkah konsepsional yang dapat dilakukan menuju rejuvenasi *bhinneka tunggal ika*. Langkah-langkah itu

meliputi ;

Pertama; perasaan satu komunitas nasional di dalam negeri harus tetap terjaga dengan menggunakan paradigma nasional pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai acuannya. Untuk bisa melakukan itu, penting untuk selalu menanamkan rasa empati sesama anak bangsa untuk menumbuh suburkan relasi sosial diantara komponen bangsa. Pancasila yang pada intinya menghendaki gotong royong sangat mendambakan kesuburan empati itu dalam membangun relasi sosialnya. Sesanti atau semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang menekankan persatuan dan kesatuan itu sejatinya terinspirasi dari falsafah *ta twam asi* ajaran *sanata dharma* yang berarti "Itu adalah Kamu" *(that you are)* atau yang juga diartikan sebagai " Aku adakah Kamu". Ini sama dengan konsep "dari Kami ke Kita" yang pernah disampaikan Fuad Hassan (2005) sebagai *modes of togetherness*. Atau konsep 'Kami *within* Kita'. Oleh karena itu, kesenjangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sangat potensial membuat lunturnya perasaan satu komunitas nasional perlu mendapat perhatian yang serius. Begitu juga menyangkut keinginan masing-masing komunitas, kelompok atau golongan yang saling membenci dan meniadakan kedaulatan masing-masing.

Kedua; dimata Internasional Indonesia harus berani memposisikan diri sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat dengan mengacu dari kepentingan nasionalnya seperti yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 45. Keberanian yang perlu dilakukan itu berkaitan dengan langkah konkrit dari sesanti *tan hana dharma mangrva* (tiada kebenaran yang mendua) dari sesanti *bhinneka tunggal ika*. Untuk bisa demikian, Indonesia harus mengetahui secara terus menerus kondisi dan situasi internasioanl yang berlaku, pada posisi mana harus berada yang dapat menguntungkan kepentingan nasional Indonesia. Hal ini harus dilakukan karena kewaspadaan nasional merupakan manifestasi dari kepedulian serta tanggung jawab setiap komponen bangsa terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa dalam NKRI. Selain itu, langkah ini diambil karena Padnas adalah *kesiapan dan kesiagaan* yang harus dimiliki olah bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Menggunakan pendekatan kewaspadaan nasional sudah tentu memerlukan kalkulasi tepat dan akurat dari analisa data yang akurat juga – tentang situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa – internasional, regional dan nasional. Oleh karenanya, tuntutan memiliki intelijen negara yang handal adalah tuntutan dari kewaspadaan nasional – intelijen yang mampu merumuskan dan mempersepsikan hakekat ancaman yang dihadapi bangsa dan negara – perspektifnya adalah kepentingan nasional (*national interest*).

Bentuk-bentuk konkrit yang dapat dilakukan meliputi :

a. Secara nasional, Indonesia harus memiliki *early warning system* (sistem peringatan dini). Hal ini tidak hanya berlaku bagi ancaman tradisional (ancaman militer), tetapi juga ancaman non tradisional (*non traditional threat*). Ini penting untuk menghindari pendadakan dan kesimpangsiuran informasi ketika eskalasi situasi terus meningkat dan mencapai titik krisis. Di era globalisasi, era informasi, era yang memberi akses informasi demikian banyak, tidak harus simpang siur, apalagi berkembang isu-isu yang menyesatkan – propaganda hitam yang meracuni masyarakat. Sekali

lagi, peran intelijen negara dan kementerian komunikasi dan informasi sangat penting.

b. Menyangkut Peraturan dan Perundang-Undangan, Indonesia harus memiliki Peraturan dan Perundang-undangan yang memadai, berikut penegakannya yang berani dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia.

PENUTUP

Berdasar uraian dan analisis di atas, disimpulkan bahwa rejuvenasi *bhinneka tunggal ika* guna meningkatkan Ketahanan Nasional, adalah peremajaan pemahaman tentang *bhinneka tunggal ika,* seperti yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa yang sangat menekankan arti penting persatuan dalam menyikapi keberagaman atau kemajemukan bangsa. *Bhinneka tunggal ika* tidak seharusnya diartikan harafiah yang lepas dari kata lain dalam sebuah kontruksi " *bhinneka tunggal ika, tan hana dharma mangrva*", yang artinya, walaupun beragam tetapi tetap dalam satu tujuan, dalam hal ini tujuan nasional, karena tidak ada tujuan nasional selain tujuan nasional seperti yang dikehendaki dalam pembukaan UUD NRI 1945. Satu itu juga, perlu diartikan sebagai satu *philosofische grondslag* atau falsafah dasar, satu *Weltanschauung* atau pandangan hidup, satu paradigma, nasional Pancasila dan UUD NRI 1945.

Rejuvenasi *bhinneka tunggal ika* memerlukan kadar nasionalisme yang memadai, yang sebaliknya juga (*vice versa*) nasionalisme yang memadai akan mampu melakukan rejuvenasi *bhinneka tunggal ika*. Rejuvenasi *bhinneka tunggal ika* berkaitan dengan upaya untuk menciptakan persatuan kebangsaan sebagai persyaratan dasar menghadapi berbagai ancaman yang potensial maupun nyata melemahkan ketahanan nasional. Data Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI tahun 2015 yang merekomendasi untuk memperhatikan isu strategis kondisi nilai-niilai kebangsaan dari komponen bangsa Indonesia, ternyata pada kondisi searah (*in line)* dengan indeks ketahanan nasional Indonesia yang menunjukkan kekurangtangguhannya secara berturut-turut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Menangani secara serius masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai toleransi, nilai keadilan, dan nilai gotong royong untuk menghasilkan nasionalisme keindonesiaan, menjadi kata kunci rejuvenasi *bhinneka tunggal ika* guna meningkatkan Ketahanan Nasional. Dengan rejuvenasi *bhinneka tunggal ika* dan memiliki nasionalisme yang memadai, keuletan, dan ketangguhan akan dapat diraih. Dengan nasionalisme juga kemampuan *recovery*, atau kembali ke bentuk dan posisi semula pada saat terjadi tekanan, benturan atau pembengkokan, respon, dan adaptif terhadap ancaman nasional dapat dimiliki untuk menghasilkan ketahanan nasional yang tangguh atau bahkan sangat tangguh. Penting bagi penyelenggara negara serta seluruh komponen bangsa untuk melakukan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan atau sesanti *bhinneka tunggal ika*, meliputi nilai toleransi, keadilan dan gotong royong dalam rangka rejuvenasi *bhinneka tunggal ika* guna meningkatkan Ketahanan Nasional

Daftar Bacaan

Anderson, Benedict, 2008, *imagined communities, komunitas-komunitas terbayang* , Daniel Dhakidae pengantar, Omi Intan Naomi-penerjemah, Pustaka Pelajar, Yogjakarta

Bandoro,Bantarto,2005 Perspektif Baru Keamanan Nasional.

Gerakan Nasional Patriot Indonesia,2004, Undang-Undang Republik Indonesia No 27 Tahun 1999, Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Sebagai Tindak Lanjut Pasal 3 Tap MPRS NO XXV Tahun 1966.

Huntington, Samuel.P,2000 Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia.

Husaini,Adian,2005 Wajah Peradaban Barat,Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal.

Muladi,2007, *"Konsep Comphrehensive Security dan Ketahanan Nasional"*. Kuliah perdana Program Pasca Sarjana kerja sama Lemhannas-RI – Universitas GajahMada, Yogyakarta

_____, 2006, "Relevansi Doktrin Ketahanan Nasional (National Resilience) terhadap Kekuatan Nasional (National Power)". *Kerangka Ceramah di KRA XXXIX Lemhannas-RI*,Jakarta

Lemhannas –RI, Naskah Lembaga tentang Kewaspadaan Nasional Pasca Orde Baru, 2006

Maksum (Ed), 1994, Mencari Ideologi Alternatif, Polemik Agama Pasca Ideologi Menjelang Abad 21

Putu Sastra Wingarta, 2013, Pengantar Kewaspadaan Nasional Untuk Program Matrikulasi S2 Tannas Lemhannas-Inter Universities Net-Work

Pancasila Bung Karno, Himpunan Pidato, Ceramah Kursus dan Kuliah.Tim Penerbitan Buku Pancasila, 2005,

Rahmat, M.Imdadun, 2005, Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia,

Soebadio,Hadi,2002 Keterlibatan Australia Dalam Pemberontakan PRRI/ Permesta

Surjohadiprojo, Sajidiman,Letjen(Pur), 2005, Si Vis Pacem Para Bellum, Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Effektif.

Tim Penerbitan Buku Pancasila, 2005, Pancasila Bung Karno, Himpunan Pidato, Ceramah Kursus dan Kuliah.

Hasil pengukuran Ketahanan Nasional Lemhannas RI tahun 2014 yang menggunakan data terakhir tahun 2015

Cuplikan Pidato Presiden Pertama RI, Soekarno pada saat pembukaan Lemhannas RI, dalam Revitalisasi, Profil dan Direktori Lemhannas RI 2007

http://id.wikipedia.org/wiki/Kakawin_Sutasoma

---

1 Kaelan dalam RTD Lemhannas RI tanggal 22 Juli 2014

2 Modul Kewaspadaan Nasional Lemhannas-RI (2016)

3 http://id.wikipedia.org/wiki/Kakawin_Sutasoma

4 Cuplikan Pidato Presiden Pertama RI, Soekarno pada saat pembukaan Lemhannas RI, dalam Revitalisasi, Profil dan Direktori Lemhannas RI 2007

5 Hasil pengukuran Ketahanan Nasional Lemhannas RI tahun 2016 yang menggunakan data terakhir tahun 2015

6 Nilai-nilai yang dirumuskan oleh Lemhannas RI dalam melakukan pementapan nilai-nilai kebangsaan bagi berbagai komponen bangsa yang dihimpun dalam Buku Induk Nilai-Nilai kebangsaan Indonesia Yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar.

Ketahanan Nasional: Permasalahan dan Solusinya Dari Perspektif Kependudukan

Dr. Djoharis Lubis, MSc
Tenaga Professional BS Demografi, Lemhannas RI, Alumni KSA XII Tahun 2004
sahli_otda@yahoo.com

Abstrak

Untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia, diperlukan pembangunan nasional di segala bidang, sekaligus meningkatkan ketahanan nasional kita terhadap ancaman, gangguan, hasutan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dalam negeri yang dapat mengganggu tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai hal tersebut, tulisan di bawah ini akan membahas permasalahan ketahanan nasional dan konsepsi solusinya dari perspektif Kependudukan.

PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, telah diamanatkan bahwa tujuan kita bernegara (tujuan nasional) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional dimaksud di atas, kita melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, sekaligus meningkatkan ketahanan nasional kita terhadap ancaman, gangguan, hasutan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dalam negeri yang dapat mengganggu tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas.

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang mengandung keuletan, dan ketangguhan yang mampu membangun, mengembangkan dan menumbuhkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia.[1].

Tulisan di bawah ini akan membahas permasalahan ketahanan nasional dan konsepsi solusinya dari perspektif kependudukan. Ada beberapa alasan judul ini dipilih karena: (1) Indeks Ketahanan Nasional Indonesia tahun 2015 menurun dibandingkan tahun 2014;(2) penduduk adalah subjek dan objek ketahanan nasional. Artinya, ketahanan nasional kuat atau lemah sangat ditentukan oleh kualitas maupun kuantitas serta mobilitas dan produktivitas penduduknya, sehingga perlu ditingkatkan kualitas dan produktivitasnya. Singapura dan Jepang, meskipun sumber kekayaan alamnya terbatas, namun menjadi negara industri maju karena kualitas dan produktivitas penduduknya; (3) penduduk yang berkualitas dan produktif didukung oleh iklim yg kondusif, akan menentukan berhasilnya pembangunan nasional sekaligus pembangunan ketahanan nasional dalam menghadapi era globalisasi dan MEA yang akan berimplikasi terhadap kemampuan kita memanfaatkan bonus demografi dan memperkuat ketahanan nasional kita secara agregat.

PEMBAHASAN

Kondisi Ketahanan Nasional Indonesia Saat Ini

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan Labkurtannas Lemhannas RI tahun 2016[2], Indeks Ketahanan Nasional tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 secara agregat menurun sebagaimana dapat di lihat pada tabel 1 di bawah ini

Tabel 1. Indeks Ketahanan Nasional Indonesia Tahun 2015

KONDISI INDEKS KETAHANAN NASIONAL INDONESIA THN 2015 (Agregat & Komposit)

KOMPONEN	2014	2015	PERUBAHAN
A. AGREGAT NASIONAL	2,56	2,55	Menurun
B. KOMPOSIT (Gatra)			
1. GEOGRAFIS	2,60 (6)	2,41 (5)	Menurun
2. DEMOGRAFI	2.76 (2)	2.83 (1)	Meningkat
3. SKA	2,61 (5)	2,77 (3)	Meningkat
4. IDEOLOGI	2,30 (7)	2,23 (7)	Menurun
5. POLITIK	2,62 (4)	2,39 (6)	Menurun
6. EKONOMI	2,94 (1)	2,63 (4)	Menurun
7. SOSBUD	1.91 (8)	2,21 (8)	Meningkat
8. HANKAM	2,75 (3)	2,82 (2)	Meningkat

Rawan | Kurang Tangguh | Cukup Tangguh | Tangguh | Sangat Tangguh

Sumber : Diolah dari Labkurtannas – Lemhannas RI (2015)

Berdasarkan tabel 1 di atas, secara agregat Indeks Ketahanan Nasional Indonesia turun dari 2,56 pada tahun 2014 menjadi 2,55 pada tahun 2015 . Demikian juga secara komposit, Gatra Geografi turun dari 2,60 pada tahun 2014 menjadi 2,41 pada tahun 2015. Sedangkan Gatra Ideologi turun dari 2, 30 pada tahun 2014 menjadi 2.23 pada tahun 2015. Gatra Politik turun dari 2,62 (Cukup Tangguh) pada tahun 2014 menjadi 2,39 (Kurang Tangguh) pada tahun 2015 dan Gatra Sosial Budaya meskipun sedikit naik dari 1,91 pada tahun 2014 menjadi 2,21 pada tahun 2015, namun indeksnya tetap kurang tangguh artinya keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi **lemah, meskipun dalam** jangka pendek negara masih dapat bertahan dari berbagai TAHG. Namun, jika tidak segera ada perbaikan secara signifikan, maka dalam jangka panjang stabilitas nasional akan goyah. Kondisi ini disebut juga ***warning***.

Gatra-gatra yang naik Indeks Ketahanan Nasionalnya adalah Gatra Demografi, naik dari 2,76 pada tahun 2014 menjadi 2,83 pada tahun 2015, Gatra SKA naik dari 2,61 pada tahun 2014 menjadi 2,83 pada tahun 2015, dan Gatra Hankam naik dari 2,75 pada tahun 2014 menjadi 2,82 pada tahun 2015. Namun, masih di bawah angka 3 dalam skala 0 sd 5. Artinya, meskipun Indeks Ketahanan Nasional Indonesia pada posisi **cukup tangguh** atau **cukup memadai** dalam menghadapi TAHG, namun beberapa kelemahan internal perlu segera diperbaiki agar TAHG tidak sampai melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini merupakan tahap awal dari kondisi ***moderat***.

Dengan memperhatikan Tabel 1 di atas, baik secara agregat maupun komposit, indeks ketahanan nasional kita pada tahun 2015 belum tangguh apalagi sangat tangguh yang perlu sama-sama kita waspadai dan kita tingkatkan agar NKRI tetap kokoh, tidak seperti perpecahan Negara Uni Soviet, negara-negara Balkan dan negara-negara Arab dan Afganistan. Hal ini perlu diwaspadai karena John Naisbitt (1994) dalam Global Paradoksnya mengemukakan dunia semakin menuntut terintegrasi ternyata juga menuntut Disintegrasi. Pemicunya adalah ideologi sebagai Weltanschaung (Pandangan Hidup) bergerak dinamis mempengaruhi bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia. Selanjutnya, Anthony Giddens (2000) menyatakan proses globalisasi adalah "*The Run Way World*" yaitu perubahan sosial di suatu negara berpengaruh terhadap negara lain. Indonesia telah mengalami perebutan dan pengaruh ideologi asing yg belum tentu sesuai dengan Pancasila yaitu: (1) Demokrasi Liberal atau Neo Liberalism, (2) Sosial Demokrat atau '*New Left* atau "Kiri Baru", (3) Ideologi Radikalisme Agama yg mulai marak dimana-mana[1]. Dalam pada itu, penduduk Indonesia kedepan akan dipenuhi generasi X, Y, Z dan Alpha yang karakteristiknya berbeda dengan karakteristik generasi tahun 50-an. Menurut Teori Generasi Don Tapscott dalam bukunya Up Digital, Generasi X lahir tahun 1965 -1976, Generasi Y lahir tahun 1977-1997, Generasi Y lahir tahun 1998 sampai dengan sekarang dan Generasi Alpha (A) lahir tahun 2020. Masing-masing generasi punya karakteristik positif dan negatif, mereka sudah terbiasa dengan IT, media sosial, berpikir pragmatis, dan pekerja keras. Penduduk dalam generasi X,Y, dan Z ini, melihat keutuhan NKRI bukan dari nilai-nilai kesejarahannya melainkan dari nilai fungsionalnya.

Permasalahan Ketahanan Nasional dari Perspektif Demografi

Labkurtanas Lemhannas RI dalam studinya tahun 2014,[2] telah menemukan indikator-indikator strategis gatra demografi. Indikator-indikator yang rawan atau kurang tangguh, mempunyai bobot strategis tinggi adalah sebagai berikut :

1. **Aspek Kuantitas Penduduk**

   a. Angka fertilitas total masih tinggi, berdampak pada

pertumbuhan penduduk semakin besar. Jumlah penduduk yang besar yang tidak diikuti kualitas penduduk yang memadai dan menurunnya mortalitas, akan menimbulkan pengangguran dan kemiskinan yang dapat menggangu ketahanan nasional.

b. Komposisi geografis jumlah penduduk yang tidak merata antara pulau Jawa dengan luar pulau Jawa akan menimbulkan persoalan ke tenaga kerjaan. Berbagai persoalan demografi tersebut di atas, menggambarkan kompleksnya persoalan bangsa Indonesia kini dan ke depan yang pada akhirnya bermuara pada tingkat ketahanan nasional Indonesia.

c. Rasio jumlah desa terhadap jumlah penyuluh BKKBN yang belum ideal terjadi karena beberapa penyuluh BKKBN telah beralih status menjadi pejabat struktural atau mengisi posisi lain dan tidak adanya penambahan penyuluh BKKBN. Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, akan berdampak pada angka pertambahan penduduk yang cukup tinggi.

d. Kurang terkendalinya pertumbuhan penduduk sejak diberlakukan Otda. Namun, pemerintah saat ini mulai menggalakkan kembali Program KB, meski masih ditemukan kendala institusi di berbagai daerah.

2. Aspek Kualitas Penduduk.

a. Pendidikan

Rendahnya pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) Pendidikan yang hanya mencapai kira2 30 persen dari SD sd SLTA (hasil penelitian kami pada tahun 2012) berdampak pada masih rendah partisipasi murni di tingkat SLA dan Perguruan Tinggi. Meskipun tingkat SD sudah hampir 95% dan SLP hampir 70%. Dengan program wajib belajar 12 tahun tampaknya masalah tersebut akan segera teratasi. Tetapi jika dilihat di tingkat SLA dan PT, maka terlihat bahwa angkanya masih relatif rendah. Hal ini menggambarkan rendahnya akses penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SLA dan Perguruan Tinggi. Akses penduduk dapat dilihat dari dua sisi, yaitu akses ekonomi dan akses fisik. Keterbatasan akses secara ekonomi, terutama terjadi pada penduduk miskin yang tidak mampu membiayai pendidikan di jenjang SLA dan PT. Keterbatasan akses dari sisi fisik mengacu kepada keterbatasan sarana dan prasarana serta kondisi geografis. Sementara itu, dilihat dari rata-rata tahun sekolah, Indonesia tergolong masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Kondisi ini merupakan indikasi besarnya jumlah murid yang *drop out* dari pendidikan SD atau SLP. Sekali lagi, hal ini terkait dengan persoalan Standar Pelayanan Minimum yg belum terpenuhi dan akses ekonomi. Pendidikan Indonesia juga berhadapan dengan tantangan untuk meningkatkan kompetensi dan kompetisi penduduk menghadapi globalisasi, peningkatan daya kompetensi dan kompetisi menjadi salah satu kuncinya.

b. Kesehatan

Sama halnya dengan sektor pendidikan, rendahnya

pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) kesehatan berimplikasi terhadap Angka kematian ibu (AKI) yang tinggi yaitu 100.000 kelahiran hidup menunjukkan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau 42 hari sejak terminasi kehamilan. Angka kematian ibu yang tinggi menggambarkan masih rendahnya kualitas kesehatan dan kualitas hidup perempuan di Indonesia. Di samping itu, masih tingginya prevalensi malaria, DBD dan pneumonia merupakan indikasi rendahnya kualitas kesehatan penduduk Indonesia. Hal ini diperparah lagi makin menumpuknya penduduk di kota-kota atau wilayah tertentu, mengakibatkan maraknya pemukiman kumuh perkotaan dan Gelandangan serta Pengemis di kota-kota besar di Indonesia yg sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan warga kota.

c. Pendapatan

Pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada tahun 2014 menurut World Bank adalah US$4.700 setara dengan Rp 5 Juta/kapita/tahun atau Rp 5 Juta/Kapita / bulan. Penulis meragukan pendapatan perkapita tersebut karena tidak menggambarkan jumlah pendapatan terendah yg diterima penduduk. Padahal, secara kasat mata dapat dilihat jumlah penduduk miskin cukup besar. Data BPS menunjukkan tahun 2015 jumlah orang miskin sebanyak 35, 28 juta orang (14,50%) dan pengangguran sebanyak 7,24 juta orang (5,7%) dengan tingkat pertumbuhan penduduk kira-kira 4 juta orang/tahun dan kualitas penduduk

Tabel 2 dan Grafik 1 Jumlah Penduduk Miskin

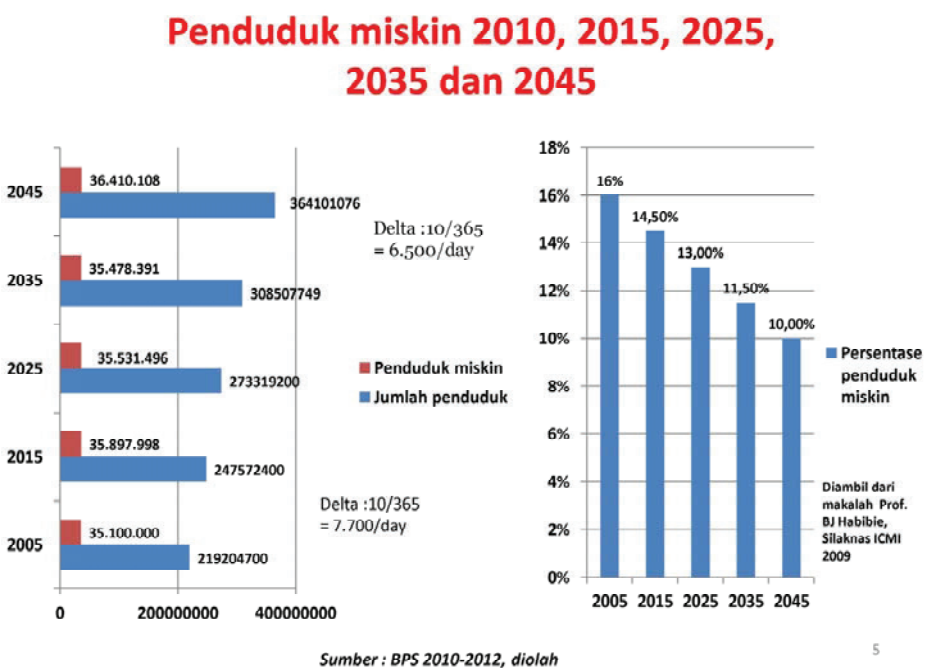

Sumber : BPS 2010-2012, diolah

rata-rata belum tammat SMP merupakan tantangan di saat Indonesia memasuki Bonus Demografi kalau tidak dikatakan Petaka Demografi.

Dalam pada itu, disparitas tingkat kemiskinan antar provinsi sangat tinggi (Jakarta = 3,69%, Papua = 31,11%, Indonesia = 11,96%). (BPS 2014). Disparitas tingkat kemiskinan antar kota dan desa tinggi, sebagian besar Rumah Tangga miskin bekerja di pertanian. Banyak penduduk yang hidup di sekitar garis kemiskinan. Mereka tidak tergolong miskin tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan tabel 2 dan grafik 1 diatas , dapat dilihat bahwa kemampuan Pemerintah menurunkan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2005 s.d. tahun 2015 hanya 2 persen setiap tahun, sehingga diperkirakan pada tahun 2045 ketika jumlah penduduk sebanyak 364 juta jiwa, masih ada penduduk miskin sebanyak 36, 4 juta jiwa atau 10% dari jumlah penduduk.

Dalam pada itu, masih jutaan penduduk di banyak daerah dengan kondisi perumahan tanpa listrik, tidak ada toilet, dinding rumah bambu, tidak ada air bersih, luas rumah sempit, terutama di luar pulau jawa yg menggambarkan kesenjangan wilayah, kesenjangan pendapatan dan kesenjangan berusaha yang ditandai Gini Ratio 0, 414. (Bappenas 2015)

Di tengah-tengah banyaknya jumlah penduduk miskin dan adanya kesenjangan pendapatan, Indonesia masih dalam klasifikasi negara korup sebagaimana dapat di lihat pada tabel 3 di bawah ini :

Indonesia Masih dalam Klasifikasi Negara Korup

Indeks Persepsi Korupsi Negara-negara ASEAN

Urutan	Negara	CPI
5	Singapore	9.2
44	Brunai	5.2
60	Malaysia	4.3
80	Thailand	3.4
100	**Indonesia**	**3**
112	Vietnam	2.9
119	Philipina	2.6
154	Laos	2.2
164	Kamboja	2.1
180	Myanmar	1.5

CPI 2011 mengambil survey di 183 negara. Rentang Index adalah 0-10, dimana 0 menunjukkan Sangat Korup, dan 10 adalah Sangat Bersih. Merupakan gabungan dari berbagai Index dari berbagai survey lembaga terkemuka seperti, ***Political and Economic Risk Consultancy 2010 & 2011, World Economic Forum Executive Opinion Survey 2010 & 2011, Global Insight Country Risk Ratings dan Bertelsmann Foundation Transformation Index***

34

Berdasarkan tabel 3 di atas, dari 183 negara yg disurvey, Indonesia menduduki rangking ke 100 di atas Malaysia (60), Thailand (80) tapi di bawah Vietnam (112) dan Phillipina (119).

3. **Aspek Mobilitas Penduduk**

Persentase migran penduduk usia produktif 15 – 19 tahun cukup tinggi, menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi karena masyarakat mampu membiayai sendiri perjalanannya. Tetapi di sisi lain menunjukkan urbanisasi yang akan menjadikan sebaran penduduk tidak merata dan hanya menumpuk di wilayah tertentu seperti di pulau Jawa. Indikator-indikator strategis di atas, apabila tidak segera mendapat penyelesaian secara tuntas, akan menjadi isu yang mampu menimbulkan kerawanan tidak hanya pada Gatra Demografi, namun Ketahanan Nasional secara agregat.

Sejalan dengan laporan Labkurtannas Lemhannas tersebut di atas, beberapa permasalahan kependudukan yang lainnya adalah :

4. **Konflik Penduduk**

Indikasinya terjadinya konflik dan kekerasan di antara berbagai kelompok masyarakat disebut media sebagai 'ormas', semacam Pemuda Pancasila (PP), Forum Betawi Rembug (FBR) atau Forkabi, dan semacamnya. Konflik-konflik vertikal dan horizontal terutama menjelang Pemilu/Pilkada di Aceh, Papua, POSO, serta masih adanya pengungsi di beberapa tempat. Seperti penganut Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terusir dari kampung mereka. Juga Kaum Syiah Madura yg masih mengungsi di beberapa tempat di luar Madura serta Kasus Gafatar merupakan fakta yg membuat indeks ketahanan nasional kita belum tangguh.

Perkembangan Lingkungan Strategis

1. Global.

Mengamati perkembangan lingkungan strategis global yang ditandai masih terjadi Krisis Ekonomi Eropa dan pulihnya kembali ekonomi Amerika Serikat sangat berpengaruh terhadap penduduk dengan mata pencahariannya di sub sektor perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, kopi, teh, lada, tembakau, cassiavera, bergantung pada ekspor ke negara-negara Amerika dan Eropa. Dalam pada itu, pergeseran pusat grafitasi geostragis dunia ke Asia Pasifik dan kebangkitan ekonomi Tiongkok juga berpengaruh significant terhadap penduduk Indonesia mengingat secara historis, kultural dan ekonomi banyak penduduk Indonesia keturunan Tiongkok menjadi konglomerat di Indonesia yang pengaruhnya baik secara ekonomi, politik dan sosial budaya berperan dalam kehidupan penduduk di Indonesia. Sementara itu, Indonesia masih dihadapkan pada masalah terorisme, HAM, lingkungan hidup, kelangkaan energi dan pemanasan Global serta tergerusnya budaya nasional oleh budaya asing sehingga diperlukan "Revitalisasi Kearifan Lokal Dalam Menangkal Budaya Asing" yang belum banyak dipahami oleh penduduk Indonesia namun mereka dapat merasakan dampaknya. Sementara itu, rendahnya tingkat produktivitas nasional erat kaitannya dengan kemampuan daya saing kita di pasar global.

Gambar 1 memperlihatkan Produktivitas dan GDP Per Kapita Indonesia diperbandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

Berdasarkan gambar 1 tersebut, Produktivitas dan GDP perkapita Indonesia masih di bawah Malaysia, Thailand, China dan Hongkong. Untuk itu perlu penataan /reformasi birokrasi guna terciptanya perbaikan iklim usaha, inovasi teknologi, peningkatan kualitas SDM dengan memperbanyak sekolah2 kejuruan sesuai dengan potensi masing-masing daerah dan

Gambar 1

Pengembangan Budaya Produktip serta Revolusi Mental.

2. Regional.

Perkembangan lingkungan strategis Regional ditandai Sengketa Laut China Selatan dan AEC (*Asean Economic Community*) atau MEE (Masyarakat Ekonomi Asean). Baru-baru ini kasus ditemukan pekerja dari Tiongkok secara ilegal bekerja di sekitar wilayah kerja TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma. Setelah diteliti ternyata pekerja asal Tiongkok tersebut bukan tenaga ahli melainkan pekerja "*Blue Color Labor*" yang sesungguhnya pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh penduduk Indonesia di saat jumlah pengangguran masih cukup besar di Indonesia. Intinya adalah, dengan globalisasi dan pengaruh lingkungan strategis regional yang dikemukakan di atas, Indonesia harus siap menyelamatkan dan melindungi segenap penduduk Indonesia dari kemiskinan, kebodohan, pengangguran, diskrimainasi dan mengatasi kesenjangan ekonomi yang semakin melebar sesuai amanat konstitusi yg dikemukakan pada awal tulisan ini.

3. Nasional

Perkembangan lingkungan strategis nasional yang penting diperhatikan untuk adalah posisi geostrategis yang kita miliki memberi peluang kerjasama saling menguntungkan dan saling memperkuat dengan negara-negara sahabat, bukan sebaliknya. Dari perspektif Demografi, Indonesia memasuki Bonus Demografi yang menuntut peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, serta tidak adanya diskriminasi dalam pasar tenaga kerja. Sedangkan dari perspektif Sumber Kekayaan Alam, kita tidak eksploitatif yang dapat merugikan anak cucu kita di masa depan. Dari perspektif Ideologi, meski banyak orang mengatakan Ideologi Komunis sudah bangkrut dan mati, tetapi kewaspadaan harus tetap ada, mengingat pengalaman tahun 1948 dan 1965. Di samping itu, fenomena neoliberalisme dan ideologi yang menggunakan simbol-simbol agama seperti ISIS harus diwaspadai agar Indonesia tidak seperti negara-negara Syria, Iraq, Afghanistan yang penduduknya lari mengungsi meninggalkan negerinya dan diperlakukan tidak manusiawi oleh negara-negara yg menjadi negara tujuan suakanya. Dari perspektif politik, Indonesia menjadi negara paling demokrasi di dunia, meski masih terjadi politik dinasti oleh keluarga-keluarga tertentu. Sementara dari perspektif ekonomi, masih terjadi kesenjangan pembangunan di Jawa dibandingkan luar jawa, kesenjangan pendapatan dan kesenjangan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sedangkan dari perspektip Sosial Budaya, sudah mulai tergerus nilai-nilai kegotongroyongan, kurang disiplin, dekadensi moral yang memerlukan "revolusi mental". Dari perspektif Hankam, di beberapa tempat

seperti Poso dan Papua masih terjadi konflik vertikal maupun horizaontal, kasus korupsi dan narkoba sudah merambah sampai ke aparat hukum, DPR serta oknum-oknum hakim, jaksa dan polisi yang mencemari nama baik kesatuannya. Kesemuanya itu, baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap ketahanan nasional kita dan cermin para pejabat berperilaku buruk membuat penduduk kecewa terhadap pemimpinnya yang dapat memicu pergolakan sosial seperti pernah terjadi pada tahun 1998 yang lalu.

Menghadapi perkembangan lingkungan strategis glabal, regional dan nasional di atas, beberapa hal yg perlu dipikirkan adalah

a. Pada saat ulang tahun Kemerdekaan Indonesia ke 100 Tahun pada Tahun 2045 yang akan datang, penduduk Indonesia akan diisi oleh generasi X,Y,Z dan Alpha. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, diharapkankita tidak meninggalkan warisan hutang yang dapat mencederai generasi bangsa ke depan seperti halnya negara Yunani dan Portugal .

b. Pengaruh perkembangan era digital, teknologi informasi, komunikasi, transportasi, media sosial, isu-isu demokrasi, HAM dan lingkungan hidup menjadi faktor pendorong tingginya intensitas dan mobilitas penduduk Indonesia menjadi warga dunia tanpa batas yang berimplikasi terhadap rasa nasionalismenya. Terlebih lagi, saat ini penduduk ditawari hal-hal yang bersifat "konsumerisme" maupun ideologi berbasis ajaran agama .

c. Adanya isu-isu kesenjangan pendapatan dan kesenjangan wilayah, pengaruh ideologi asing yg akan menggantikan ideologi pancasila dan isu HAM dengan label demokrasi harus tetap diwaspadai.

d. Atas dasar butir (a) sampai dengan butir (c) di atas, untuk mengendalikan masuknya pengaruh asing yang merugikan penduduk lokal yang ditandai mulai banyaknya orang-orang asing (Tiongkok, Taiwan, Korea, Malaysia dan orang-orang Afrika berkunjung ke desa-desa), maka pemerintah melalui "Dana Desa" dan dana CSR atau dana Yayasan, perlu membangun suatu "Gerakan Nasional Pembangunan Desa Terpadu" bersifat lintas sektor, lintas disiplin dan lintas usaha (Pemerintah, Dunia Usaha, LSM/NGO, Yayasan dan Perguruan Tinggi) agar desa menjadi makmur dan penduduk desa tidak pindah ke kota dan lahan mereka tidak mudah dieksplotasi oleh orang-orang asing tersebut di atas. Di samping itu, diperlukan Revitalisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) agar lebih berfungsi secara optimal.[1]

Konsepsi Terhadap Pemecahan Masalahan Penduduk Dalam Rangka Ketahanan Nasional

Permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, harus dicari solusinya melalui kebijakan, strategi dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan yang perlu ditempuh adalah "Optimalisasikan Pembangunan Nasional Berorientasi Kependudukan Berwawasan Ketahanan Nasional".

Optimalisasi Pembangunan Nasional Berorientasi Kependudukan Berwawasan Ketahanan Nasional adalah suatu proses pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terus-menerus, menjadikan "penduduk" sebagai titik sentral pembangunan nasional baik sebagai subjek maupun objek

pembangunan melalui peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, melibatkan seluruh lapisan strata penduduk mulai dari desa sampai ke tingkat nasional. Dengan demikian, diharapkan penduduk Indonesia mampu memperkuat "*bargaining position*" menghadapai era globalisasi dan memperkokoh ketahanan nasional bangsa Indonesia di dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Strategi

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas, perlu ditempuh strategi sebagai berikut :

1) Pengendalian kuantitas penduduk melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas
2) Peningkatan kualitas penduduk melalui peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan
3) Pelibatan penduduk sejak perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi pembangunan secara berkelanjutan, terpadu dan tanpa diskriminasi
4) Pembangunan ketahanan keluarga
5) Pengarahan mobilitas penduduk secara proporsional dan profesional
6) Mewujudkan sistem pertahanan rakyat semesta
7) Pengelolaan *database* kependudukan secara sistematis dan kontinu

Upaya – Upaya

a. Strategi Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui upaya-upaya: Revitalisasi Program KB yang mengatur:

1) usia ideal perkawinan,
2) usia ideal melahirkan,
3) jumlah anak yang dilahirkan,
4) penyediaan alat kontrasepsi terutama bagi penduduk miskin di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan negara,
5) pengaturan kehamilan yg diinginkan,
6) penurunan angka kematian bayi dan ibu,
7) peningkatan akses dan kualitas pelayanan
8) peningkatan kesertaan KB Pria,
9) promosi pemanfaatan air susu ibu,
10) integrasi program KB kedalam program pembangunan ekonomi, sosial dan budaya,
11) memperkuat kelembagaan dan komitmen politik Program KB sampai ke Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa-desa.[2]

B Strategi Peningkatan kualitas penduduk melalui upaya-upaya:

1) pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, dan pemberian akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada penduduk miskin dan rentan melalui pendidikan formal, non formal maupun informal dengan memperluas pendidikan kejuruan sesuai potensi wilayah dan kekayaan alam setempat. Misalnya, jika penduduk bermukim di wilayah perairan dibangun sekolah Perikanan, kalau wilayahnya pertanian dibangun Sekolah Kejuruan Bidang Pertanian,
2) pembangunan kesehatan, penurunan angka kematian, dan meningkatkan angka harapan hidup; penurunan gender *gap* terhadap pelayanan

pendidikan; sosialisasi dan advokasi tentang kesadaran geografi,

3) pendidikan bela negara, kewaspadaan nasional, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, wawasan nusantara, ideologi Pancasila dan UUD 1045;

4) meningkatkan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran; mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.[3]

5) Mengupayakan solusi terhadap hambatan-hambatan geografi seperti ketimpangan infrastruktur wilayah, sarana transportasi antar daerah surplus dengan daerah minus, pengadaan sarana dan prasarana komunikasi wilayah, pengadaan listrik serta prasarana dan sarana peningkatan produktivitas.

C. Strategi pelibatan penduduk sejak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian pembangunan melalui upaya-upaya:

1) rembuk desa,

2) pelibatan seluruh penduduk dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur pendidikan, kesehatan, pembangunan pasar-pasar desa dan ekonomi perdesaan, memudahkan mendapat peluang yg sama terhadap akses perbankan, pendidikan dan kesehatan dan peluang kerja dan peluag berusaha,

3) khusus untuk menghadapi Era Bonus Demografi, diupayakan: a) penduduk usia produktif harus benar-benar produktif, bekerja yang layak, dan tidak ada diskriminasi; b) penduduk usia produktif berkualitas sejak 1000 hari pertama kelahiran, dengan kualitas gizi, kesehatan, pendidikan, keterampilan yg memadai; c) semua penduduk terakses tabungan; d) semua penduduk diikutsertakan Program Keluarga Berencana; e) tidak ada diskriminasi pasar kerja.

D. Strategi Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui upaya-upaya :

1) mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan YME,

2) membangun keluarga sejahtera, bebas narkoba, sehat, maju, mandiri, dengan jumlah anak yang ideal dan harmonis, bebas prostitusi dan berkesetaraan gender,

3) membangun keluarga yang berketahanan sosial, memiliki perencanaan sumberdaya keluarga, berwawasan ketahanan nasional, berkontribusi bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia

4) mengupayakan terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial melalui terbentuknya: a) keluarga yang bertakwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum negara; b) keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak

yang ideal sesuai kemampuan keluarga tersebut; c) keluarga yang berketahanan sosial, yaitu keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga; d) keluarga berwawasan nasional, yaitu keluarga yang mengembangkan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia; e) keluarga yang berkontribusi kepada masyarakat, yaitu keluarga yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya; f) keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.[4]

E. Strategi Pengerahan Persebaran dan Mobilitas Penduduk melalui upaya-upaya:

1) persebaran penduduk yang lebih merata ke luar Pulau Jawa sehingga konsentrasi penduduk tidak semakin besar di Pulau Jawa

2) mengupayakan penduduk tidak berbondong-bondong datang ke perkotaan dengan menyediakan infrastruktur dasar di pedesaan melalui dana desa.serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya

3) mengupayakan penataan dan persebaran penduduk secara proporsial dan profesional sesuai daya dukung alam dan lingkungan

4) mengupayakan pemerataan distribusi penduduk dikaitkan dengan kebutuhan SDM di masing-masing wilayah.[5]

F. Strategi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta ditempuh melalui upaya-upaya:

1) memperkuat komponen TNI dan Polri,

2) memperkuat komponen cadangan meliputi warga negara, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana,

3) memperkuat komponen pendukung yaitu warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana prasarana nasional sebagai peningkatan kekuatan komponen cadangan dan komponen pendukung. Keikutsertaan penduduk dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui upaya-upaya: a) Pendidikan Kewarganegaraan; b) Pelatihan Dasar Kemeliteran; c) Pengabdian sebagai prajurit TNI.

G. Pembangunan sistem data dan informasi kependudukan melalui upaya-upaya :

1) pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK),

2) pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis,

3) pemantapan fungsi dan peranan *Database* Kependudukan Nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan,

4) pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain

yang berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada,

5) Pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS (*Decision Support System*) yang terintegratif.[6]

PENUTUP

Pemecahan masalah ketahanan nasional dari perspektip kependudukan, memerlukan *political will* pemerintah untuk membuat kebijakan dengan mengoptimalkan pembangunan nasional berorientasi kependudukan berwawasan ketahanan nasional. Titik sentral pembangunan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia disertai dicanangkannya Gerakan Nasional Pembangunan Desa Terpadu dengan Merevitalisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Untuk mengoptimalkan Pembangunan Nasional Berorientasi Kependudukan Berwawasana Ketahanan Nasional diperlukan strategi dan upaya-upaya terkait dengan pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk; pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas; peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan; pembangunan keluarga; persebaran dan pengarahan mobilitas melalui pembangunan interkoneksi koridor ekonomi; serta pembangunan data base kependudukan.

Khusus untuk menghadapi Era Bonus Demografi, diperlukan penduduk usia produktif harus benar-benar produktif, bekerja yang layak, dan tidak ada diskriminasi; penduduk usia produktif berkualitas sejak 1000 hari pertama kelahiran, dengan kualitas gizi, kesehatan, pendidikan, keterampilan yg memadai; semua penduduk terakses tabungan; program keluarga berencana; tidak ada diskriminasi pasar kerja. Sementara itu, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia, diperlukan penataan /reformasi birokrasi guna terciptanya perbaikan iklim usaha, inovasi teknologi, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan budaya produktif serta revolusi mental. Di samping itu, meskipun kita memerlukan pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan, hendaknya lebih selektif untuk hal-hal produktif agar generasi kedepan tidak dibebani warisan hutang seperti yang kini dialami negara Yunani, Portugal dan negara-negara Eropa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Djoharis Lubis, Dr,MSs, Pandu Gerbang Kampung Mengantarkan Kesejahteraan Rakyat, Kemenko Kesra, Jakarta, Tahun 2011

Djoharis Lubis, Dr, MSc, Membangun Kanero, Memperkokoh NKRI, Kemenko Kesra RI, Jakarta, 2009

I Putu Sastra Wingarta, Mayjen TNI (Purn), Dr, MSc, SIP, Orasi Ilmiah, HUT Ke 51 Lemhannas RI, Kewaspadaan Nasional Terhadap Disintegrasi Bangsa Guna Mendukung Keamanan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional, Jakarta, Mei 2016

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Grand Design Kependudukan Tahun 2011 -2935, Jakarta, tahun 2014.

Lemhannas RI, Modul BS Geostrategi dan Ketahanan Nasional,Tahun 2014.

Lemhannas RI, FGD Kelompok Kerja Demografi, Labkurtannas , Jakarta, Tahun 2016

Lemhannas RI, Materi Pokok Bidang Studi Demografi, Jakarta, Tahun 2016.

Sonny Harry B. Harmadi, Editor, Pembangunan Berwawasan Kependudukan, BKKBN, LD FEUI, Jakarta , Tahun 2011

1 Modul BS Geostrategi dan Ketahanan Nasional, Lemhannas RI, Tahun 2014.

2 Focus Group Discuccion, Kelompok Kerja BS Demografi, Labkurtannas, Lemhannas RI, Tahun 2016

3 Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra Wingarta, SIP, MSc, Orasi Ilmiah HUT ke-51 Lemhannas RI, Kewaspadaan Nasional Terhadap Disintegrasi Bangsa Guna Mendukung Keamanan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional, Jakarta, 20 Mei 2016, Halaman 2.

4 Focus Group Discussion, Pokja Demografi Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, Lemhannas RI, Tahun 2015.

5 Djoharis Lubis, Dr, MSc. Program Nasional Terpadu Gerakan Pembangunan Kampung, Kemenko Kesra, Tahun 2012, Halaman 25

6 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Grand Design Pembangunan Kependudukan 2011 -2035, Jakarta, 2014, Halaman71

7 Ibid , Halaman 72

8 Ibid, Halaman 50

9 Ibid, Halaman 52

10 Ibid, Halaman 96

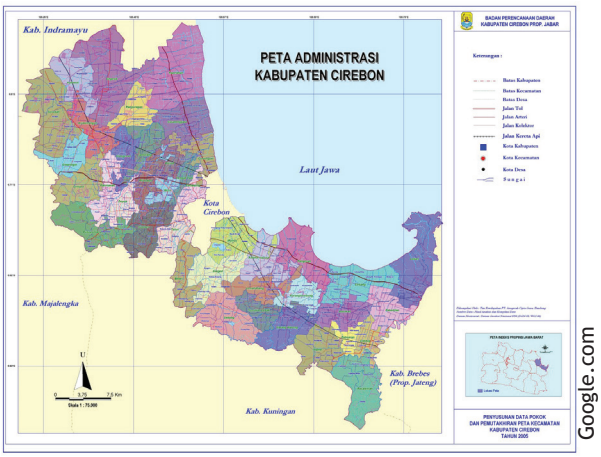

Pemahaman Otonomi Daerah

(Study Tentang Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon)

Sugianto[1]
Dosen Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati dan Peserta PPRA LIV Lemhannas RI

Abstrak

Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca reformasi 1998. Banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong pemerintah untuk secara sungguh-sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekwen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring berdirinya republik Indonesia ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota di Wilayah III Cirebon, dan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota di Wilayah III Cirebon. Metode dalam penelitian disertasi ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan pendekatan ilmu hukum yang mengenal tiga lapisan ilmu hukum (rechtleer) yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum dan kepustakaan (library research) dengan teknik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan daerah Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon (Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka) mampu melaksanakan otonomi daerah berdasarkan tingkat keberhasilan dengan baik sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 18 UUD 1945 amandemen ke II bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

PENDAHULUAN

Gelombang perubahan yang melanda Indonesia pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru, membuka wacana dan gerakan baru di seluruh aspek kehidupan masyarakat, tak terkecuali dalam dunia pemerintahan. Semangat yang menyala-nyala untuk melakukan reformasi, bahkan cenderung melahirkan euphoria, memberikan energi yang luar biasa bagi bangkintya kembali wacana otonomi daerah, setelah hampir sepertiga abad ditenggelamkan oleh rezim otoritarian Orde Baru dengan politik *stick* and *carrot*-nya (Sri Budi Santoso : 2000). Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota.

Marsdiasmo (1999), menyatakan bahwa tuntutan seperti itu adalah wajar, paling tidak untuk dua alasan. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah. Kedua, tuntutan pemberian otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era *new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa akan datang. Dalam sejarah perkembangannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia mengikuti pola seperti pada bandul jam yaitu beredar antara sangat sentralistik dan desentarlistik. Apabila kebijakan yang dilaksanakan sangat sentralistik maka bandulnya akan ditarik kembali kepada arah titik keseimbangan desentralistik demikian pula sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dengan mengikuti perkembangan pelaksanaan otonomi daerah melalui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sejak dari UU nomor 1 tahun 1945 sampai dengan sekarang UU Nomor 23 tahun 2014.

Otonomi Daerah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang di amanatkan Undang-undang. Desentralisasi itu sendiri setidak-tidaknya mempunyai tiga tujuan. Pertama, tujuan politik, yakni demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tataran infrastruktur dan suprastruktur politik. Kedua, tujuan administrasi, yakni efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, transparan serta murah. Ketiga, tujuan social ekonomi, yakni meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat (Sadu Wasisitiono;2003). Dalam pasal 18 UUD 1945 amandemen ke II, dikatakan bahwa, "Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang,

Pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilakukan dengan cara memberikan kewenangan penuh pada daerah kabupaten/kota hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 UUD 1945 amandemen kedua, yaitu;

1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, daerah Kabupaten/Kota, mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota dapat mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan

daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturanlain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang.

Dalam Pasal 18 ayat (1) sampai (7) UUD 1945 tersebut pelaksanaannya ditetapkan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam proses pembentukannya mengalami 8 (delapan) kali perubahan yaitu sebagai berikut: UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999 ,UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah menjadi UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai implementasi terhadap Pasal 18 UUD 1945 Amandemen ke II menjelaskan bahwa daerah kabupaten/kota harus mempunyai kebebasan dan kemandirian dalam melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Adapun prinsip-prinsip yang penting dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah menjadi UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain: (1) Prinsip otonomi yang seluas-luasnya, (2) Prinsip otonomi yang nyata, (3) Prinsip otonomi yang bertanggungjawab.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diamanatkan UUD NRI 1945, Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system NKRI. Dalam hal ini sebagai implementasi otonomi daerah di Indonesia ada tujuh isu strategis, yaitu: 1) Kesejahteraan penduduk; 2) Pelayanan publik; 3) Pemberdayaan masyarakat; 4) Peran serta masyarakat; 5) Daya saing daerah; 6) Demokrasi; 7) Pemerataan dan keadilan.

Di dalam Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 ada beberapa urusan pemerintah yang tidak menjadi urusan Pemerintahan Daerah YANG MENJADI KEWENANGAN Pemerintah Pusat yaitu: 1) Politik Luar negeri; 2) Pertahanan; 3) Keamanan; 4) Yustisi; 5) Moneter dan Fiskal Nasional; serta 6) Agama. Diluar 6 (enam) bidang tersebut menjadi urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang didesentralisasikan dalam rangka pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ada 2 yaitu urusan Pemerintahan Absolut dan urusan Pemerintahan Kongkoren , urusan pemerintahan Umum yang diserahkan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota harus disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana prasarana

serta kepegawaian sesuai urusan yang di desentralisasikan. Dalam UU no 23 th 2014 pasal 12 ayat 1 " Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota merupakan urusan yang ada dalam skala Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Pelayanan dasar yaitu : 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan umum & Penataan Ruang; 4) Perumahan umum & Kawasan Pemukiman, Ketertiban umum, ketentraman; 5) perlindungan masyarakat,)dan 6) sosial. Pada pasal 12 ayat 2 (dua) ada Urusan wajib yang tidak ada keterkaitan dengan Pelayanan Dasar ada 18 (delapan belas) dan urusan lainnya yang diamanatkan oleh peraturanperundang-undangan. Pemberian otonomi luas kepada daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahtraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi kata kunci pelaksanaan otonomi daerah, karena semangat dari otonomi adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang selama pemerintahan orde baru lebih bercorak senralistik (pusat). Dalam kerangka itulah seharusnya pelaksanaan otonomi daerah di pahami oleh pemerintah daerah, bukan malah memindahkan kekuasaan politik pemerintah pusat (*Jakarta minded*) ke daerah sehingga muncul raja-raja kecil (berkuasa di daerah) dengan keinginan untuk dilayani dan menumpuk kekayaan pribadi

Berdasarkan hal itu, perlu dikaji sejauh mana pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota di Wilayah III Cirebon yang diamanatkan dalam Undang-Undang, dimana Bupati/Walikota sebagai kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bersama DPRD harus mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan cara berkompetisi menggali potensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tujuan untuk mewujudnya kesejahteraan masyarakatnya. Tentunya harus melakukan politik *action* sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota. Hal tersebut belum bisa dilakukan pemerintah daerah karena adanya pengaruh pemeritah pusat masih kuat, selama ini daerah kabupaten / kota mengedepankan *politik will* semata.

PEMBAHASAN

Tingkat Keberhasilan Daerah Kabupaten/ Kota di Wilayah III Cirebon dalam Pelaksanaan desentralisasi dan Otonomi Daerah

Tingkat keberhasilan daerah kabupaten/kota di wilayah III Cirebon dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dalam konstitusi NKRI menurut UUD NRI 1945 terdapat dua nilai dasar yang dapat dikembangkan yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris dapat diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara RI. Dalam konteks Pasal 18 UUD NRI 1945, selalu harus diperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan kebutuhan memperkuat kesatuan nasional. Oleh sebab itu ciri-ciri umum penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia menurut UUD NRI 1945 adalah

Kesatuan pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan oleh pemerintah, bahkan dapat dihapus oleh Pemerintah melalui proses hukum.

Dalam rangka desentralisasi, di wilayah Indonesia dibentuk daerah provinsi dan

daerah provinsi dibentuk daerah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom.

Sebagai konsekuensi dalam butir I dan II, maka kebijakan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah sedangkan penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah bersifat tergantung (dependen) dan hierarki (subordinat). Hal ini berbeda dengan hubungan antara hubungan antara negara bagian dengan pemerintah federal yang menganut prinsip federalisme yang sifatnya independen dan koordinatif.

Penyelenggaraan desentralisasi menuntut persebaran urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom sebagai badan hukum publik.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan asas desentralisasi ada sebagian wewenang atau yang menjadi urusan pemerintahan pusat telah dilimpahkan atau diserahkan menjadi kewenangannya daerah. Dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi adalah penyerahan sejumlah kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

Akan tetapi untuk melaksanakan otonomi daerah dalam bingkai kesatuan NKRI tentunya tidak lepas dari tiga asas yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan (*medebewind*). Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. Tugas pembantuan, sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Permasalahan mengenai daerah tidak dapat dilepasakan dari peran hubungan penyelenggaraan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks NKRI. Bila merujuk pada UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Istilah otonomi daerah dan desentralisasi sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Istilah daerah lebih cenderung berada pada aspek politik kekuasaan negara (*political aspect*), sedangkan desentralisasi lebih cenderung berada dalam administarasi aspek (*administrative aspect*). Sebaiknya, bila dilihat dari *sharing of power* (kerja sama dalam pelaksanaan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan daerah), kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan.

Subtansi Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Perundang-undangan tertentu sebagai peraturan pelaksana terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah di rubah menjadi UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa peraturan pelaksana tersebut wajib dibuat sebagai implementasi dari UU tentunya merupakan hal yang wajib disiapkan oleh badan yang berwenang membuatnya. Jika

peraturan pelaksana tersebut tidak di buat, hal tersebut tidak dapat diberlakukan secara efektif.

Pentingnya pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan telah disadari oleh pembuat Undang-Undang, dalam hal ini yang ditegaskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 7 ayat (1) Hierarki Peraturan Perundang-undangan meliputi sebagai berikut UUD NRI1945, TAP MPR , Undang-Undang atau Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Macam dan jenis peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dalam Pasal 132 ayat (1) adalah bahwa pelaksanaan sebagai tindak lanjut Undang-undagng ayat 1 menyatakan "ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut UU ini sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun sejak UU ini ditetapkan .

Kesiapan Daerah Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Otonom Daerah

Adanya kewenangan yang diberikan begitu luas oleh pemerintah pusat kepada daerah Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon (Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka) dalam rangka otonomi daerah yang diamanatkan UU Nomor 23Tahun 2014 sebagai pengganti dari UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun di sisi lain, bahwa dengan otonomi daerah, kemandirian daerah Kabupaten/Kota tersebut belum maksimal dalam melaksanakan kewenangannya masih rentan adanya intervensi dari pemerintah pusat, salah satunya terbukti daerah Kabupaten/Kota tersebut belum mampu menggali potensi yang ada di daerahnya sesuai kewenangan yang telah didesentralisasikan.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah di rubah menjadi UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1), PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembagian kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Di samping itu, untuk melaksanakan permasalahan tersebut sebaiknya daerah kabupaten/kota melakukan *politik action*. Hal tersebut bisa dilakukan tergantung kepala daerah bersama DPRD walaupun masih adanya pengaruh pemerintah pusat terhadap kebijakan.

Namun, setiap daerah Kabupaten/Kota di wilayah III Cirebon dengan jumlah penduduk kurang lebih 6.344.068 jiwa mengedepankan peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) secara bertahap dan ditetapkan pemerintah. Urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon yang wajib dilaksanakan sesuai urusan wajib yaitu berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu upaya pendekatan penyelenggaraan pelayanan publik dengan kewenangan yang dimiliki bahwa pemerintah daerah dituntut mampu untuk meningkatkan daya jangkau masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Salah satunya menggunakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik diantaranya yaitu bidang kesehatan, bahwa penurunan angka

kematian bayi menjadi salah satu indikator peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan.

Pencapaian pelayanan di bidang pendidikan merupakan salah satu indikator kinerja daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang diamanatkan di dalam Pasal 31 UUD 1945 "bahwa setiap warga negara berhak terhadap pendidikan" baik di daerah kabupaten/kota bahwa peningkatan bidang pendidikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

Pencapaian pelayanan dibidang daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituntut untuk mengangkat masyarakat dari keterpurukan walaupun dalam pencapaiannya ketika dibandingkan dengan pelayanan lainnya tidak mengalami kenaikan secara signifikan atau fluktuatif.

Dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah Sementara (PADS), setiap daerah kabupaten/kota di wilayah III Cirebon berbeda. Di samping itu, sesuai PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota di samping mendapat realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB), Surat Kendaraan Bermotor (SKB), Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB), dan APBN. Hal ini akan menjadi target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun setiap daerah kabupaten/kota di wilayah III Cirebon mempunyai potensi unggulan yang berbeda diluar kontek organisasi perangkat daerah (OPD) dan Lembaga teknis daerah, misalnya Kabupaten Kuningan selain sektor obyek pariwisata dan sumber mata air, Kabupaten Indramayu adanya sumber migas (Minyak Gas) Pertamina Balongan, Kota Cirebon sebagai kota perdagangan dan jasa, Pelabuhan dan BAT, Kabupaten Cirebon adanya transportasi jalan tol. Walaupun potensi ke empat (4) daerah tersebut merupakan vertikal, namun daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk menggali kontribusi dalam rangka pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sementara (PADS) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tiap daerah kabupaten/kota di wilayah III Cirebon ada peningkatan secara signifikan dari setiap Tahun anggaran. Hal ini didasarkan atas adanya pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib bagi daerah kabupaten/kota meliputi: peningkatan pendidikan dasar, penyelenggaraan kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, serta daya beli, dan prasarana lingkungan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah kabupaten/kota. Sehingga menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat memberikan harapan baru bagi daerah kabupaten/kota, dimana dengan pelaksanaan otonomi ini diharapkan potensi-potensi daerah Kabupaten/Kota dapat tergali dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya agar lebih meningkat. Akan tetapi, ketika dilihat dari tingkat keberhasilan yang belum maksimal terhadap potensi daerah masing-masing dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, hal ini tidak mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Mengenai kualitas aparatur pemerintah daerah yang handal dan berbobot, J. Kristiadi sebagaimana yang dikutip oleh S.H. Sarundajang, memberikan tolok ukur penilaian dengan cara memberikan ciri-ciri di dalam melakukan tugas sebagai aparatur pemerintah daerah, yaitu:

Tanggung gugat yaitu berkenaan dengan meningkatnya kesadaran tentang keinginan dari aparatur negara untuk memberikan pertanggung jawaban (accountability) dan kewenangan memegang tanggung gugat. Dalam hal ini aparatur negara harus bertindak, tetapi dalam cara bertindak harus dapat mempertanggung jawabkan kewenangannya.

Transparan (keterbukaan) bertalian dengan keinginan menyelenggarakan administrasi negara yang terbuka dan mudah dijabarkan yangt berlandaskan konstitusional dan keabsahannya, dan apalagi era sekarang yang bertepatan dengan pelaksanaan otonomi daerah adanya Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Imformasi Publik, Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi emerintahan harus transparan dan aquntabilitas.

Efisien dan Efektip, yaitu berhubungan dengan kemampuan yang tinggi untuk mengoptimalkan kemanpaatan segala sumber daya yang ada baik sumber daya manusia (SDM), Sumber daya Keuangan, serta Potensi sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan yang maksimal.

Partisipatif, jaminan perorangan, kelompok atau kesatuan masyarakat di dalam masyarakat keseluruhan telah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyatakan keinginan-keinginan dan harapan-harapan mereka terhadap pemerintah.

Bersih, dalam arti prilaku seluruh aparatur negara dapat di pertanggung jawabkan baik di lihat dari segi peraturanperundang-undangan, moral serta sikap tindak tanduknya dalam melaksanakan tugas negara.

Walaupun daerah Kabupaten/Kota dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, bahwa Pemerintah daerah harus mempunyai sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya keuangan yang memadai, namun jika tidak di tunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai, maka aktipitas pemerintah akan berjalan tersendat-sendat dengan sendirinya.

Dampak Pelaksanaan Otonomi Daerah kabupaen/kota Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Terhadap Keutuhan NKRI

Kata “dampak“ dalam tulisan ini dimasukkan sebagai “akibat hukum”, artinya akibat hukum dari pelaksanaan terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap keutuhan NKRI.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilacak dalam kerangka Konstitusi NKRI, dalam UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain didalamnya yang bersifat negara. Artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara RI tidak akan terbagi pada kesatuan-kesatuan pada pemerintahan regional atau lokal.

Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang bersifat pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan di daerah bersangkutan. Di samping itu, ada beberapa hal yang menjadi

kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter da fiscal nasional serta agama (Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014) dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut, maka diperlukan pengaturan yang sistematis yang menggambarkan adanya hubungan berjenjang baik yang berhubungan dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan. Dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) bahwa pembagian urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan atau susunan pemerintahan.

Dalam memberikan otonomi untuk pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, ada tiga hal yang perlu pertimbangkan yaitu:

Akuntabilitas; bahwa penyerahan urusan tersebut akan menciptakan akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Ini berarti bagaimana mendekatkan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Makin dekat unit pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat akan makin mendukung akuntabilitas.

Efisiensi; bahwa penyerahan urusan tersebut akan menciptakan efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam penyelenggaraannya. Ini berkaitan dengan *economies of scale* (skala ekonomis) dalam pemebrian pelayanan tersebut. Untuk itu harus terdapat kesesuaian antara skala ekonomis dengan *catchment area* (daerah pelayanan). Persoalannya adalah sejauh mana skala ekonomis tersebut sesuai dengan batas-batas wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang sudah ada. Makin luas wilayah pelayanan yang diperlukan untuk mencapai skala ekonomis akan makin tinggi otoritas yang diperlukan. Bandara dan pelabuhan yang menangani antar provinsi adalah menjadi tanggung jawab nasional.

Eksternalitas; dampak yang ditumbuhkan oleh kegiatan yang memerlukan pelayanan tersebut. Eksternalitas sangat terkait dengan akuntabilitas. Makin luas eksternalitas yang ditimbulkan akan makin tinggi otoritas yang diperlukan untuk menangani urusan tersebut. Contoh, sungai atau hutan yang mempunyai eksternalitas regional seyogyanya menjadi tanggung jawab provinsi untuk mengurusnya.

Konsekuensi dari pendekatan tersebut adalah bahwa untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat dasar (*basic services*) maupun pelayanan-pelayanan untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat atas pertimbangan efisiensi, akuntabilitas dan eksternalitas yang bersifat lokal seyogyanya menjadi urusan kabupaten/kota, yang bersifat lintas kabupaten/kota menjadi urusan propinsi dan yang lintas propinsi menjadi kewenangan pusat.

Dalam setiap kebijakan atau keputusan yang diambil pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Begitu juga dengan penerapan sistem desentralisasi ini, memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan.

Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentalisasi ini yaitu pemerintah daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Dengan demikian, apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 21 hurup f ”daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dengan semangat otonomi daerah untuk menggali potensi sumber daya alam dengan tujuan untuk mensejahtrakan masyarakat, yang salah satunya yaitu menggali potensi yang ada yaitu untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagaimana telah diamanatkan oleh Deklarasi Rio dan Agenda 21, bahwa pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas merupakan salah satu pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Selai itu srategi ini dapat membawa efek positif secara ekologi dan sosial.

Dalam hal ini masyarakat merindukan adanya suatu kemandirian yang diberikan kepada daerah untuk berusaha mengembangkan sumber daya alam yang mereka miliki, karena mereka lebih mengetahui hal-hal apa saja yang terbaik bagi daerah. Disamping itu dengan tidak menutup mata ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan adanya penerapan sistem desentralisasi membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah untuk melakukan praktik-praktik penyelewengan bahkan sampai korupsi.

Segi Sosial Budaya

Budaya adalah salah satu yang diamanatkan dalam kesatuan kehidupan Republik Indonesia artinya bahwa dengan adanya budaya maka akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintah daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan diperkenalkan kepada daerah lain. Yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut.

Segi Keamanan dan Politik

Didalam segi keamanan politik, dengan adanya sistem desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan negara Indonesia, karena dengan diterapkannya kebijakan ini akan bisa meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Tetapi juga disatu sisi otonomi daerah berpotensi menyulut konflik antar daerah.

Segi Pelayanan Pemerintah

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi UU no 23 th 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf ”M” bahwa pelayanan merupakan kunci utama dalam konteks otonomi daerah, harus mengedepankan pelayanan prima pada masyarakat yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Imformasi Publik, bahwa masyarakat wajib mengetahui mekanisme pelayanan yang diberikan pemerintah tentunya harus secara transparan.

Dampak Pelaksaaan Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, bahwa ada 5 dampak otonomi daerah menurut Sumaryadi yaitu :1) semangat ke daerah yang tidak terkendali; 2) politisasi aparat pemerintah yang dapat mematikan mekanisme yang sehat sehingga menghambat terciptanya *good governance*, DPRD dan Kepala daerah lebih banyak berorientasi pada kepentingan

partai dari pada kepentingan masyarakat,) terbukanya pintu yang lebar bagi terjadinya kolusi antara eksekutif dan legislatif; 3) rendahnya kualitas DPRD; 4) pengawasan keuangan daerah yang timpang, 5) konflik antar daerah.

Identifikasi dampak pelaksanaan otonomi daerah tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa banyak dampak negatif yang perlu diminimalisasi. Esensi kebijakan yang ada perlu dilakukan adalah merasionalisasi proses kebijakan UU tentang otonomi daerah, baik proses pengusulan kemandirian yang dilakukan oleh daerah kabupaten/kota, maupun proses penetapan daerah otonom yang dilakukan ditingkat pusat. Dalam uraian berikut ini, kita akan memahami proses dalam dua tingkatan tersebut yang akan membawa kita pada usulan rasionalisasi proses kebijakan otonom demi optimalisasi kepentingan publik.

Dampak Sosio Kultural

Pelaksanaan otonomi daerah membawa implikasi positif dalam bentuk pengakuan sosial, politik dan kultural masyarakat daerah. Melalui kebijakan otonomi daerah entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, memperoleh pengakuan sebagai daerah otonom baru. Pengakuan ini pada gilirannya memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan daerah terhadap pemerintah nasional.

Namun demikian, kebijakan otonomi daerah juga bisa memicu konflik yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah horisontal dan vertikal dalam masyarakat. Sengketa antara pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas wilayah, seringkali berimplikasi pada ketegangan antar kubu masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

Dampak Pada Pelayanan Publik

Kebijakan otonomi daerah mampu memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya. Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayanan baru, seperti pelayanan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah otonom.

Tetapi, pelaksanaan otonomi daerah juga menimbulkan implikasi negatif bagi pelayanan publik, terutama pada skala nasional, terkait dengan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang berkurang. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan belanja aparat dan infrastruktur pemerintahan lainnya yang bertambah dalam jumlah yang signifikan sejalan dengan pembentukan DPRD dan birokrasi di daerah hasil otonom.

Dampak Bagi Pembangunan Ekonomi

Pasca terbentuknya daerah otonom baru, terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik dan infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonom baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil otonom untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Namun, kemungkinan akselerasi pembangunan ini harus dibayar dengan

besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja operasional pemerintahan daerah. Dari sisi teoritik, belanja ini bisa diminimalisir melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang menjangkau seluruh wilayah, sehingga akselerasi pembangunan ekonomi tetap dimungkinkan dengan harga yang murah. Namun, dalam perspektif masyarakat daerah, selama ini tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pemerintah nasional akan melakukannya tanpa kehadiran pemerintah daerah otonom.

Dampak Bagi Pertahanan, Keamanan dan Integrasi Nasional

Pembentukan daerah otonom baru, bagi beberapa masyarakat pedalaman dan masyarakat di Wilayah perbatasan merupakan isu politik nasional yang penting. Bagi masyarakat tersebut, bisa jadi mereka tidak pernah melihat dan merasakan kehadiran 'Indonesia', baik dalam bentuk simbol pemerintahan, politisi, birokrasi dan bahkan kantor pemerintah. Pemekaran daerah otonom, oleh karenanya, bisa memperbaiki kenangan politik nasional di daerah melalui peningkatan dukungan terhadap pemerintah nasional dan menghadirkan pemerintah pada level yang lebih bawah.

PENUTUP

Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota di wilayah III Cirebon menunjukan telah tercapainya tingkat keberhasilan dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945 amandemen ke II jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tingkat keberhasilan tersebut untuk mempercepat terwujudnya kesejahtraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar yaitu penyelenggaraan pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal (daya beli masyarakat), prasarana lingkungan dasar, pemberdayaan serta peran masyarakat sebagai wujud keberhasilan tersebut dapat dilihat dari aspek peningkatan PADS dan APBD serta peningkatan IPM.

Sementara itu, pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota di wilayah III Cirebon belum sepenuhnya menjiwai (mewujudkan) pemahaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai implementasi terhadap Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 Amandemen ke-II, karena pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya tersebut belum terlihat adanya kemandirian. Tidak berdampak apapun, sebaliknya justru dengan pelaksanaan otonomi daerah yang ditegaskan dalam pasal 18 UUD 1945 amandemen ke II akan memperkokoh terhadap keutuhan NKRI. Karena pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya ditekankan pada daerah kabupaten/kota.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Gafar Syaukani,dan R.Rasyid,"Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2004

A. Hamid Attamimi,"Peraturan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta. 1990

Agus Dwiyanto, dkk."Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia".Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM.2001

Agus Salim Andi Gadjong."Pemerintahan

Daerah Kajian Politik Dan Hukum". Bogor : Ghalia Indonesia. 2007

Ahmad Yani, "Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah", Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.

Alien, H.JB,"Enhancing Decentralisation for Developemnt", The Hague:IULA. Bina Aksara.1982

Amrah Muslimin, "Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah", Alumni Bandung Tahun 1986.

_____"Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958, Penerbit Djambatan, Jakarta. 1960.

Anhar Gonggong (ed), Pasang Surut Otonomi Daerah-Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Institute for Local Development, Jakarta. 2005

APAKSI, 2001,"Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.25 Tahun 1999",Jakarta, APKSI.

Ateng Syafruddin, "Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya". Bandung: Mandar Maju. 1991

Ateng Syafrudin, "Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD", Tarsito. Bandung: Tahun 1982.

Ateng Syafrudin,"Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah", PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung. 1993

Ateng Syafrudin. "Pasang Surut Otonomi Daerah". Bandung: Binacipta. 1985

---

1 Dr. Sugianto, S.H.,M.H. adalah dosen pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan pangkat Lektor Kepala. Sugianto pernah mengikuti seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi RI tahun 2013 dan tahun 2014. Ia aktif menjadi pembicara dalam berbagai seminar di Cirebon dan menjadi saksi ahli Polres Cirebon.

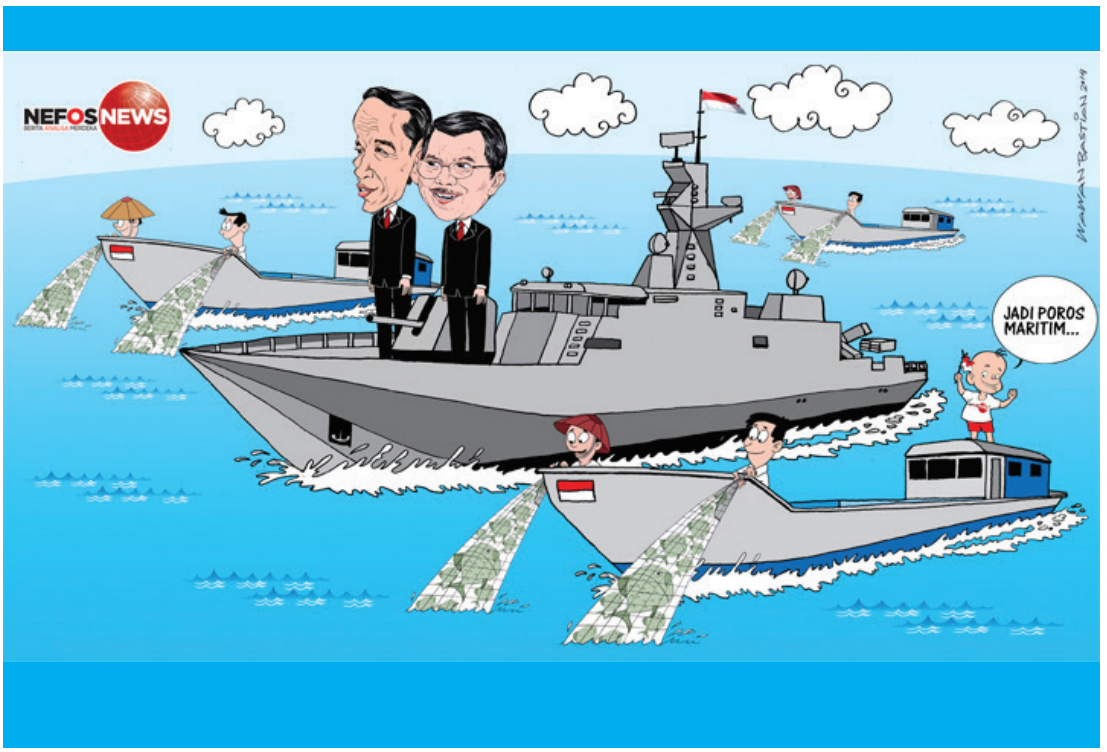

Membangun Paradigma Poros Maritim Dunia

Fahmi Irhamsyah[1]
Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Pendidikan Sejarah dan Alumni Program Studi Sarjana Pendidikan Sejarah
Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Abstrak

Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo merupakan kebijakan yang disambut publik dengan antusias sekaligus waswas dalam pengimplementasiannya. Jurnal ini ditulis dalam rangka mengimplementasikan kebijakan maritim dalam bidang pendidikan sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Perspektif keilmuan yang digunakan adalah Ilmu Sejarah dengan landasan lintas batas ilmu sosial yang digagas oleh Immanuel Wallerstein.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di bumi sehingga memiliki potensi menjadi poros maritim dunia. Secara konseptual, poros maritim dunia sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur merupakan sebuah gagasan sangat strategis dalam rangka menjamin keberlangsungan konektifitas lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Poros maritim dunia juga berdampak pada pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut dan keamanan maritim. Apakah ekspektasi yang tinggi ini sesuai dengan jati diri bangsa?

Sejarah memberikan informasi pada kita bahwa jati diri bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa pelaut, bangsa yang memiliki kemampuan luar biasa dari sisi kemaritiman. Keputusan pengambilan isu poros maritim dunia dalam konteks kebijakan publik bukanlah hal yang berlebihan. Karena dalam konteks kesejarahan, masyarakat Indonesia memiliki potensi kemaritiman.

Tulisan ini akan mencoba melihat kekuatan maritim Indonesia dengan pendekatan Lintas Batas Ilmu Sosial yang di gagas oleh Immanuel Wallerstein.[1] Sebab penulis yakin jika reorientasi paradigma[2] dapat dilakukan, dalam beberapa tahun ke depan dunia maritim kita akan bisa bangkit kembali.

PEMBAHASAN

Sejarah Kemaritiman Indonesia

Nusantara sejak dahulu merupakan sebuah kawasan yang sangat dikenal oleh masyarakat dunia. Penelitian Kern serta Von Heine Geldern menjelaskan bahwa orang-orang Austronesia yang dikenal sebagai nenek moyang bangsa Indonesia telah menempati sebagian wilayah nusantara sejak ± 2000 tahun sebelum masehi atau tepatnya pada masa Neolitikum, masa ketika masyarakat belum mengenal tulisan dan kepercayaan.

Penelitian sejarah yang menganalisis perkembangan demografi masyarakat berdasarkan bahasa yang digunakannya memperlihatkan bahwa penutur bahasa Austronesia meliputi kawasan dengan batas-batas sebagai berikut : bagian barat di Madagaskar, bagian timur di Pulau Paskah, bagian utara di kepulauan Formosa dan bagian selatan berada di Selandia baru[3].

Daerah-daerah yang disebut di atas sesungguhnya merupakan suatu kawasan yang sangat besar dan dipisahkan oleh lautan yang amat luas. Maka bagaimana prosesnya hingga bahasa yang digunakan dapat tersebar seluas itu? Glover berpendapat bahwa ketercapaian penyebaran bahasa dalam wilayah cakupan yang amat luas membuktikan bahwa nenek moyang masyarakat Indonesia sejak masa Neolitikum telah memiliki budaya Maritim yang amat maju seperti : alat transportasi laut yang handal, pengetahuan yang cukup tentang laut dan angin musim, serta berbagai pengetahuan lainnya yang berfungsi sebagai alat bantu navigasi[4].

Selain berlayar, aktivitas perdagangan sejak masa sebelum Masehi pun sudah banyak ditemukan oleh para ahli. Heger mengemukakan bahwa terdapat kesamaan penggunaan alat musik Nekara di beberapa wilayah Asia seperti di Indonesia, India dan China[5]. Hal ini berarti semenjak sebelum Masehi pun lautan di nusantara telah memberikan banyak manfaat pada masyarakat, salah satunya adalah sebagai media hubungan dagang. Hubungan perdagangan ini pulalah yang menjadi salah satu penyebab bermunculannya kerajaan-kerajaan bercorak maritim yang di

kemudian hari memegang peranan penting selama berabad-abad.

Edward L Poelinggomang dalam Makassar Abad XIX; Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim menyebutkan bahwa sekitar abad ke-14 dan permulaan abad ke-15 terdapat lima jaringan perdagangan dunia (*commercial zones*). *Pertama*, jaringan perdagangan Teluk Bengal yang meliputi pesisir Koromandel di India Selatan, Sri Lanka, Burma (Myanmar), serta pesisir utara dan barat Sumatera. *Kedua*, jaringan perdagangan Selat Malaka. *Ketiga*, jaringan Laut Cina Selatan yang meliputi pesisir timur Semenanjung Malaka, Thailand, dan Vietnam Selatan. *Keempat*, jaringan perdagangan Laut Sulu, yang meliputi pesisir barat Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao, dan pesisir utara Kalimantan (Brunei Darussalam). *Kelima*, jaringan Laut Jawa, yang meliputi kepulauan Nusa Tenggara, kepulauan Maluku, pesisir barat Kalimantan, Jawa, dan bagian selatan Sumatera.

Berdasarkan data Edward, kita dapat menganalisis bahwa setelah Masehi pun nusantara masih mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dunia melalui potensi maritim yang kita miliki. Jaringan Laut Jawa yang ketika itu berada di bawah hegemoni kerajaan Majapahit bahkan merupakan salah satu jaringan terpadat dengan tingkat transaksi internasional sangat tinggi.

Laut, di masa Majapahit telah mengajarkan pada masyarakat dunia untuk memiliki pikiran lebih terbuka. Keberhasilan kerajaan berbasis maritim seperti Sriwijaya bahkan memicu kerajaan lainnya untuk menciptakan perahu[6] militer yang handal dan memiliki kemauan keras dalam mempelajari ilmu navigasi.[7] Beberapa hal ini pula yang kemudian menjadi salah satu faktor pemersatu berbagai pulau di nusantara[8].

Hal yang menyedihkan kemudian menimpa banyak kerajaan di nusantara sejak sekitar abad ke-15. Kemampuan militer yang memadai serta kemajuan ekonomi perdagangan maritim asimetris dengan konsep kemampuan menganalisis faktor ancaman disintegrasi.

Kehadiran kekuatan asing di nusantara tidak mampu direspon dengan baik, akibatnya berbagai kerajaan ketika itu sangat mudah disusupi politik *devide et impera*[9]. Alhasil, dengan mudahnya mereka menduduki wilayah nusantara dan berusaha untuk menjauhkan kehidupan masyarakat dari laut. Masyarakat tanpa sadar digiring untuk bertani dan kian lama aktivitas maritim kian mengecil.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh kekuatan asing, seperti Portugis, Inggris, dan VOC untuk ganti menguasai laut nusantara. Proses terdesaknya raja-raja ke pedalaman dan dikuasainya berbagai pelabuhan oleh asing mengakibatkan orientasi maritim kita secara perlahan diubah oleh penjajah menjadi orientasi agraria.

Afred Thayer Mahan (1840-1914) dalam *"The Influence of Sea Power upon History 1660-1783"* yang terbit pada tahun 1890 mengajak kita untuk memperhatikan kekuatan laut karena menurutnya lautan memiliki banyak sekali potensi yang dapat dioptimalkan. Tidak hanya itu saja, ia juga menyadarkan para pembacanya agar lebih menghargai laut karena lautlah yang sesungguhnya memegang peranan penting dalam proses penyatuan bangsa.

Buku inspiratif ini dikemudian hari menginspirasi banyak negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Prancis, Italia, Rusia, dan Spanyol untuk mengoptimalkan kekuatan lautnya[10]. Kita pun mampu melihat, sejak memasuki abad ke-19 negara-negara ini memang cukup berpengaruh dalam perpolitikan internasional.

Indonesia sebagai sebuah negara yang dua pertiganya berupa lautan sudah sejak lama menyadari besarnya potensi laut dan berbagai keuntungan yang dapat di gali dari laut. Dalam pembukaan Institut Angkatan Laut (IAL) tahun 1953 di Surabaya, Presiden Soekarno berpesan, *"... usahakan penyempurnaan keadaan kita ini dengan menggunakan kesempatan yang diberikan oleh kemerdekaan. Usahakan agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya..., bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekadar menjadi jongos di kapal... bukan! tetapi bangsa pelaut dalam arti cakrawati samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri "*.

Keseriusan Soekarno ketika itu dalam mengoptimalkan potensi laut sebenarnya dapat di lihat, tengoklah ketika pada tahun 1957 didirikan PELNI untuk menggantikan *Koninklikje Paketvaart Maatschappij* / KPM milik Belanda. Kita juga dapat menyaksikan ketika pada tahun 1960 di keluarkan Undang-undang No. 4 tentang Perairan Indonesia, dan yang lebih hebat lagi masih pada tahun yang sama Angkatan Laut Indonesia menjadi angkatan laut terkuat di Asia Tenggara dan terkuat ke empat di dunia di bawah Amerika Serikat[11] dengan komposisi 234 kapal perang terdiri dari sebuah kapal penjelajah (*cruiser*), 12 kapal selam, 7 kapal perusak (*destroyer*), 7 fregat, dan beberapa jenis kapal perang lain.

Soekarno ketika itu benar-benar mengoptimalkan militer berdasarkan konstelasi geografis[12]. Militer yang kuat ini pula lah yang kemudian mampu mengusir Belanda yang saat itu masih mempertahankan Irian Barat. Walaupun demikian, menurut penulis usaha tersebut masih belum optimal. Sebagai contoh, tengoklah PELNI yang hingga hari ini masih belum terlihat akan mampu menyaingi *Koninklikje Paketvaart Maatschappij* yang telah memberikan keuntungan besar pada Belanda.

Soeharto di masa kepemimpinannya, pada tahun 1996[13] dalam sebuah Konvensi Nasional Pembangunan Benua Maritim Indonesia yang diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan mengajak bangsa Indonesia untuk kembali ke laut. *"Bangsa Indonesia yang di masa lalu mencatat sejarah sebagai bangsa bahari, dalam perjalanannya telah kehilangan keterampilan bahari sehingga luntur pula jiwa maritimnya."* Demikian ungkap Presiden Seoharto dalam sambutannya yang disampaikan Menteri Negara Riset dan Teknologi BJ Habibie. Kalimat ini jelas merupakan kalimat yang menunjukkan kesadaran tinggi akan pentingnya laut.

Poros Maritim Dunia dan Potensi Maritim Indonesia

Presiden RI Joko Widodo dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 *East Asia Summit* (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, juga menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia.
2. Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.
3. Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan,

dan pariwisata maritim.

4. Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.
5. Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Poros maritim dunia yang digagas oleh Presiden RI Joko Widodo berupaya menegakkan kembali kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi program ini adalah melalui revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan. Presiden RI Joko Widodo menyatakan dalam KTT Asia Timur,"*Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa*".

Indonesia berada di daerah ekuator dan dihimpit oleh dua benua besar yaitu benua Asia dan Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Luas wilayah Indonesia sekitar 7.7 juta kilometer persegi. Luas ini terdiri atas 25 persen teritorial daratan (1,9 juta kilometer persegi) dan 75 persen teritorial laut (5,8 juta kilometerpersegi).

Jika sejenak kita mengkomparasikan bentangan daratan dan lautan kita, maka luas wilayah daratan ini sama dengan 57 kali luas negara Belanda, 5 kali luas Jepang, dan 2 kali luas Pakistan. Belum lagi jumlah pulau besar dan kecilnya yang mencapai 17.508 buah. Potensi besar ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan teritorial laut terluas di dunia dengan keseluruhan garis pantai sepanjang 80.791 km.[14]

Potensi yang besar ini tidak berdampak pada daya tarik masyarakat Indonesia untuk peduli pada laut. Perairan Indonesia dengan berbagai kakayaan alamnya hingga hari ini masih kurang dilirik, jangankan untuk mendalami sejarah Bahari. Sekedar berkunjung ke laut pun masyarakat sudah enggan, karena laut kini sudah tercemar oleh tangan-tangan kotor manusia yang tak bertanggung jawab. Lalu upaya ideal apakah yang dapat dilakukan untuk mendukung Indonesia menjadi Poros Maritim dunia?

Selain Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertahanan, Kementrian Pendidikan pun seharusnya turut berperan dalam pembangunan poros mariirim dunia. Sebab Kementrian Pendidikan memiliki akses yang sangat efektif dalam rangka mengkampanyekan urgensi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun keadaanya saat ini, Kementrian Pendidikan belum memiliki satu mata pelajaran khusus di tingkat sekolah dasar dan menengah yang secara substansi mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Bagaimana proses mengkaji suatu pembelajaran sehingga memiliki substansi kemaritiman dan berdampak efektif memunculkan generasi muda bangsa Indonesia yang unggul dan kompetitif dalam bidang kemaritiman. Mari kita mengkaji fenomena pengembangan keilmuan yang terjadi pada beberapa negara maju di dunia.

Pemikiran Immanuel Wallerstein tentang Lintas Batas Keilmuan

Bercampurnya sejarah dengan

mitos-mitos menimbulkan kekhawatiran tersendiri di kalangan ilmuwan. Karena sejarah yang identik dengan diakroniknya tidak mungkin dapat bersamaan dengan mitos-mitos yang tidak jelas batasan temporalnya bahkan cenderung irasional. Keadaan ini berdampak pada munculnya gagasan-gagasan baru untuk mendekati sejarah dengan pendekatan nomotetik seperti ilmu-ilmu Alam.

Gagasan nomotetik (menjadikan sejarah bersifat objektif dan universal) ternyata memiliki dampak tersendiri. Di kalangan ilmuwan, gagasan ini banyak dipertanyakan. Khususnya oleh kalangan postmodernis. Sebab menurut mereka, suatu hal yang tidak mungkin menjadikan sejarah bersifat objektif. Hal ini dikarenakan dalam khasanah keilmuwan, khususnya dalam ilmu-ilmu sosial tidak ada kebenaran tunggal (idiosinkretik). Gagasan nomotetik ini ternyata menyerang konstruksi disiplin ilmu sosial lainnya, dampaknya seperti yang kita temui dewasa ini, ilmu sosial terpilah ke dalam disiplin-disiplin ilmu. Sejarah, sosiologi, politik, antropologi, dll.

Dikotomi disiplin ilmu sosial seperti ini ternyata memunculkan permasalahan baru, ketika seorang mahasiswa sejarah menulis skripsi tentang kemiskinan masyarakat dengan sangat mendalam bahkan sampai membuat pembaca seakan-akan mengalami kemiskinan tersebut. Skripsi sang mahasiswa justru ditolak secara mentah-mentah. Karena dinilai oleh sang dosen, skripsi tersebut bukanlah skripsi sejarah[15], melainkan skripsi antropologi.

Kekhawatiran terhadap perkembangan ilmu telah menggugah seorang sejarawan bernama Immanuel Wallerstein untuk melakukan sesuatu. Kekhawatiran tersebut ia salurkan dengan mengajukan proposal penelitian pada *Calouste Gulbenkian Foundation*. Setelah yayasan tersebut mengamini gagasan Immanuel Wallerstein, selanjutnya sejarawan yang juga soiolog tersebut membentuk kelompok yang kemudian dikenal dengan nama komisi *Gulbenkian* terdiri atas Immanuel Wallerstein dari ilmu sejarah dan sosiologi yang bertindak sebagai ketua, Calestous Juma dari studi ilmu dan teknologi, Evelyn Fox Keller dari ilmu Fisika, Jurgen Kocka dari ilmu Sejarah, Dominique Lecourt, dari Filsafat, V.Y Mudimbe dari ilmu bahasa Romawi, Kinhide Mushakoji dari Ilmu politik, Ilya Prigogine dari ilmu kimia, peter J. Taylor dari geografi dan M. Rolph Trouillot dari antropologi.[16]

Komisi yang terdiri atas banyak ilmuwan kelas dunia dari berbagai latar belakang ilmu ini banyak melakukan kajian-kajian ilmiah, mereka coba melakukan dialog-dialog antar ilmu, termasuk antar kedua epistimologis (nomotetik dan idiosinkretik) tadi. Alhasil, dari dialog-dialog tersebut bermunculanlah studi - studi baru semisal studi kawasan yang mengkaji suatu wilayah dengan berbagai disiplin ilmu, studi gender dan banyak lagi. Bahkan ilmu-ilmu sosial baru pun terus bermunculan seperti sosiologi politik, sosiologi ekonomi, antropologi historis dll.

Proses Membangun Paradigma Maritim pada Pendidikan Dasar dan Menengah

Fakta bahwa peserta didik kurang memiliki *mind set* kemaritiman dikatakan oleh Son Diamar, anggota Dewan Kelautan Indonesia (Dekin). Menurutnya murid-murid sekolah kurang mengenal laut Indonesia karena sistem pendidikan yang tidak mau mengarah pada pengenalan terhadap potensinya yang luar biasa.

Apabila kita ingin studi komparasi dengan kurikulum negara lain, maka akan kita dapati bahwa laut menjadi salah satu kajian substansif dalam kurikulum sekolah. Peserta didik sejak sekolah dasar sudah

bisa mulai diperkenalkan dengan kekayaan laut Indonesia melalui lagu, peserta didik SMP sudah mulai bisa mengobservasi lautan dan tingkat SMA sudah mulai dapat membuat portofolio tugas sekolah dengan mengangkat isu dan masalah kelautan.

Apa yang telah dilakukan oleh Pelindo III sebagai BUMN yang bergerak pada bidang kepelabuhan patut diapresiasi, BUMN ini telah membuka diri mangedukasi peserta didik di kawasan Surabaya untuk memperkenalkan kekuatan maritim bangsa Indonesia. Peserta didik sekolah dasar diikutsertakan dalam kegiatan kunjungan ke pelabuhan Tanjung Perak.

Peserta didik diperkenalkan pada laut dengan cara berkeliling melihat berbagai aktifitas di pelabuhan sejak proses embarkasi dan debarkasi di terminal penumpang Gapura Surya Nusantara, menyaksikan proses penyandaran kapal Dobonsolo serta proses bongkar muat peti kemas.

Proses pembuatan kurikulum kemaritiman dapat melibatkan banyak pihak. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) bidang kelautan dan perikanan menurut Yugi Prayanto, wakil ketua KADIN bidang kelautan dan perikanan bahkan siap memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menciptakan kurikulum kemaritiman dan perikanan sebagai upaya mendorong Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Pendidikan juga sangat memungkinkan dalam membentuk sumber daya manusia kelautan yang handal. Karenanya pemerintah dapat mulai mencanangkan sekolah-sekolah tinggi yang bergerak dalam bidang maritim seperti bidang kelautan, perikanan, perkapalan, nautika serta perniagaan maritim.

Setelah peserta didik sejak dini mengikuti pembelajaran dengan kurikulum berbasis maritim maka diharapkan kelak mereka akan berkontribusi aktif dalam beberapa hal. Pertama, peserta didik kelak akan aktif dalam membangun sarana dan prasarana yang akan berdampak pada eratnya kepulauan Indonesia sebagai bagian dari menjaga stabiliitas nasional dari Disintegrasi. Kedua, mampu meningkatkan sumber daya Alam maupun manusia bidang kelautan dan ketiga mampu mengoptimalkan kekayaan laut untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Menggagas Kurikulum Kemaritiman Lintas Ilmu

Sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami implementasi poros maritim dunia dan dampaknya bagi kemajuan bangsa. Salah satu sarana efektif untuk memberikan penyadaran tersebut adalah melalui pendidikan. Kajian yang dapat dilakukan oleh kementerian pendidikan adalah melalui kajian lintas batas sebagaimana digagas oleh Immanuel Wallerstein.

Implementasi pemikirannya dapat diterapkan dengan mengajak akademisi (mahasiswa maupun ahli) dari berbagai disiplin ilmu yang relevan untuk mengkaji wilayah Bahari dengan model kajian kawasan. Dengan begitu, Bahari kita dapat di tinjau dari berbagai sudut pandang ilmu. Mulai dari Geografi, Biologi, Antropologi, Sejarah, Sosiologi, dll.

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat dikemas menjadi suatu produk baru dunia pendidikan yang berkesesuaian dengan visi-misi pemerintah menciptakan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Impelementasi hasil kajian dapat di eksplore melalui susunan kurikulum terpadu, misalnya dengan memasukkan bab baru dalam buku pelajaran sekolah.

Pada berbagai jenjang pendidikan, maka pemerintah dapat memasukkan bab-bab baru tentang kemaritiman. Sebagai contoh pelajaran biologi, dalam pelajaran ini dapat dimasukkan bab khusus tentang biota laut nusantara. Pada mata pelajaran geografi dapat dimasukkan bab khusus tentang geografi maritim. Dalam pelajaran sejarah, dapat dimasukkan bab khusus mengenai sejarah maritim. Dan sebagainya. Atau mungkin lebih dari itu, kajian poros maritim dunia dapat menjadi satu mata pelajaran baru di sekolah.

Dengan memperkenalkan kajian maritim kepada peserta didik sejak dini, diharapkan proses reorientasi paradigma dapat tercapai. Putera-puteri nusantara kelak diharapkan dapat memahami aspek kebaharian secara komperhensif dan holistik. Hal ini bisa terjadi jika kajian maritim dilakukan dengan langkah lintas batas disiplin ilmu.

PENUTUP

Poros maritim dunia merupakan gagasan strategis bagi bangsa Indonesia dalam meningkatkan harkat dan martabat di dunia internasional. Gagasan ini perlu didukung oleh seluruh pihak termasuk didalamnya kementrian pendidikan dan kebudayaan melalui kurikulum terpadu yang disesuaikan subtansinya dengan kepentingan geopolitik Indonesia.

Impelementasi kajian poros maritim dunia di sekolah dapat dilakukan melalui kajian lintas batas ilmu sebagaimana diperkenalkan oleh Immanuel Wallerstien. Gagasan ini kemudian perlu dikemas dengan baik menjadi sebuah pelajaran. Setelah peserta didik Indonesia memahami potensi maritim yang berada di Indonesia, diharapkan kelak menjadi bekal peserta didik ketika telah menjadi pemimpin Indonesia sehingga paradigma maritim terus terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Lapian, A.B, *Sejarah Nusantara Sejarah Bahari,* Depok : Universitas

Indonesia press, 1992

Glover, I.C, *Early Trade Between india and Southeast Asia*,

Hull : Koningstone, 1989

Wallerstein, Immanuel, *Lintas Batas Ilmu Sosial* , Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 1997

Wolters, G.W, *Early Indonesia Commerce : A Study of the Origins of Sriwijaya*, Ithaca, New York : Cornell University Press, 1967

---

1 Fahmi Irhamsyah, S.Pd adalah seorang guru sejarah sekaligus Kepala Kehumasan di Islamic Girls Boarding School Darul Marhamah. Selain aktivitas mengajar, Fahmi juga aktif dalam kegiatan *training* dan ceramah di berbagai institusi pendidikan. Sebagai organisatoris kampus, ia pernah menjabat sebagai Ketua BEM FIS UNJ Tahun 2007-2008, Kepala Departemen Sosial Politik BEM UNJ Tahun 2008-2009, dan Koordinator BEM Seluruh Indonesia Regional III Tahun 2009.

2 Immanuel Wallerstein bukanlah seorang pakar kelautan, bukan pula menteri kelautan ataupun menteri kebudayaan dan pariwisata. Ia hanya seorang sejarawan dan sosiolog. Pemikirannya menginspirasi penulis untuk coba mengaitkan kebaharian negeri ini dengan pendidikan.

3 Dari paradigma pembangunan kawasan darat ke maritim

4 Von Heine Geldren, *Pre Historic Research*

in Indonesia ; Annual Bibliography of Indonesia Archeology 9 (1936) hal. 27

5 I.C. Glover, *Early Trade Between india and Southeast Asia* (Hull: Koningstone, 1989) Hal. 93

6 G.W Wolters, *Early Indonesia Commerce : A Study of the Origins of Sriwijaya* (Ithaca, New York : Cornell University Press, 1967) Hal. 31

7 Menurut Soekmono dalam buku pengantar sejarah I hal. 80, perahu yang menjadi khas bangsa Indonesia adalah perahu bercadik.

8 Bukan hanya Ilmu navigasi saja, menurut Azzumardi Azra, laut dan perdagangan internasional jugalah yang kemudian membuka kesempatan pada muslim-muslim melayu (khususnya di masa kerajaan Islam) untuk belajar ilmu agama di timur tengah.

9 A.B Lapian, *Sejarah Nusantara Sejarah Bahari (*Depok : Universitas Indonesia press, 1992) Hal. 6

10 Di awali dengan kedatangan Portugis dan Spanyol, kemudian berturut-turut VOC, Belanda, Inggris dan Jepang mulai menggerogoti kekayaan nusantara.

11 Google. Artikel atas nama Beny Uleander, *Membangun (Kembali) Budaya Maritim*. Di akses 10 Maret 2008 pukul 3.24 PM

12 Sarwono Kusumaatmadja. Berdasarkan ceramah lisan untuk perwira siswa Angkatan XLIII pada tanggal 27 Juli 2005 di SESKOAL, Jakarta.

13 Laksamana Sumardjono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut

14 Tahun 1996 dicanangkan pula sebagai tahun Bahari.

15 Dinas Hidro Oseanografi TNI AL

16 Immanuel Wallerstein, *Lintas Batas Ilmu Sosial* (Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 1997) hal. v

17 *Ibid*. Hal. xiii-xvi

Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional Indonesia

Pandu Utama Manggala[1]
Mahasiswa Doktoral Diplomasi Maritim the National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Jepang dan Alumnus Program Gelar Master Ganda Australian National University (ANU) Australia
pandu.utama.manggala@gmail.com

Abstrak

The dynamics in international system has made states possess existential threats to their sovereignty. In order to survive in the anarchical world, states then, have to manage themselves with the identification of the upcoming threats and vulnerabilities. The need of having a national security strategy then rise.

Indonesia as well, has to define its national security strategy with the basic of real condition of its geopolitics area. However, contemporary Indonesia's national security strategy is seem to lose its view of the term national security and national threats. For the example, TNI (Indonesian National Army) couldn't define its role in guarding Indonesia's defense. The small allocation of defense budget also has made Indonesia's national security strategy been directed by that minim budget. These facts then, have laid Indonesia' national strategy in a wrong direction. This article will be focusing on the review of national security concept in order to search a better Indonesia's national security strategy. Furthermore, this article also will analyze several upcoming threats that must be identified by the Indonesia government and its citizen. Later, it will also purpose several recommendation to help Indonesia define its true national security strategy.

PENDAHULUAN

"Only in growth, reform, and change,

paradoxically enough, is true security to be found"

-Anne Morrow Lindbergh

Hubungan internasional kerap dipahami sebagai hubungan antaraktor dalam sistem internasional, baik itu aktor negara maupun aktor nonnegara yang berkutat dengan masalah *power politics*. Akibatnya, banyak negara yang mengejar *power* negaranya lewat kepemilikan kapabilitas militer yang kuat.[1] Banyaknya negara yang berusaha mendapatkan kekuatan militer atau persenjataan tersebut telah membuat kualitas ancaman yang dimiliki oleh negara terhadap negara lainnya semakin besar. Tidak adanya kepemerintahan dunia yang mampu mengatur pola hubungan antarnegara, membuat suatu negara harus dapat merumuskan strategi pertahanan negara yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi negara tersebut dalam dunia internasional yang dicirikan oleh sifat yang anarkis.

Strategi pertahanan negara tersebut harus dapat mencakup bagaimana cara mencapai tujuan keamanan dari suatu negara untuk menghadapi musuh yang akan mengancam *security* dari negara. *Security* atau keamanan sendiri adalah konsep yang digunakan untuk menghadapi ancaman. *Security* adalah tentang kelangsungan hidup, dimana suatu isu dihadirkan sebagai sesuatu yang dapat memberikan *existential threat* kepada *referent object*.[2] Secara tradisional, konsep ini mempunyai dua arti pokok, yaitu kebebasan dari resiko atau bahaya, serta kebebasan dari keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan.[3] Dengan memiliki kepahaman mengenai konsep *security*, maka suatu negara tidak akan dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting, dan menemukan cara untuk membangun relasi dengan negara lain yang dapat menghindarkannya dari terjadinya perang. Dan bahkan, jika perang terjadi pun negara tersebut akan memiliki peluang yang lebih besar untuk keluar sebagai pemenang karena telah bisa mengenali ancaman potensialnya.

Selain hal diatas, satu konsep berikutnya yang dapat digunakan untuk dapat menganalisa pembuatan strategi pertahanan negara yang baik adalah konsep *grand strategy*. Peran *grand strategy* menurut Liddel Hart adalah mengkoordinasikan dan mengarahkan seluruh sumber daya bangsa untuk dapat mengenali ancaman yang ada, baik itu ancaman yang berasal dari lingkungan luar (*threat*), atau ancaman yang berasal dari lingkungan nasional (*vulnerabilities*).[4] Identifikasi terhadap sumber-sumber ancaman tersebut kemudian dapat menjadi suatu acuan dalam merumuskan strategi pertahanan suatu negara yang tepat.

Indonesia, sebagai salah satu entitas negara yang berada dalam sistem internasional kontemporer kemudian juga harus dapat merumuskan suatu strategi pertahanan yang dapat melindungi kepentingan nasional yang dimilikinya. Strategi pertahanan nasional Indonesia bisa dimulai dengan membangun kapabilitas pertahanan, yang memadukan antara profesionalisme pengawak pertahanan negara dan memberdayakan perumus kebijakan dan seluruh warga negara, agar dapat memandang reformasi pertahanan secara jernih, berdasarkan dimensi ancaman yang dihadapi.[5] Namun, arah perumusan strategi pertahanan yang dimiliki Indonesia hingga kini masih terjebak dalam romantisme zaman perjuangan dulu, sehingga masih menemui kegagalan dalam mencari strategi pertahanan dan keamanan nasional yang baik dan cocok untuk Indonesia.

Tulisan ini berupaya untuk mengelaborasi strategi pertahanan dan keamanan nasional Indonesia, dan berupaya mencari letak kesalahan dalam perumusannya. Penulis juga akan berusaha meninjau konsep keamanan nasional Indonesia. Setelah itu akan turut dijabarkan mengenai bentuk ancaman dan potensi tantangan yang akan dihadapi Indonesia dewasa ini. Namun, sebelum beralih kepada tinjauan terhadap konsep keamanan nasional Indonesia, ada baiknya untuk menengok sekilas mengenai sejarah strategi pertahanan nasional Indonesia.

PEMBAHASAN

Sekilas Mengenai Sejarah Strategi Pertahanan Indonesia

Sebagaimana telah disebutkan diawal, bahwa perumusan strategi pertahanan nasional Indonesia yang ada saat ini masih terpengaruh oleh romantisme sejarah perjuangan kemerdekaan. Titik sentral dalam strategi pertahanan Indonesia bertumpu pada kekuatan darat. Hal ini disebabkan oleh pengalaman perang di masa lalu yang didominasi oleh perang internal lewat adanya berbagai operasi penumpasan gerakan dan separatisme bersenjata di beberapa daerah Indonesia.

Berdasarkan sejarahnya, keterlibatan kekuatan bersenjata Indonesia dapat dikelompokkan menjadi: Perang Kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945-1949, perang menghadapi separatisme pada tahun 1950an, perebutan Irian Barat tahun 1960-1969, aneksasi Timor Timur semenjak tahun 1976 hingga 1999, dan perang untuk menghadapi separatisme dari tahun 1980an sampai 2005.[6] Dari gambaran peristiwa historis perang yang dilakukan oleh Indonesia diatas kemudian akhirnya membawa strategi pertahanan Indonesia mengandalkan konsepsi pertahanan landas darat.

Strategi pertahanan Indonesia yang mengandalkan konsepsi landas darat ini kemudian dapat dilihat sebagai kegagalan dalam merumuskan suatu strategi pertahanan yang tepat bagi Indonesia. Konsepsi Indonesia sebagi Negara Nusantara sebenarnya mengacu kepada konsepsi Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) sebagaimana dimuat dalam Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 dan UU No, 4/ Prp. 1960.[7] Dengan adanya konsepsi ini, seharusnya *mind-set* strategi pertahanan Indonesia juga menyadari pentingnya wilayah perairan Indonesia sebagai suatu wilayah yang harus dijaga dan dipertahankan kedaulatannya. *Mind-set* pertahanan yang terlalu condong ke konsepsi daratan akan membuat ancaman dari wilayah perairan seperti *illegal fishing, maritime piracy*, perdagangan narkoba, dan berbagai kejahatan transnasional lainnya, serta pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah laut Indonesia akan sulit untuk ditangani. Oleh sebab itu, Indonesia harus membenahi, mengkoordinasikan, dan mengatur sistem keamanan wilayah perairannya lebih baik lagi lewat perubahan konsepsi pertahanan landas daratan yang selama ini masih mendominasi strategi pertahanan Indonesia. Agar dapat merubah konsepsi pertahanan yang demikian, maka upaya pengenalan terhadap konsep keamanan nasional Indonesia lantas diperlukan.

Meninjau Konsep Keamanan Nasional Indonesia

"National Security doesn't consists only of an army, a navy, and an air force..it depends on a sound of economy..on civil liberties and human freedom

-Harry S. Truman

Terdapat suatu pemahaman secara konseptual bahwa konsep keamanan nasional adalah konsep yang masih diperdebatkan (*contested concept*). Hal ini disebabkan pemberian makna terhadapnya yang masih berbeda-beda, tergantung dari aktor yang memaknainya. Bahkan konsep ini pun kerap disamartikan dengan konsep keamanan rezim. Walter Lippmann kemudian berusaha mendefinisikan konsep keamanan nasional sebagai berikut, "*a nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war, and is able, if challenged, to maintain them by victory in such a war*"[8].

Pengertian keamanan nasional diatas memperlihatkan bahwa tujuan utama keamanan nasional adalah kebebasan dari berbagai ancaman yang ada, terutama ancaman yang bersifat militer. Oleh karena itu semua bangsa, termasuk Indonesia, butuh kebijakan keamanan nasional. Kebijakan itu akan memberikan gambaran kepentingan utama bangsa serta menjelaskan tentang ancaman dan peluang yang ada. Keamanan nasional dalam konteks Indonesia tentunya harus dilihat dalam kaitannya dengan aspek geopolitik, sehingga bisa mempertimbangkan faktor geografi dan politik yang melandasi suatu negara. Geopolitik Indonesia sendiri adalah persatuan bangsa dan kesatuan serta keutuhan wilayah Indonesia yang berlandaskan kesejahteraan dan keamanan seluruh rakyat. Secara singkat, keamanan nasional adalah menyangkut keutuhan wilayah serta kelangsungan hidup bangsa dan negara, dimana tanggung jawab pelaksanaannya ada pada negara yang dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah.[9]

Lebih lanjut, pendekatan terhadap keamanan nasional Indonesia, cenderung mengarah pada keamanan komprehensif dan terpadu. Ini dikarenakan di dalam melihat keamanan nasional Indonesia perlu dipertimbangkan sejumlah elemen seperti elemen politik, ekonomi, dan militer. Dari segi politik, keamanan nasional ditujukan agar negara Indonesia aman dari konstelasi politik yang ada. Kemudian dari segi ekonomi, bagaimana sumber daya yang dimiliki Indonesia harus dapat sedemikan rupa diproteksi. Elemen militer menekankan pada bagaimana peran TNI dan Polri sebagai instrumen keamanan nasional untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari berbagai ancaman yang muncul.

Dinamika kehidupan bernegara yang seperti itulah yang harus seterusnya menjadi landasan dan pendekatan dalam memahami keamanan nasional Indonesia. Dimana kondisi alamiah, politik, dan institusi negara harus menjadi acuan pokok.[10] Permasalahan yang kemudian harus segera dapat diatasi dalam membentuk suatu keamanan nasional yang fungsional adalah harus adanya pengelolaan yang tepat dan baik, yakni perlu adanya managemen. Manajemen keamanan nasional bisa diartikan sebagai, "Suatu proses pengelolaan sumber daya nasional menjadi sumber daya potensial, pembinaan kekuatan/kemampuan hingga penggunaannya secara efektif dan efisien untuk kepentingan pertahanan keamanan negara".[11] Bentuk pengaturan yang dirasaa harus segera dikuatkan di Indonesia yaitu adalah pengaturan dan pembagian peran yang jelas antara TNI dan Polri agar kedua instrumen keamanan yang di zaman Orde Baru disatukan ke dalam ABRI ini terus menerus terjebak dalam dikotomi militer versus polisi.

Dengan memiliki keamanan nasional yang kuat, maka kepentingan pembangunan pertahanan tidak hanya mendorong upaya untuk kepentingan perkuatan kemampuan tentara, tetapi yang lebih esensial adalah

untuk mendukung perkuatan posisi tawar Indonesia dalam dunia internasional. Namun, sebelum dapat memiliki keamanan nasional yang kuat, terlebih dahulu ancaman terhadap pertahanan negara dan keamanan nasional perlu dirumuskan secara utuh dan komprehensif. Bentuk keamanan nasional sedemikian rupa harus dapat menjawab ancaman dan tantangan potensial yang mungkin datang.

Bentuk Ancaman bagi Keamanan Indonesia

Ancaman adalah segala sesuatu yang membahayakan kedaulatan nasional, integritas wilayah, keselamatan warga negara dan kehidupan demokrasi di Indonesia, serta membahayakan ketertiban dan perdamaian regional dan internasional, baik yang bersifat konvensional maupun yang bersifat non konvensional.[12] Dari pengertian ini, maka dapat dikatakan bahwa ancaman merupakan konsep yang multidimensional, ia bisa berbentuk ancaman militer-nonmiliter, ancaman tradisional-non-tradisional, ancaman eksternal-internal, dan bisa merupakan ancaman langsung maupun tidak langsung. Oleh karena sifatnya yang multidimensi inilah yang membuat upaya mengatasi ancaman pun harus dilakukan secara sektoral dan melibatkan banyak aktor. Jadi tidak hanya TNI atau polisi saja yang bertanggung jawab dalam mengatasi ancaman, tetapi juga intelejen militer, BIN, Deplu, Dephan, hingga ke tingkat Pemerintah Daerah.

Kondisi geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menyebabkan kondisi nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan konteks strategis. Dengan mencermati dinamika konteks strategis, baik global, regional maupun domestik, maka ancaman yang akan muncul akan terwujud dalam tiga jenis, yaitu konflik *interstate* atau antarnegara, konflik internal, dan transnasional konflik.

Konflik *interstate*. Dunia internasional sekarang yang diwarnai oleh globalisasi. Semakin menyempitnya dunia akibat perkembangan tekhnologi, telekomunikasi, dan transportasi memunculkan kecenderungan similaritas dan uniformitas dari para individu, kelompok, dan sistem sosial yang melewati atau bahkan menghapus batas tradisional negara. Akibatnya, kecenderungan untuk terjadinya konflik secara terbuka antarnegara akan sangat sulit untuk terjadi. Hal ini disebabkan negara akan memikirkan kalkulasi dampak yang akan didapatnya apabila melakukan konflik terbuka dengan negara lain.

Indonesia, yang notabene merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara pun dalam beberapa tahun ke depan tidak akan mempunyai ancaman konflik terbuka dengan negara lain, karena potensi regionalisme ASEAN kini tengah menguat dimana ASEAN sedang berupaya membangun suatu identitas bersama, identitas ASEAN. Sehingga kecenderungan untuk terjadinya konflik antarnegara sangat kecil untuk terjadi. Kecuali ada faktor yang mendorong terjadinya konflik, seperti misalnya perubahan dinamika *power* negara-negara besar di tingkat regional dan global[13], dimana negara-negara tersebut berusaha memperbesar *power* negaranya lewat kebijakan yang ekspansionis.

Namun, dari sisi konflik *interstate*, ada ancaman yang harus serius diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, yaitu mengenai masalah wilayah laut. Kepentingan negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan lebih banyak berangkat dari lingkungan maritim, terutama dengan adanya selat malaka yang menjadi jalur pelayaran internasional. Konflik kepentingan negara yang terjadi di

wilayah lautlah yang kemudian harus bisa ditangani. Konflik-konflik tersebut biasanya terjadi karena adanya pelanggaran kedaulatan negara ataupun dikarenakan tarik menarik kewenangan. Dalam beberapa dekade ke depan, masalah keamanan maritim masih akan menghadapi minimal lima tantangan: *terrorism and crime at sea, humanitarian assistance, environmental protection, safety and protection of shipping* dan *resource conflict*. Tantangan yang harus segera dijawab oleh kekuatan maritim Indonesia agar tidak berdampak pada terjadinya konflik antarnegara.

Konflik internal. Masalah konflik internal adalah masalah yang akan menjadi ancaman utama bagi keamanan nasional Indonesia yang masyarakatnya heterogen. Ancaman konflik internal yang terjadi di Indonesia kemudian lebih disebabkan karena adanya persoalan mengenai kelompok yang menginkan disintegrasi bangsa. Masalah ini terus menerus muncul dikarenakan instabilitas sosial dan politik yang melanda Indonesia sejak jatuhnya rezim Orde Baru belum juga pulih. Instabilitas ini akhirnya menimbulkan beragam konflik horizontal terjadi di masyarakat Indonesia, antara suku yang satu dengan suku yang lain, atau antara kelompok pendatang dengan masyarakat asal.

Potensi ancaman yang akan muncul di dalam internal Indonesia juga adalah mengenai perlindungan HAM terhadap masyarakat Indonesia yang tak kunjung diberikan pemerintah. Masyarakat yang merasa kecewa ini kemudian melancarkan gerakan-gerakan separatis yang akhirnya mengancam keamanan nasional Indonesia. Hal ini diperparah lagi dengan aparat penegak hukum, yaitu polisi yang kini merasa superior setelah pisah dengan TNI, sehingga kerap melakukan tindakan sewenang-wenang.

Konflik Transnasional. Ancaman yang paling akan muncul bagi Indonesia dalam konflik transnasional ini adalah masuknya kelompok terorisme di Indonesia. Ketidakmampuan pemerintah untuk menangani masalah terorisme ini akan menimbulkan dampak yang besar. Indonesia bisa saja kemudian mendapatkan ancaman agresi dari negara kuat, seperti Amerika Serikat jika tidak dapat menangani kasus terorisme. Negara besar akan berupaya menjustifikasi tindakannya melakukan intervensi dengan berdalih untuk menghancurkan jaringan terorisme. Aksi-aksi terror jejaring terorisme memiliki dua karakter utama:[14] Pertama, aksi tersebut cenderung merupakan *low intensify conflict* yang bertujuan untuk melakukan serangan-serangan *high profile*. Kedua, aksi-aksi tersebut tidak dirancang sebagai sesuatu yang linear yang memiliki tahapan yang jelas. Dengan begitu, prioritas untuk mempunyai strategi kontraterorisme akan menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan keamanan nasional di prioritas yang lebih tinggi dari perlindungan dan penegakkan hak-hak sipil.

Ancaman dari sisi transnasional lainnya kemudian bisa bersumber dari kejahatan terorganisir transnasional (*Transnational Organized Crimes*), dengan memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif. Ancaman kejahatannya bisa berupa penyelundupan obat bius, perdagangan anak, pembajakkan laut, pencemaran dan perusakkan ekosistem, aksi radikalisme, dan beberapa kejahatan transnasional lainnya.[15] Untuk bisa menyelesaikan permasalahan kejahatan terorganisir transnasional yang seperti demikian, kemudian Indonesia pun perlu dan harus mengadakan kerjasama pertahanan dengan negara lain agar metode penyelesaiannya bisa komprehensif.

Itulah tiga jenis ancaman bagi keamanan nasional Indonesia dilihat dari dinamika

strategisnya. Lebih lanjut, agar Indonesia dapat memainkan peran yang kuat di dunia internasional, negara ini perlu juga melihat mengenai kecenderungan dan tantangan yang harus dihadapinya dalam dinamika dunia internasional. Setidaknya, Indonesia perlu menangkap dan mengantisipasi beberapa gejala yang menunjukkan adanya pergeseran dalam lingkungan internasional. Beberapa gejala tersebut diantaranya adalah:[16] melemahnya multilateralisme dengan semakin dominannya politik dan ekonomi AS setelah Perang Dingin berakhir, meningkatnya persenjataan dunia terutama dengan banyaknya negara yang mempunyai kepemilikan senjata nuklir, adanya pembangunan berdasarkan Iptek, berkurangnya kekayaan alam, reformasi informasi yang berjalan cepat menuju *knowledge based global society,* dan meningkatnya persaingan ekonomi akibat liberalisasi yang terjadi di dunia internasional. Dengan melihat beberapa tantangan diatas, Indonesia harus segera berbenah dan merumuskan strategi pertahanan dan keamanan nasional yang bisa menghadapi tantangan dan ancaman yang ada.

Rethinking Kebijakan Strategi Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Sebelum dapat merumuskan rekomendasi strategi pertahanan dan keamanan nasional Indonesia yang baik, maka terlebih dahulu harus dapat diidentifikasi poin-poin mana saja dalam strategi pertahanan Indonesia yang dianggap masih kurang tepat. Setidaknya ada empat hal yang penulis anggap rancu dalam perumusan strategi pertahanan dan keamanan yang tepat sasaran.

Pertama, adalah menyangkut konsepsi landas darat yang menjadi arahan dan prioritas utama Indonesia dalam membangun instrumen pertahanannya. Sebagaimana juga telah disebutkan diatas bahwa potensi ancaman yang ada bagi Indonesia ke depannya lebih banyak berasal dari lingkungan maritim. Indonesia yang menempatkan konsepsi pertahanan landas darat tersebut kemudian akan sangat sulit untuk mengantisipasi ancaman yang berasal dari wilayah maritim ini. Kasus Ambalat misalnya, telah memperlihatkan bahwa Indonesia tidak mempunyai kekuatan penangkal yang memadai di sektor kelautan. Kasus tersebut juga telah memperlihatkan bagaimana terdapat kesenjangan tekhnologi dan peralatan perang yang dimiliki oleh Indonesia dan Malaysia, dimana kekuatan laut dan udara yang dimiliki Indonesia rata-rata sudah tua dan using, akibat kurang menjadi perhatian. Belum lagi isu perairan Natuna yang menyeruak akhir-akhir ini dimana kapal-kapal ikan RRT sering masuk ke dalam perairan Indonesia dan disinyalir konsep abstrak Tiongkok mengenai *ten-dash-line* juga beririsan dengan perairan Indonesia di Natuna membuat urgensi memiliki Angkatan Laut yang dapat mengamankan perairan Indonesia semakin penting.

Lebih lanjut, terdapat lakuna yang serius dalam strategi pertahanan Indonesia. Sampai saat ini, dalam menghadapi ancaman musuh dari luar, Indonesia menganut strategi pertahanan yang dirumuskan dalam strategi penggunaan kekuatan atau pola operasi berdasarkan strategi pertahanan pulau-pulau besar, yang dilakukan melalui pertahanan berlapis di wilayah (zona), terdiri dari Zona Pertahanan I (penyangga), II (pertahanan), dan III (perlawanan).[17] Terlihat bahwa konsepsi pertahanan landas darat saja tidak cukup untuk dapat menghadapi ancaman yang bakal muncul, terutama ancaman yang terjadi tidak dari wilayah darat.

Kedua, hingga kini, upaya untuk

meningkatkan profesionalisme TNI pasca pisahnya dengan Polisi di akhir Orde Baru masih merupakan suatu usaha yang terus dilakukan. Gerakan reformasi menuju cita-cita Indonesia baru yang terbebas dari hubungan sipil-militer yang buruk. Akan tetapi, masalah redefinisi peran dan keterlibatan TNI dalam konteks pertahanan dan keamanan Indonesia masih menimbulkan kerancuan dan kebingunan. Peran TNI dirasa masih sering tumpang tindih dengan instrumen pertahanan dan keamanan Indonesia yang lain seperti polisi, BIN, dan lain sebagainya. Misalnya adalah keterlibatan TNI dalam kerusuhan sosial yang banyak terjadi di Indonesia, seharusnya itu sudah menjadi peran polisi untuk meredakannya, namun TNI seringkali turut campur dan malah memperkeruh suasana. Sebenarnya tidak hanya TNI saja yang sering tumpang tindih dan mempunyai peran yang salah, BIN sebagai badan yang seharusnya berfokus untuk menganalisa ancaman yang bakal datang dari lingkungan luar malah kini sibuk dalam urusan domestik. Bahkan akhir-akhir ini malah diisukan terlibat dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Hal yang seperti inilah yang menyebabkan strategi pertahanan Indonesia tidak ditempatkan dalam tempat yang sebenarnya.

Tuntutan berikutnya dari reformasi TNI adalah bagaimana caranya untuk dapat memiliterkan militer. Fenomena yang marak terjadi di Indonesia adalah militer yang berpolitik, terutama banyak terjadi di masa Orde Baru. Setidaknya ada tiga kesulitan besar jika militer Indonesia masih tetap berpolitik, yaitu:[18] militer yang terlibat dalam politik akan merusak kompetisi politik, militer yang terlibat politik juga akan mendistorsi atau merusak kebijakan politik, dan militer yang berpolitik akan menjadikan keamanan negara sebagai kartu *truf* dalam rangka *bargaining* politik. Oleh sebab itulah, perlu untuk melakukan militerisasi militer Indonesia lewat adanya perumusan peran TNI yang lebih ketat lagi.

Poin ketiga yang ingin penulis sampaikan adalah berkenaan dengan adanya postur pertahanan Indonesia yang salah. Adanya kesenjangan yang lebar antara tujuan (kepentingan) dan kebutuhan pertahanan nasional di satu pihak, dengan postur pertahanan yang ada di pihak lain, membuat terciptanya kesenjangan antara ancaman nyata yang dihadapi dengan postur yang ada.[19] Kebutuhan anggaran bagi pertahanan Indonesia yang demikian besar tidak ditunjang dengan alokasi APBN yang besar juga bagi bidang pertahanan Indonesia. Selama ini, kemampuan negara mengalokasikan anggaran pertahanan rata-rata pertahun di bawah 1 % dari produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai perbandingan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada umumnya memiliki resiko lebih tinggi, anggaran pertahanan bahkan berkisar 4 % - 5 % PDB.[20] Dengan alokasi anggaran kurang dari 1 % PDB sangat sulit untuk membangun kekuatan pertahanan yang memadai. Kurangnya alokasi anggaran tersebut akhirnya memperlihatkan bahwa postur pertahanan Indonesia tidak ditentukan dari sisi pertimbangan geopolitik atau ancaman yang ada, tetapi lebih didominasi oleh postur pertahanan yang dikendalikan anggaran minim.

Poin keempat adalah mengenai isu strategis perjanjian pertahanan dengan Singapura yang ditandatangani tahun 2007. Perjanjian pertahanan ini sendiri meliputi beberapa lingkup kerjasama yaitu, dialog dan konsultasi bilateral secara berkala, pertukaran intelijen termasuk kontra terorisme, serta kerjasama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, lingkup kerjasama ini juga mengenai upaya memajukan pengembangan Sumber Daya Manusia, pertukaran siswa personel

militer, dan latihan bersama atau terpisah (operasi & logistik) termasuk akses timbal balik ke area dan fasilitas latihan, juga kerjasama dalam SAR, penanggulangan bencana, dan bantuan kemanusiaan.[21] Ke depannya, Indonesia perlu untuk dapat mengidentifikasi bentuk kerjasama pertahanan macam apa dan negara mana saja yang dapat menguntungkan bagi keamanan nasional Indonesia.

PENUTUP

"No Sir! Kami tidak ambruk!

Bersama-sama rakyat Indonesia,

kita akan pecahkan segala kesulitan-kesulitan itu,

Bersama-sama kita akan ganyang kesulitan itu"

-Soekarno, 1964

Sebagai kesimpulan, berbagai dinamika keamanan nasional Indonesia yang telah dijabarkan diatas, dengan segala potensi ancaman yang akan muncul adalah sebuah proses yang bersifat dinamis. Dimana evaluasi antarinstitusi dan kebijakan keamanan nasional Indonesia harus terus dilakukan, demi mengantisipasi perubahan dinamika lingkungan strategis. Penetapan strategi pertahanan dan keamanan nasional Indonesia juga sebisa mungkin melibatkan peran masyarakat sipil agar segenap masyarakat Indonesia dapat merasakan pentingnya melindungi kedaulatan entitas negara bangsa yang bernama Indonesia.

Inti dari perumusan strategi pertahanan nasional sebenarnya adalah adanya suatu kesadaran bahwa menjaga kedaulatan bangsa adalah tugas bersama seluruh komponen bangsa dengan terus memberikan makna terhadap gagasan pertahanan dan keamanan nasional. Dengan kata lain, sedikit demi sedikit, pembentukkan strategi pertahanan dan keamanan nasional yang lebih partisipatif dan proaktif terhadap dinamika dunia internasional akan dapat terwujud.

Dengan menitikberatkan pada tujuan pencapaian kepentingan nasional, strategi pertahanan dan keamanan nasional yang tepat sasaran akan dapat dirumuskan. Kepentingan nasional Indonesia sendiri adalah untuk melindungi kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, melindungi keselamatan dan kehormatan bangsa, dan ikut dalam menjaga perdamaian dunia.[22] Setelah menganalisa berbagai ancaman dan poin-poin yang rancu dalam kebijakan strategi pertahanan dan keamanan nasional, maka penulis memberi rekomendasi beberapa aspek yang perlu dibenahi dalam upaya merumuskan strategi pertahanan yang tepat bagi Indonesia.

Aspek pertama yang harus segera dilakukan adalah dengan berupaya mengembangkan sistem pertahanan Indonesia yang selama ini hanya mengacu pada konsepsi pertahanan landas darat. Sistem pertahanan negara adalah sistem yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dari segala ancaman yang akan muncul.[23] Pengembangan sistem pertahanan tersebut harus melibatkan pengalokasi anggaran yang seimbang antara TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Sehingga dengan demikian Indonesia akan dapat merubah *mind-set* pertahanannya yang selama ini hanya berfokus di darat saja. Selain itu, Indonesia juga akan kemampuan pertahanan militer yang kuat[24]. Visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang akan membuat Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia patut didukung. Namun visi tersebut tidak akan termaterialisasi apabila dogma pertahanan Indonesia masih berpusat pada matra darat.

Angkatan Laut Indonesia perlu diberikan perhatian lebih karena ancaman utama sebagai negara kepulauan terbesar di dunia adalah bagaimana mengamankan wilayah perairan Indonesia yang demikian luas.

Aspek berikutnya yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi pertahanan yang baik adalah dengan mengembangkan pertahanan nir-militer Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa kini hakekat ancaman pun, bergeser dari ancaman yang datang dari negara (*state threat*) melalui penggunaan senjata pemusnah massal menjadi kelompok (*non state threat*) dengan penguasaan teknologi tinggi. Perang yang terjadi dalam dunia internasional pun kemudian juga melibatkan unsur "perang otak" atau "perang selisih keunggulan". Oleh sebab itu kemudian Indonesia harus dapat menyusun strategi "perang sumber daya manusia" yang menekankan pada tekhnologi, serta ilmu dan pengetahuan sebagai bagian dari upaya pengembangan pertahanan nir-militer.[25]

Selanjutnya, aspek terpenting yang harus segera dilakukan untuk membentuk strategi pertahanan dan keamanan nasional yang efektif adalah dengan menguatkan mekanisme koordinasi antar-instrumen keamanan nasional. Indonesia perlu dengan segera menegaskan kembali mengenai peran tanggung jawab keamanan nasional Indonesia. Terminologi sistem pertahanan nasional, Sishanrata (Sistem Pertahanan Rakyat Semesta) yang memasukkan unsur rakyat harus dapat diimplementasikan dengan tepat. Tanggung jawab pertahanan dan keamanan nasional Indonesia harus dapat menjadi suatu *integrated responsibility*. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan koordinasi tiga tingkat, yaitu mengatasi seluruh ancaman keamanan nasional, lalu mengatasi satu jenis ancaman dengan berbagai spesifikasi tugas, dan menjalankan satu jenis tugas keamanan nasional yang melibatkan berbagi aktor secara bersamaan.[26]

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Banyu Perwita, Anak Agung dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Buzan, Barry, *et.al*. 1999. *Security: A New Framework for Analysis*. London: Boulder.

Papp, Daniel S. 1997. *Contemporary International Relations: Framework for Understanding*. New York: Macmillan.

Suraputra, D. Sidik Suraputra. 2006. *Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya [Suatu Kumpulan Karangan]*. Jakarta: Diadit Media.

Stanley. 2004. *Keamanan, Demokrasi, dan Pemilu 2004*. Jakarta: Propatria.

Wibisono, Makarim. 2006. *Tantangan Diplomasi Multilateral*. Jakarta: LP3ES.

Widjajanto, Andi. 2004. *Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta: Propatria.

Artikel Jurnal

Anggoro, Kusnanto. "Kedaulatan, Teritorialitas, dan Keamanan Pasca Westphalia". *Global: Jurnal Politik Internasional Vol. 6 No. 2 Mei 2004 Kedaulatan Kontemporer: Terkikisnya Kontrol Negara*.

Juwana, Hikamahanto. "Restrictions Under International Law to Build Up Military Defense Capability". *Global: Jurnal Politik Internasional Vol.6 No 1 November 2003 Indonesia Pasca IMF?*

Artikel Internet

Desian, Krisdantoro. "Reformasi Pertahanan dan Kapabilitas Pertahanan Negara yang Murah Meriah". Dari http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=69.

Gunawan, Iwan. "Konsepsi dan Implementasi Managemen Pertahanan dan Keamanan Negara". Dari http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=55.

"Menhan RI: Tidak Benar jika DCA Kompensasi Perjanjian Ekstradisi". Dari http://www.dmcindonesia.web.id/berita.php?id=247.

"Ringkasan Eksekutif Buku Putih Dephan". Dari http://www.dephan.go.id/buku_putih/ringkasan.htm.

"TNI Pasca Ambalat". dari http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=333&id=46&tab=0.

Lain-lain

Kasim, Yandri K. *Dinamika Lingkungan Strategis, Analisa Ancaman, dan (Alternatif) Strategi Pertahanan Indonesia*. Bahan mata kuliah Pengkajian Strategik di jurusan Hubungan Internasional FISIP UI.

Majalah TSM No. 3 Tahun 1987. Bahan pokok bahasan 'Pemikiran Strategis dan Keamanan' mata kuliah Pengkajian Strategik di jurusan Hubungan Internasional FISIP UI.

"Pendekatan Integratif untuk Keamanan Nasional Indonesia". Bahan seminar *Mencari Bentuk Sistem Keamanan Nasional Indonesia: Komparasi dan Rekomendasi*, yang diselenggarakan Pacivis UI. Tanggal 29 Mei 2007.

"Perjanjian RI-Singapura Dinilai Rugikan RI". Harian KOMPAS tanggal 2 Mei 2007.

"Studi Perbandingan Keamanan Nasional Studi Kasus: Malaysia, Inggris, Australia, Israel, Amerika Serikat, dan India". Bahan seminar *Mencari Bentuk Sistem Keamanan Nasional Indonesia: Komparasi dan Rekomendasi*, yang diselenggarakan Pacivis UI. Tanggal 29 Mei 2007

Wawancara penulis dengan Menteri Pertahanan RI, Juwono Sudarsono dalam kunjungan ke Departemen Pertahanan RI, tanggal 6 Maret 2007.

---

[1] Pandu Utama Manggala, MA, M.Dipl, diplomat muda Indonesia, saat ini tengah menempuh studi Doktoral di Kampus National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Jepang. Pandu memperoleh gelar Sarjana dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia serta gelar Master of Arts in International Relations & Master of Diplomacy dari Australian National University (ANU), Canberra. Pandu dikenal sebagai seorang intelektual-aktivis yang mampu menyeimbangkan prestasi akademik dengan kontribusi sosial. Pada tahun 2014, Duta Besar Australia untuk Indonesia memberikan penghargaan "Excellence in Engagement" kepada Pandu atas prestasinya selama menjadi awardee Australian Awards. Pandu juga pernah mengemban amanah sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Australian Capital Territory dan Ketua BEM FISIP UI. Ia kini pun tengah diamanahi sebagai Ketua PPI Kanto, Jepang dan Presiden International Students' Council di kampusnya, GRIPS.

2 Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations: Framework for Understanding,* (New York: Macmillan, 1997), hlm. 426.

3 Barry Buzan, *et.al., Security: A New Framework for Analysis*. (London: Boulder, 1999), hlm. 21.

4 Kusnanto Anggoro, "Kedaulatan, Teritorialitas, dan Keamanan Pasca Westphalia", *Global: Jurnal Politik Internasional Vol.6 No 2 Mei 2004 Kedaulatan Kontemporer: Terkikisnya Kontrol Negara,* (Depok: Departemen HI FISIP UI, 2004), hlm. 8.

5 "Tekhnologi & Strategi Militer", dalam *Majalah TSM* No. 3 Tahun 1987, hlm. 44, bahan pokok bahasan 'Pemikiran Strategis dan Keamanan' mata kuliah Pengkajian Strategik di jurusan Hubungan Internasional FISIP UI.

6 Krisdantoro Desian, "Reformasi Pertahanan dan Kapabilitas Pertahanan Negara yang Murah Meriah", diakses dari http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=69, pada tanggal 2 Juni 2007, pukul 19.00.

7 Yandri K. Kasim, *Dinamika Lingkungan Strategis, Analisa Ancaman, dan (Alternatif) Strategi Pertahanan Indonesia,* bahan mata kuliah Pengkajian Strategik di jurusan Hubungan Internasional FISIP UI.

8 Prof. DR. D. Sidik Suraputra, SH., *Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya [Suatu Kumpulan Karangan],* (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm. 151.

9 DR. A. A Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 121.

10 "Studi Perbandingan Keamanan Nasional Studi Kasus: Malaysia, Inggris, Australia, Israel, Amerika Serikat, dan India", Dari bahan seminar *Mencari Bentuk Sistem Keamanan Nasional Indonesia: Komparasi dan Rekomendasi*, yang diselenggarakan Pacivis UI, pada tanggal 29 Mei 2007.

11 Stanley, *Keamanan, Demokrasi, dan Pemilu 2004,* (Jakarta: Propatria, 2004), hlm. 28-29.

12 Iwan Gunawan, "Konsepsi dan Implementasi Managemen Pertahanan dan Keamanan Negara", diakses dari http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=55, pada tanggal 2 Juni 2007, pukul 19.20.

13 Andi Widjajanto, MSc.,MS., *Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, (Jakarta: Propatria, 2004), hlm. 16.

14 *Ibid.*, hlm. 18.

15 *Ibid.*, hlm. 35.

16 "Ringkasan Eksekutif Buku Putih Dephan", diakses dari http://www.dephan.go.id/buku_putih/ringkasan.htm, pada tanggal 2 Juni 2007, pukul 19.15.

17 Makarim Wibisono, *Tantangan Diplomasi Multilateral,* (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 274-276.

18 "TNI Pasca Ambalat", diakses dari http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=333&id=46&tab=0, pada tanggal 2 Juni 2007, pukul 19.05.

19 Denny J.A, *Visi Indonesia Baru Setelah Reformasi 1998,* (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. 66-67.

20 "TNI Pasca Ambalat", *Ibid.*

21 Ringkasan Eksekutif Buku Putih Dephan", *Loc.Cit.*

22 "Menhan RI: Tidak Benar jika DCA

Kompensasi Perjanjian Ekstradisi", diakses dari http://www.dmcindonesia.web.id/berita.php?id=247, pada tanggal 2 Juni 2007, pukul 19.25.

23 Yandry K. Kasim, *Op.Cit*.

24 Andi Widjajanto, *Op.Cit*, hlm. 99.

25 Kemampuan pertahanan militer (*military defense capability*) adalah penguatan kekuatan militer yang dilakukan negara di masa damai, sebagai suatu konsekuensi dari cara berpikir *self defense*, untuk mengatasi ancaman serangan dari negara lain. Lihat Hikamahanto Juwana, "Restrictions Under International Law to Build Up Military Defense Capability", *Global: Jurnal Politik Internasional Vol.6 No 1 November 2003 Indonesia Pasca IMF?,* (Depok: Departemen HI FISIP UI, 2003), hlm. 70.

26 Wawancara penulis dengan Menteri Pertahanan RI, Juwono Sudarsono dalam kunjungan ke Departemen Pertahanan RI, tanggal 6 Maret 2007.

27 "Pendekatan Integratif untuk Keamanan Nasional Indonesia" bahan seminar *Mencari Bentuk Sistem Keamanan Nasional Indonesia: Komparasi dan Rekomendasi*, yang diselenggarakan Pacivis UI, pada tanggal 29 Mei 2007.

BIRO HUMAS SETTAMA LEMHANNAS RI
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp/Fax. 021-3451926, Website: www.lemhannas.go.id

ISSN 2252-8555